

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling Timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Jawa Tengah dan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha). Data wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2015

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah	
			(ha)	(%) thd total
1.	Sumber	18	7.673	7,57
2.	Bulu	16	10.240	10,10
3.	Gunem	16	8.020	7,91
4.	Sale	15	10.715	10,57
5.	Sarang	23	9.133	9,01
6.	Sedan	21	7.964	7,85
7.	Pamotan	23	8.156	8,04
8.	Sulang	21	8.454	8,34
9.	Kaliori	23	6.150	6,06
10.	Rembang	34	5.881	5,80
11.	Pancur	23	4.593	4,53
12.	Kragan	27	6.166	6,08
13.	Sluke	14	3.759	3,71
14.	Lasem	20	4.504	4,44
Kabupaten Rembang		294	101.408	100

Sumber: Rembang Dalam Angka Tahun 2015

c. Kondisi Topografi

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 11,81% terletak pada ketinggian 0–7 meter dpl, ketinggian 8 -100 m dpl sebesar 56,83%, ketinggian 101- 500 m dpl sebesar 28,29% dan ketinggian 501–1.000 m dpl sebesar 3,07%.

Wilayah Kabupaten Rembang seluas 46.367 ha (45,72%) mempunyai kelerengan sebesar 0-2%. Sedangkan 36.374 ha lainnya (35,84%) mempunyai kelerengan sebesar 3-15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 16-40% dan > 40% masing-masing seluas 13,78% dan 4,66% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

d. Kondisi Geologi**1) Struktur Tanah**

Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi:

- a) Tanah Alluvial
Yaitu tanah yang beraneka sifatnya, dengan warna kelabu, coklat hitam mempunyai produktivitas yang sangat rendah sampai tinggi, berasal dari sedimentasi sungai di dataran utara tengah dan sedikit di wilayah pantai sebelah timur, meliputi 10 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman.
- b) Tanah Regosol
Yaitu tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, coklat, kelabu, meliputi 5 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar pantai utara. Tanah jenis ini berasal dari sedimentasi pasir pantai, digunakan terutama untuk pertanian dan perkebunan.
- c) Tanah Grumosol
Yaitu tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya dari rendah sampai sedang. Jenis tanah ini menduduki luas kedua atau sebesar 32% dari luas wilayah

Kabupaten Rembang, terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan.

d) Tanah Mediteran Merah Kuning

Yaitu tanah yang agak netral, berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang sampai tinggi, meliputi kurang lebih 45 % dari seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jenis tanah ini terletak dibagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan dan biasanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput

2) Potensi Kandungan Tanah

Kabupaten Rembang memiliki kandungan tanah Andosol dan endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat, dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian. Dengan potensi yang cukup besar maka beberapa pabrik semen telah dan sedang mengajukan permohonan perijinan untuk membuka usaha di Kabupaten Rembang.

e. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa embung, bendung, cekdam, dan sungai. Beberapa embung besar yang mensuplai ketersediaan air baku yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Panohan dan Embung Grawan. Sedangkan sungai besar yang ada adalah sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. di Kabupaten Rembang terdapat 121 Cekdam dan 293 daerah irigasi. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang teraliri air sepanjang tahun.

Diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah yang curah hujannya rendah adalah Kabupaten Rembang. Curah hujan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir (2011-2015). Curah hujan yang terendah yaitu terjadi pada tahun 2012 sebanyak 1.081,43 mm dengan 68 hari hujan.

f. Kondisi Iklim

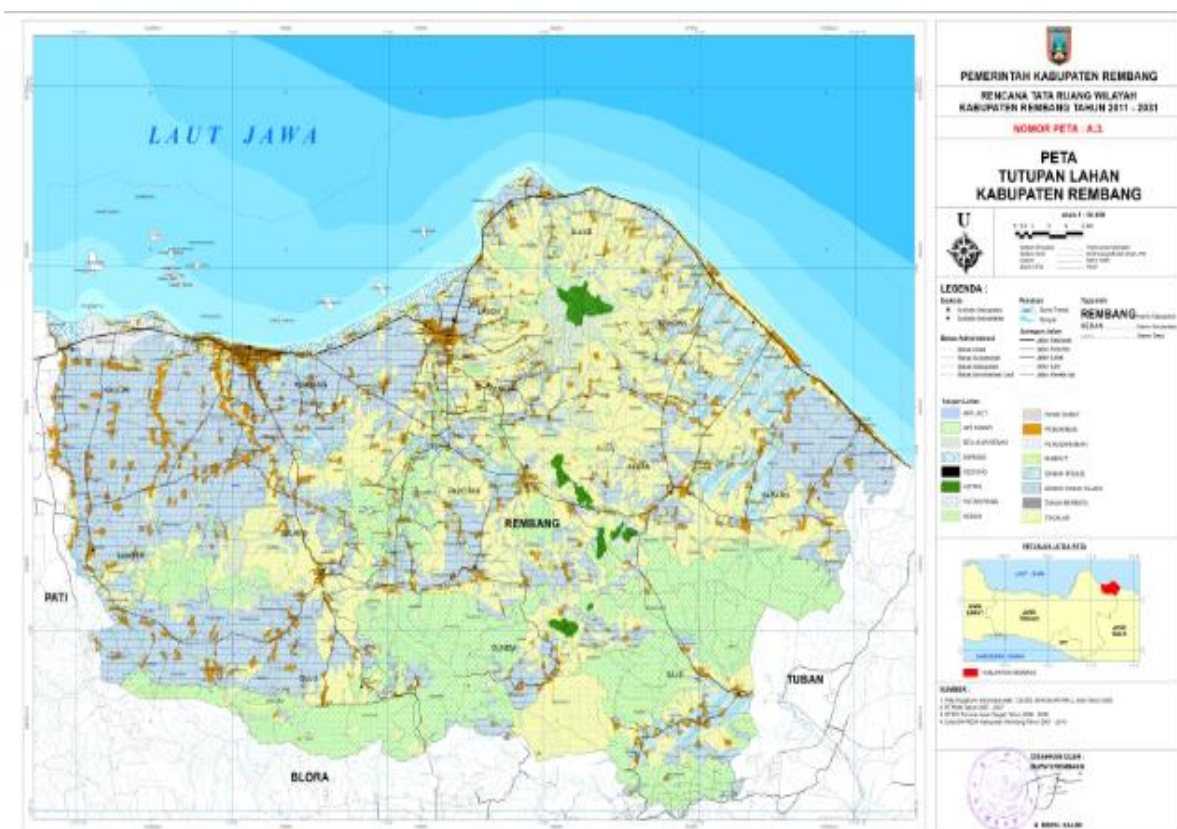
Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu terendah sebesar 22°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C, sehingga suhu rata-rata di Kabupaten Rembang 27-33°C.

di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.179,86 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember yaitu sebanyak 197 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus dan September yaitu sebanyak 10 dan 17 mm/bulan. Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut.

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan tata guna lahan, Kabupaten Rembang terdiri atas lahan sawah sebesar 29.020 hektar (28,62%), lahan bukan sawah sebesar 53.156 hektar (52,42%) dan lahan bukan pertanian sebesar 19.232 hektar (18,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 %, hutan 23,45 % dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 %.

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut ini:



Gambar 2.2
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Strategi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031, Kabupaten Rembang terbagi ke dalam berapa wilayah strategis yaitu wilayah strategis pertanian, perikanan, pertambangan, industri, dan kawasan pusat pelayanan.

Kawasan prioritas adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya diprioritaskan. Kawasan prioritas dapat dilihat sebagai kawasan-kawasan atau ruang wilayah yang bersifat tertentu karena berpengaruh penting terhadap aspek-aspek Poleksosbudhankamnas. Kawasan-kawasan tersebut mempunyai kategori: *pertama*, fungsi tertentu, seperti untuk kegiatan industri, pertanian, pariwisata, dan lain-lain; dan *kedua*, sifat khusus, karena rawan banjir, lingkungan rusak, kawasan-kawasan pertanahan keamanan (hankam), kawasan perbatasan, dan lain-lain.

Strategi penataan wilayah menggunakan pendekatan kawasan dan potensi lokal yang merupakan upaya untuk mengatur pengembangan potensi secara spasial. Beberapa kawasan yang direncanakan mencakup berbagai aspek yaitu, Kawasan lindung, Kawasan rawan bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan pertanian terdiri dari Kawasan peruntukan tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; dan Kawasan peruntukan peternakan, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan pertambangan, Kawasan peruntukan industri, Kawasan peruntukan pariwisata.

Selain penetapan kawasan peruntukan dalam Perda Tata Ruang tersebut juga mencakup penetapan kawasan strategis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah Kawasan koridor perbatasan Blora–Tuban–Rembang–Bojonegoro; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Kawasan pembangkit listrik tenaga uap Rembang.

b. Pengembangan Kawasan Lindung dan Budidaya

Berdasarkan ketentuan pasal 13 dan pasal 21 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, Kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Rembang ditetapkan ke dalam beberapa wilayah.

Pengembangan kawasan budidaya mencakup beberapa wilayah yaitu untuk Kawasan lindung yang bertujuan untuk mempertahankan Kawasan hutan lindung; mempertahankan fungsi Kawasan lindung non hutan; merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir; dan mengembangkan ekowisata.

Kawasan lindung meliputi berbagai aspek yaitu Kawasan hutan lindung; kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; Kawasan lindung setempat; Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; Kawasan rawan bencana; Kawasan lindung geologi; dan Kawasan lindung lainnya. Sedangkan Kawasan budidaya bertujuan untuk peruntukan berbagai kepentingan yaitu: peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan hutan rakyat; peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; Kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Salah satu pengembangan Kawasan peruntukan budidaya lainnya salah satunya adalah pengembangan wilayah peruntukan permukiman dan pengembangan usaha masyarakat termasuk usaha mikro, kecil dan menengah.

c. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Rembang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Kesejahteraan yang akan dicapai adalah meningkatnya kemampuan masyarakat yang dalam hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, pencegahan proses kemiskinan dan menghapus perangkat keterbelakangan sosial budaya, melainkan juga pemenuhan akan nilai tambah sosial, sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dalam upaya pembangunan pedesaan, sebagai salah satu solusi penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Rembang dipandang telah berhasil dalam memfasilitasi program pengembangan kawasan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Program ini telah berhasil mengembangkan Kawasan Wisata Batik Lasem yang didukung oleh Pertanian dan Peternakan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah menetapkan desa-desa di wilayah pesisir yang terdiri dari Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal dan Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang serta Desa Gedongmulyo, Desa Dasun dan Desa Tasiksono Kecamatan Lasem menjadi daerah Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) sebagai implementasi dari pasal 83 UU no. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 bagian kedua. Modal utama yang dimiliki oleh keenam desa tersebut diatas adalah kawasan pariwisata pantai yang didukung potensi kelautan, perikanan, konservasi mangrove dan potensi lainnya.

Untuk pengembangan kawasan tersebut perlu adanya keterperpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif dalam bentuk menggali potensi sumberdaya baik manusia maupun alam yang dimiliki masyarakat sehingga muncul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masih belum memiliki arahan yang jelas terkait dengan Pengembangan kawasan pedesaan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai kebijakan pengembangan potensi lokal dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian pedesaan. Pemberdayaan perangkat desa memiliki peran strategis untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan dana desa yang cukup besar. Desa juga dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru dengan memadukan berbagai potensi yang ada pada beberapa desa. Konsep pengembangan kawasan pedesaan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah dengan membangun kerjasama antar desa dan pengembangan potensi desa sendiri. Strategi yang dikemukakan antara lain dengan memperkuat atau mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan memperkuat kelembagaan desa melalui pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. di wilayah Provinsi Jawa Tengah, kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi terdiri dari: kawasan rawan banjir, kawasan rawan aktivitas gunung berapi, kawasan rawan gas beracun dan rawan longsor. Kabupaten Rembang yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan bencana alam terdiri dari : kawasan rawan banjir, rawan longsor dan rawan bencana kekeringan.

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Potensi rawan banjir didasarkan pada parameter-parameter yaitu : (1) kelas kemiringan lereng, (2) drainase permukaan, (3) tekstur tanah, (4) kelembaban, (5) air tanah dan (6) curah hujan.

Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi mangrove wilayah balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun Kabupaten Rembang Tahun 2006 menyebutkan bahwa pada kemiringan lereng, kelembaban tanah dan curah hujan semakin tinggi tingkatnya maka semakin rawan. Pada tekstur tanah semakin halus tekstur tanah maka akan semakin rawan. Berdasarkan parameter diatas Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir, hal ini menunjukkan tingkat bahaya banjir terhadap wilayah atau zona-zona berdasarkan gabungan parameter diatas, Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir. Hal ini menunjukkan tingkat bahaya banjir terhadap wilayah atau zona-zona berdasarkan pertimbangan analisis diatas dan bukan kondisi eksisting, adapun kondisi tersebut dapat dilihat pada peta potensi rawan bencana. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Kaliore, Rembang dan Lasem.

b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena berada pada zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kriteria kawasan ini adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Tanah longsor dijumpai di bagian selatan daerah Rembang yang berkembang tanah longsor jenis aliran bahan rombakan dan amblesan. Selain itu dijumpai pula kelurusan tebing yang berarah barat – timur. di daerah Gunung Lasem dijumpai tanah longsor jenis luncuran bahan rombakan.

Di Kabupaten Rembang mempunyai morfologi dataran menempati pada daerah Kota Kabupaten. Dataran ini juga menempati di sepanjang pantai utara dengan kelerengan berkisar 0° – 4° . Morfologi bergelombang lemah sampai kuat yang ada di daerah Kabupaten Rembang bagian selatan sampai perbatasan dengan Kabupaten Blora, kelerengan berkisar 10° – 60° . Bagian timur laut daerah Rembang terdapat pola topografi melingkar sudut lereng berkisar antara 15° – 60° yang termasuk dalam wilayah Gunung Lasem.

Kriteria daerah rawan longsor adalah Kawasan yang memiliki kondisi permukaan tanah bergerak/mudah longsor (kawasan pada zona tanah bergerak). Lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur, Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Gunem, Sulang dan Sedan.

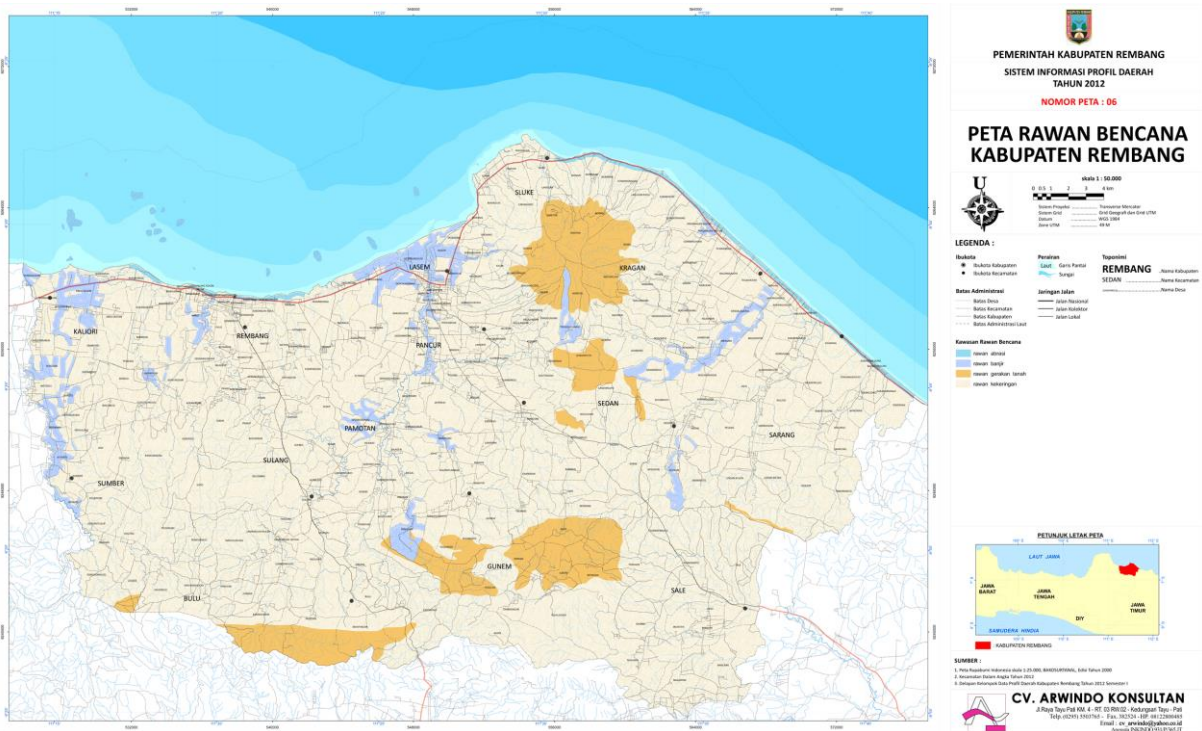
c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi

Umumnya kawasan rawan bencana gelombang pasang identik dengan kawasan abrasi. Kawasan abrasi terjadi akibat rusaknya sabuk hijau. di beberapa daerah, abrasi terjadi pada daerah yang berbentuk teluk terutama pada musim penghujan akibat pengaruh besarnya ombak, angin dan adanya arus besar. Berdasarkan hasil penelitian Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun Kabupaten Rembang menyatakan bahwa Kabupaten Rembang tergolong rawan abrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari dua variabel berpengaruh yaitu arah dan kecepatan arus, dan tekstur tanah.

Abrasi merupakan masalah utama di Kabupaten Rembang terutama di Kecamatan Sarang. Abrasi juga terjadi di Desa Jatisari, Manggis, Blimbing dan Pangkalan. Abrasi ini termasuk abrasi berat,

yang berarti : dapat menghilangkan daratan hingga beberapa meter per tahun. Abrasi ini lebih kuat pada musim barat. Abrasi pantai juga terjadi di Kecamatan Kaliori, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Pantai-pantai di daerah tersebut merupakan pantai yang tidak berkarang, sehingga rentan terhadap abrasi. Sedangkan untuk pantai yang berkarang tidak begitu rentan terhadap abrasi.

Lokasi kawasan rawan bencana gelombang pasang dan rawan abrasi di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang (yang paling parah). Ada 7 prioritas titik rawan abrasi sepanjang Kecamatan Sluke-Sarang, tetapi baru ditangani 2 titik yang mendapat penanganan di Kecamatan Sarang. Sedangkan titik baru lebih banyak lagi ditemui di desa sebelah titik-titik yang sudah mendapat penanganan di Kecamatan Sarang.



Gambar 2.3
Peta Rawan Bencana Kabupaten Rembang
 Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

2.1.4. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Rembang tahun 2015 sebanyak 619.092 jiwa, terdiri dari 313.236 jiwa (50,60%) berjenis kelamin laki-laki dan 305.856 jiwa (49,40%) berjenis kelamin perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Rembang masih terkonsentrasi di

Kecamatan Rembang yakni sebesar 14,09% (87.250 jiwa). Sementara itu wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah berada di Kecamatan Gunem sebanyak 3,83% (23.714 jiwa).

Jumlah dan rasio jenis kelamin penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1.	Sumber	18.081	49,97%	18.101	50,03%	36.182	99,89
2.	Bulu	13.692	50,48%	13.431	49,52%	27.123	101,94
3.	Gunem	12.024	50,70%	11.690	49,30%	23.714	102,86
4.	Sale	20.109	50,56%	19.663	49,44%	39.772	102,27
5.	Sarang	30.073	51,26%	28.599	48,74%	58.672	105,15
6.	Sedan	26.638	51,26%	25.329	48,74%	51.967	105,17
7.	Pamotan	24.476	51,06%	23.462	48,94%	47.938	104,32
8.	Sulang	18.530	50,36%	18.268	49,64%	36.798	101,43
9.	Kaliori	20.028	50,15%	19.905	49,85%	39.933	100,62
10.	Rembang	43.472	49,82%	43.778	50,18%	87.250	99,30
11.	Pancur	14.795	50,82%	14.318	49,18%	29.113	103,33
12.	Kragan	31.575	50,77%	30.619	49,23%	62.194	103,12
13.	Sluke	14.758	50,90%	14.234	49,10%	28.992	103,68
14.	Lasem	24.985	50,53%	24.459	49,47%	49.444	102,15
Jumlah		313.236	50,60%	305.856	49,40%	619.092	102,41
2014		307.004	49,77	309.897	50,23	616.901	99,07
2013		304.768	49,84	306.727	50,16	611.495	99,36
2012		302.582	49,93	303.423	50,07	606.005	99,72
2011		299.379	49,84	301.304	50,16	600.683	99,36

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Rembang Tahun 2016

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang tahun 2015 terbanyak pada umur 30-34 sebesar 54.266 jiwa yaitu 27.464 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 26.802 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Rembang yaitu sebesar 453.686 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 163.062 jiwa yaitu usia 0-14 sebesar 119.784 jiwa dan usia 65-75+ sebesar 45.621 jiwa. Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 46,00 artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 46 orang usia tidak produktif, dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi hampir dua kali lipat disebut dengan bonus demografi. Apabila penduduk usia produktif tersebut, memiliki ketrampilan baik (*high skill*) dan sebagian besar

terserap pasar kerja, maka merupakan modal cukup besar bagi pembangunan Kabupaten Rembang, namun apabila penduduk usia produktif tersebut kurang ketrampilan (*unskill*) dan sulit diserap pasar kerja, maka akan membebani pemerintah Kabupaten Rembang, karena harus mencarikan tempat kerja, membuka peluang usaha dan kerja yang sesuai dengan kemampuan penduduk.

Gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Rembang Tahun 2015

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	19.583	18.053	37.636
5-9	21.327	19.236	40.563
10-14	21.640	19.945	41.585
15-19	23.212	21.677	44.889
20-24	26.451	25.346	51.797
25-29	25.828	25.408	51.236
30-34	27.464	26.802	54.266
35-39	27.160	26.500	53.660
40-44	24.214	24.063	48.277
45-49	22.450	22.980	45.430
50-54	20.780	21.174	41.954
55-59	18.408	18.521	36.929
60-64	13.676	11.572	25.248
65-69	8.271	8.373	16.644
70-74	5.365	5.985	11.350
75+	7.406	10.221	17.627
Jumlah	313.235	305.856	619.091
2014	307.004	309.897	616.901
2013	304.768	306.727	611.495
2012	302.582	303.423	606.005
2011	299.379	301.304	600.683

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Rembang Tahun 2016

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang menurut kecamatan pada tahun 2015 adalah 610 jiwa/Km², wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Rembang dengan angka sebesar 1.484 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi selanjutnya yaitu di Kecamatan Lasem yang sebesar 1.098 jiwa/Km². Sedangkan angka kepadatan terendah di Kabupaten Rembang yaitu di Kecamatan Bulu yang sebesar 265 jiwa/Km². Dalam kurun waktu Tahun 2011-2015, kepadatan di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Rembang Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah km ²	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Sumber	7.673	36.182	471
2.	Bulu	10.240	27.123	265
3.	Gunem	8.020	23.714	296
4.	Sale	10.714	39.772	371
5.	Sarang	9.133	58.672	642
6.	Sedan	7.964	51.967	652
7.	Pamotan	8.156	47.938	588
8.	Sulang	8.454	36.798	435
9.	Kaliori	6.150	39.933	649
10.	Rembang	5.881	87.250	1.484
11.	Pancur	4.594	29.113	634
12.	Kragan	6.166	62.194	1.009
13.	Sluke	3.759	28.992	771
14.	Lasem	4.504	49.444	1.098
	JUMLAH	101.408	619.092	610
	2014	101.408	616.901	608
	2013	101.408	611.495	603
	2012	101.408	606.005	598
	2011	101.408	600.683	592

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Rembang Tahun 2016

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu dan merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Penghitungan nilai PDRB dapat dibedakan atas harga berlaku (nilai nominal) dan harga konstan (nilai riil) dengan melihat nilai tambah pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Mulai tahun 2014 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010. Pada tahun 2014 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Rembang mencapai 12,807 trilyun rupiah, naik 12,00 % dari tahun sebelumnya. Struktur perekonomian di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB kabupaten. Pada tahun

2014 lapangan usaha pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rembang yaitu sebesar 30,23%, disusul lapangan usaha industri pengolahan sebesar 20,80%. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,03%. lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 0,05 %. Nilai PDRB dan kontribusi menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 bisa dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.
Nilai PDRB dan Kontribusi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Rembang Tahun
2011-2014 (juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	3.148.726,00	33,67	3.432.765,00	33,25	3.819.980,00	33,40	3.871.904,00	30,23
B.	Pertambangan dan Penggalian	279.879,00	2,99	297.736,00	2,88	328.421,00	2,87	392.183,00	3,06
C.	Industri Pengolahan	1.654.335,00	17,69	1.908.314,00	18,49	2.153.538,00	18,83	2.664.249,00	20,80
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7.226,00	0,08	7.797,00	0,08	8.419,00	0,07	8.995,00	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.506,00	0,06	5.508,00	0,05	5.623,00	0,05	5.900,00	0,05
F.	Konstruksi	703.299,00	7,52	781.658,00	7,57	773.793,00	6,77	954.913,00	7,46
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.360.279,00	14,54	1.415.693,00	13,71	1.537.606,00	13,45	1.668.565,00	13,03
H.	Transportasi dan Pergudangan	319.445,00	3,42	341.295,00	3,31	381.769,00	3,34	449.554,00	3,51
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281.418,00	3,01	299.842,00	2,90	330.004,00	2,89	389.523,00	3,04
J.	Informasi dan Komunikasi	104.012,00	1,11	111.095,00	1,08	118.564,00	1,04	133.435,00	1,04
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	373.268,00	3,99	426.061,00	4,13	480.380,00	4,20	544.191,00	4,25
L.	Real Estate	91.787,00	0,98	95.965,00	0,93	101.595,00	0,89	109.538,00	0,86
M,N	Jasa Perusahaan	22.721,00	0,24	24.735,00	0,24	30.029,00	0,26	33.202,00	0,26
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	385.121,00	4,12	429.672,00	4,16	456.119,00	3,99	492.728,00	3,85
P.	Jasa Pendidikan	347.441,00	3,17	453.337,00	4,39	581.266,00	5,08	697.294,00	5,44
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90.950,00	0,97	109.162,00	1,06	124.398,00	1,09	153.000,00	1,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	177.378,00	1,90	182.740,00	1,77	203.953,00	1,78	238.006,00	1,86
PDRB ADHB		9.352.791,00	100,00	10.323.374,00	100,00	11.435.457,00	100,00	12.807.181,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha 2010- 2014 (series), BPS Kabupaten Rembang, 2015

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Rembang dalam kurun waktu empat tahun (2011-2014) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nilai kontribusi PDRB ADHK tahun 2010 pada tahun 2011 sebesar Rp.8.808.303,000.000,- mengalami kenaikan menjadi Rp. 10.282.184.000.000,- pada tahun 2014. Nilai kontribusi PDRB ADHK tahun 2010 pada tahun 2014 yang tertinggi berasal dari sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,10%, Industri Pengolahan sebesar 20,84%, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,68%. Sedangkan nilai kontribusi terendah berada di sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 0,05% dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09%. Nilai PDRB dan kontribusi menurut lapangan usaha ADHK tahun 2010 Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6.
Nilai PDRB dan Kontribusi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2014 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
A.	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	2.939.405,00	33,37	3.042.784,00	32,80	3.171.162,00	32,43	2.992.145,00	29,10
B.	Pertambangan dan Penggalian	265.176,00	3,01	276.356,00	2,98	291.766,00	2,98	310.768,00	3,02
C.	Industri Pengolahan	1.525.025,00	17,31	1.693.227,00	18,25	1.863.046,00	19,05	2.143.284,00	20,84
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7.120,00	0,08	7.925,00	0,09	8.734,00	0,09	9.202,00	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.457,00	0,06	5.449,00	0,06	5.438,00	0,06	5.546,00	0,05
F.	Konstruksi	667.530,00	7,58	708.583,00	7,64	677.378,00	6,93	776.630,00	7,55
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.299.711,00	14,76	1.310.768,00	14,13	1.351.958,00	13,83	1.406.725,00	13,68
H.	Transportasi dan Pergudangan	318.345,00	3,61	339.534,00	3,66	375.321,00	3,84	414.922,00	4,04
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	270.421,00	3,07	284.037,00	3,06	302.419,00	3,09	336.232,00	3,27
J.	Informasi dan Komunikasi	102.700,00	1,17	112.697,00	1,21	124.070,00	1,27	145.366,00	1,41
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	348.945,00	3,96	362.871,00	3,91	383.295,00	3,92	407.252,00	3,96
L.	Real Estate	91.186,00	1,04	94.743,00	1,02	99.192,00	1,01	105.521,00	1,03
M,N	Jasa Perusahaan	21.336,00	0,24	22.547,00	0,24	26.308,00	0,27	28.189,00	0,27
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	376.447,00	4,27	380.889,00	4,11	384.053,00	3,93	386.622,00	3,76

No	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014	
		(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%	(Rp) / Juta	%
	dan Jaminan Sosial Wajib								
P.	Jasa Pendidikan	313.253,00	3,56	365.529,00	3,94	423.906,00	4,33	486.880,00	4,74
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84.275,00	0,96	94.361,00	1,02	102.304,00	1,05	120.619,00	1,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	171.970,00	1,95	174.863,00	1,88	188.600,00	1,93	206.282,00	2,01
PDRB ADHK		8.808.303,00	100,00	9.277.163,00	100,00	9.778.950,00	100,00	10.282.184,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha 2010–2014 (series), BPS Kabupaten Rembang, 2015

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2015 (angka sementara) mencapai 5,49%, yang ditunjukkan melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2015 relatif stabil dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi tahun 2014 terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu tumbuh 17,90%, kemudian lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh 17,16%, dan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 15,04%. Lebih jelasnya perkembangan pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Rembang selama 2011-2014 terdapat pada tabel 2.7 berikut:

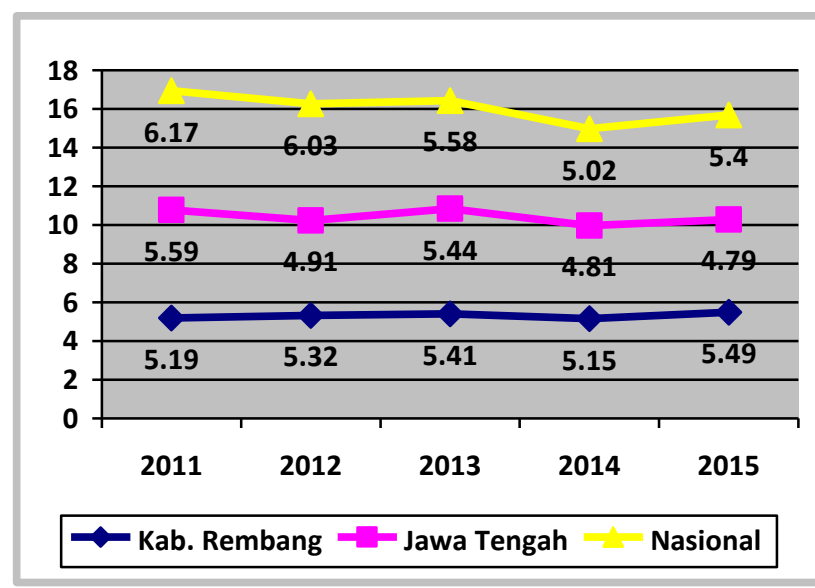
Tabel 2.7.
Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2014 (%)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,34	3,52	4,22	-5,65
B.	Pertambangan dan penggalian	-2,82	4,22	5,58	6,51
C.	Industri pengolahan	4,67	11,03	10,03	15,04
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	13,52	11,31	10,21	5,36
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,15	-0,15	-0,20	1,99
F.	Konstruksi	6,59	6,15	-4,40	14,65
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Rerparasi Mobil dan sepeda Motor	6,32	0,85	3,14	4,05
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,44	6,66	10,54	10,55
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,31	5,04	6,47	11,18
J.	Informasi dan Komunikasi	11,68	9,73	10,09	17,16
K.	Jasa Keuangan dan asuransi	4,58	3,99	5,63	6,25
L.	Real Estate	6,56	3,90	4,70	6,38
M,N	Jasa Perusahaan	10,35	5,68	16,68	7,15
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,35	1,18	0,83	0,67
P.	Jasa Pendidikan	18,40	16,69	15,97	14,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,53	11,97	8,42	17,90
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,48	1,68	7,86	9,38
	PDRB	5,19	5,32	5,41	5,15

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2015

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang secara riil tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2011-2014 relatif stabil namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 5,19% dan pada tahun 2015 naik menjadi 5,49%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2015 berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional (4,79%) maupun Jawa Tengah (5,40%). Grafik Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4
Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 (%)

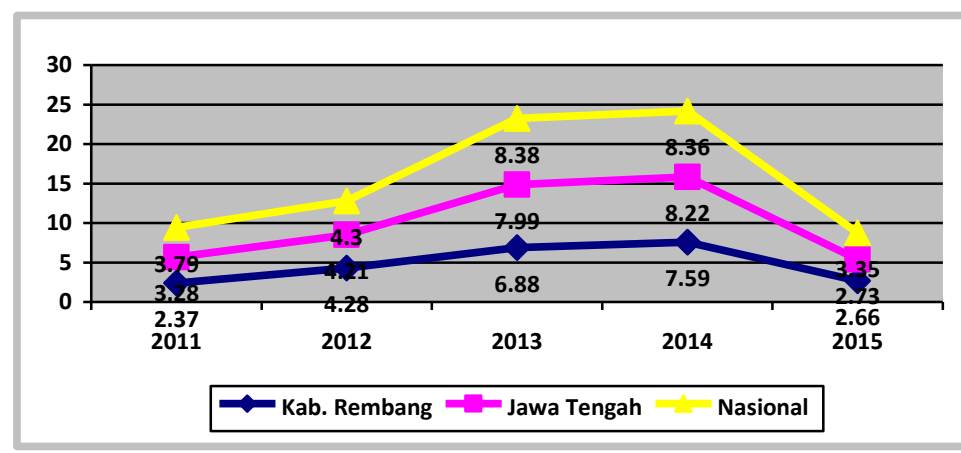
Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2016

b. Laju Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika

tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan angka inflasi di Kabupaten Rembang tergolong rendah karena berada pada angka di bawah dua digit. Selama empat tahun terakhir (2011-2014) perkembangan angka inflasi Kabupaten Rembang mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2011 di Kabupaten Rembang hanya 2,73 %, ditahun 2012 sampai 2014 inflasi mengalami kenaikan berturut-turut adalah 4,28%, 6,88% dan 7,59%. Inflasi Kabupaten Rembang mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 yang lalu sebesar 2,66% lebih rendah dibanding inflasi Nasional sebesar 3,35% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,73%. Grafik Perbandingan Laju inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut ini.



Gambar 2.5

Grafik Perbandingan Laju Inflasi (%) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

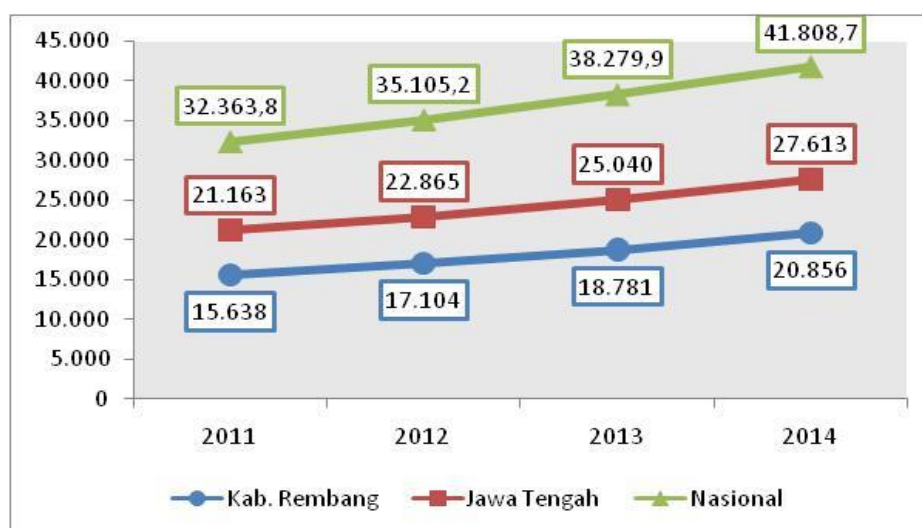
Sumber: Kabupaten Rembang Dalam Angka Tahun 2016

c. PDRB Per Kapita

PDRB merupakan jumlah keseluruhan produk yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi pada satu wilayah tanpa memperhatikan status kepemilikan faktor produksi apakah dimiliki oleh warga setempat atau warga daerah lain. PDRB perkapita dapat menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, meskipun belum dapat

mencerminkan tingkat pemerataannya. Selama tahun 2011-2015 perkembangan PDRB per kapita ADHB maupun ADHK tahun 2010 selalu meningkat. PDRB per kapita Rembang (ADHK) tahun 2014 sebesar Rp.20.856.000,00 dan pada Tahun 2015 meningkat lagi mencapai Rp.22.326.000,00, yang berarti naik 47 persen dari tahun 2011 yang hanya Rp.15.638.000,00.

Di bandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Rembang masih berada di bawah garis nasional maupun Jawa Tengah. Grafik Perbandingan Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014 (000 Rupiah) bisa dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini:



Gambar 2.6

Grafik Perbandingan Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014 (000 Rupiah)

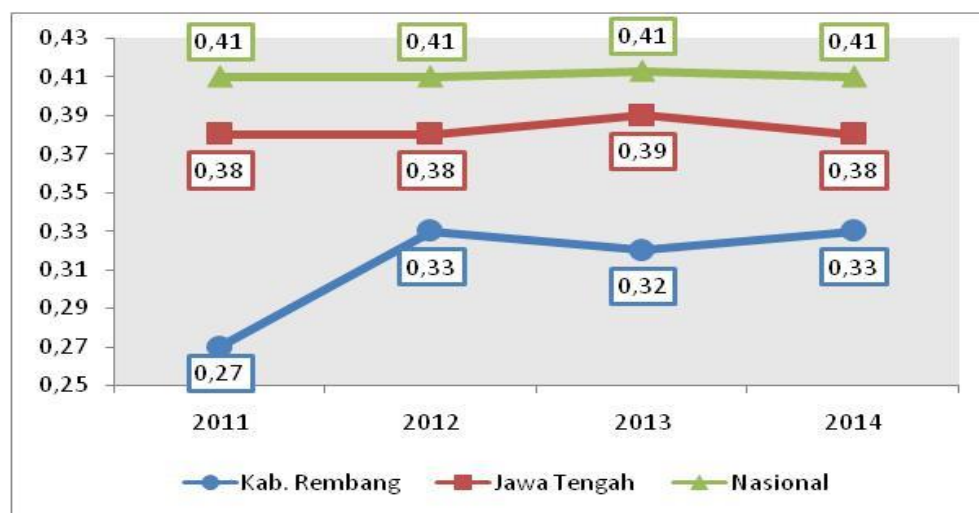
Sumber: BPS Kabupaten Rembang, Tahun 2015

d. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan antar kelompok masyarakat. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar

penduduk. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Indeks gini Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sebesar 0,33 berada pada kategori ketimpangan sedang. Dalam kurun waktu tahun 2011-2012 terjadi peningkatan indeks gini di Kabupaten Rembang, dari sebesar 0,27 pada tahun 2011 menjadi 0,33 pada tahun 2012. Akan tetapi, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,01 yaitu pada nilai 0,32. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kelompok pendapatan semakin tinggi, sehingga perlu didorong dengan pemerataan pembangunan agar dampaknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pembangunan perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor usaha yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Grafik Perbandingan perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2011-2014 dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut:



Gambar 2.7

Grafik Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2011-2014

Sumber: Analisis Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Indeks Gini di Kabupaten Rembang selama tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa tren ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang berada dalam kategori ketimpangan sedang atau dengan kata lain distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang belum merata. Walaupun semua rumah tangga baik miskin maupun kaya

mengalami kenaikan kesejahteraan, terdapat kecenderungan dimana golongan bawah (40% terendah), konsumsinya mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas (60% teratas), yaitu golongan menengah dan golongan kaya.

Dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan antar warga masyarakat, mengurangi ketimpangan atau meredam tren kenaikan ketimpangan di Kabupaten Rembang tidak bisa diterjemahkan kedalam pengendalian (*control* atau *targeting*) dari ketimpangan dalam *outcome* (seperti pendapatan atau konsumsi), tetapi fokus pada mengurangi ketimpangan dalam *opportunity* karena akan cenderung mengabaikan *effort*, *hardwork*, dan *talent* dari individu.

Fokus pemerintah dimasa mendatang adalah meningkatkan *equality of opportunity* dan redistribusi sistem perpajakan yang progresif, dimana tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik sejalan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dengan tujuan agar penerimaan pajak semakin besar untuk dapat dipergunakan untuk melindungi mereka yang kurang beruntung. Sedangkan meningkatkan *equality of opportunity* dilakukan agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui *equality of opportunity* dalam pendidikan semua jenjang, serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah dengan memastikan anggaran pemerintah dialokasikan lebih optimum selain untuk mengurangi kemiskinan juga memastikan *equality of opportunity* di sektor-sektor yang terkait peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) agar semua warga negara, tak terkecuali, tanpa terhalangi oleh status sosial ekonomi, dapat memperoleh *opportunity* yang sama dalam memperoleh pendidikan (semua jenjang) dan pelayanan kesehatan.

e. Penduduk Miskin Berdasarkan Data Makro

Data kemiskinan dikelompokkan menjadi 2 jenis data, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survey (sampel), bersifat kualitatif, memberikan gambaran umum dan profil suatu daerah, ditujukan sebagai dasar pengambilan kebijakan makro, dan tidak dapat menampilkan data orang miskin secara *by name by address*; Data

kemiskinan makro berupa persentase dan perhitungan jumlah penduduk miskin suatu daerah yang di-rilis oleh BPS setiap tahun dalam Berita Resmi Statistik (BRS). Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai referensi intervensi program/kegiatan yang tersedia secara *by name by address*; Contoh data mikro adalah data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang kemudian diperbaharui melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, data mikro dilakukan pendataan secara periodik setiap 3 tahun sekali oleh BPS.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2011-2014 berdasarkan data makro menunjukkan tren menurun. Meskipun garis kemiskinan setiap tahun terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui intervensi program peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan program penurunan beban pengeluaran penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Rembang pada tahun 2011 sebanyak 140.400 jiwa (23,71%) dengan garis kemiskinan Rp. 240.859,- menurun menjadi 199.988 jiwa atau sebesar 19,50% pada tahun 2014, dengan garis kemiskinan Rp. 299.503,-.

Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

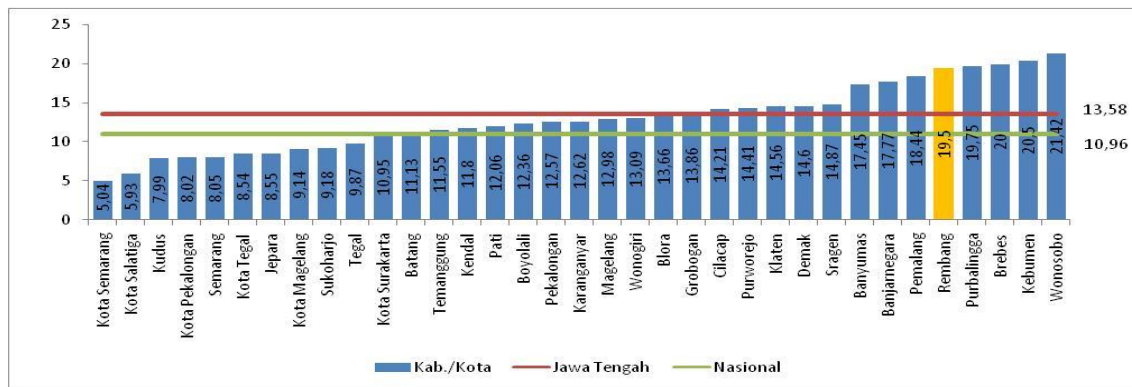
Tabel 2.8.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp)
2011	140.400	23,71	240.859
2012	129.900	21,88	266.303
2013	128.000	20,97	284.160
2014	199.988	19,50	299.503

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2015

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 relatif tinggi (19,50%) apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten sekitar, termasuk apabila dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional (10,96%) dan Provinsi Jawa Tengah (13,58%). Penyebab terbesar masih tingginya persentase penduduk miskin ini antara lain adalah besarnya beban pengeluaran masyarakat

miskin khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan inflasi serta keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah kabupaten dalam melaksanakan intervensi penyebab kemiskinan. Adapun Grafik posisi relatif tingkat penduduk miskin Kabupaten Rembang dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut:



Gambar 2.8
Grafik Posisi Relatif Tingkat Penduduk Miskin Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (%)

Sumber: TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2011-2014 menunjukkan penurunan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2011 sebesar 23,71% menurun menjadi 19,50% pada tahun 2014. Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang Dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut ini.



Gambar 2.9
Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang tahun 2014 sebesar 2,90% lebih tinggi dibandingkan Indeks P1 Provinsi Jawa Tengah (2,09%) dan Nasional (1,75%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang masih jauh di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sebesar Rp 299.503/kapita/bulan. Pada Gambar 2.5 ditampilkan perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada kurun waktu 2011-2014.

Tren penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang ini memperlihatkan bahwa program kegiatan penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang yaitu semakin kecilnya kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Namun demikian pada tahun 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,64 dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 3,40. Pada tahun selanjutnya (tahun 2014) indeks kemiskinan kembali mengalami penurunan sebesar 0,41% menjadi 2,90%.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2011-2014 berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, oleh karena itu program/kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin serta pengurangan beban pengeluaran penduduk/rumah tangga miskin sekaligus mengurangi besarnya kesenjangan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rembang dapat diturunkan.

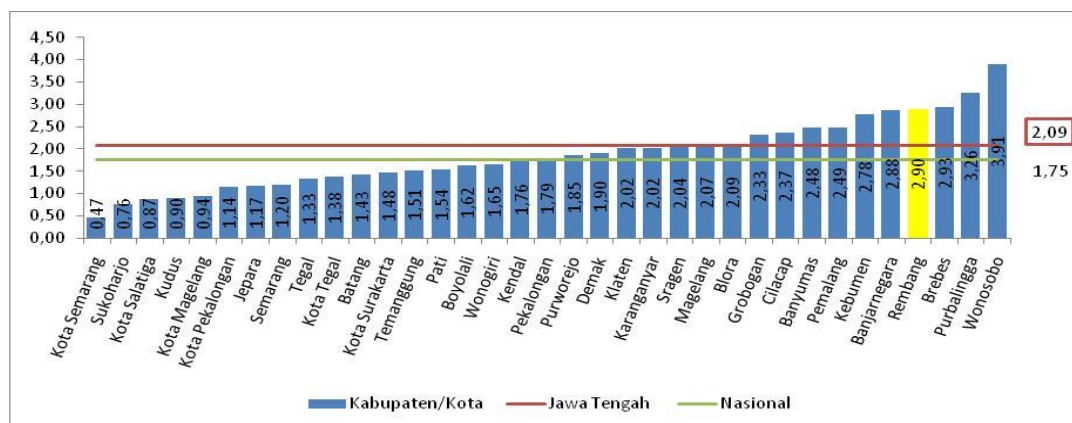
Grafik Perbandingan Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang Dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011–2014 dapat dilihat pada Gambar 2.10 berikut:



Gambar 2.10
Grafik Perbandingan Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang Dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011–2014 (%)

Sumber: Analisis Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Rembang dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah menunjukkan urutan ke-4 dari bawah setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Wonosobo. Grafik Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut:



Gambar 2.11
Grafik Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2014

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk miskin di antara penduduk miskin diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index- P2*), yaitu indeks yang memberikan

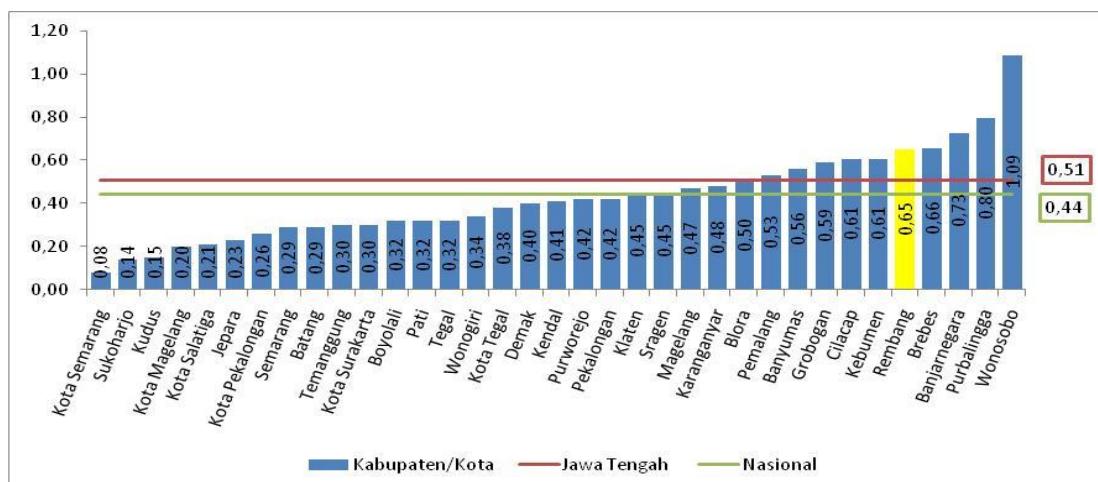
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama kurun waktu 2011-2014 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 0,58 pada tahun 2011 menjadi 0,65 pada tahun 2014. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 0,88 yang menunjukkan pada tahun tersebut ada pergeseran kenaikan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin di Kabupaten Rembang walaupun kondisinya relatif kecil. Grafik Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional, Tahun 2011–2014 dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut:



Gambar 2.12
Grafik Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011–2014

Sumber: Analisis Kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2014

Grafik Posisi Relatif Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut:



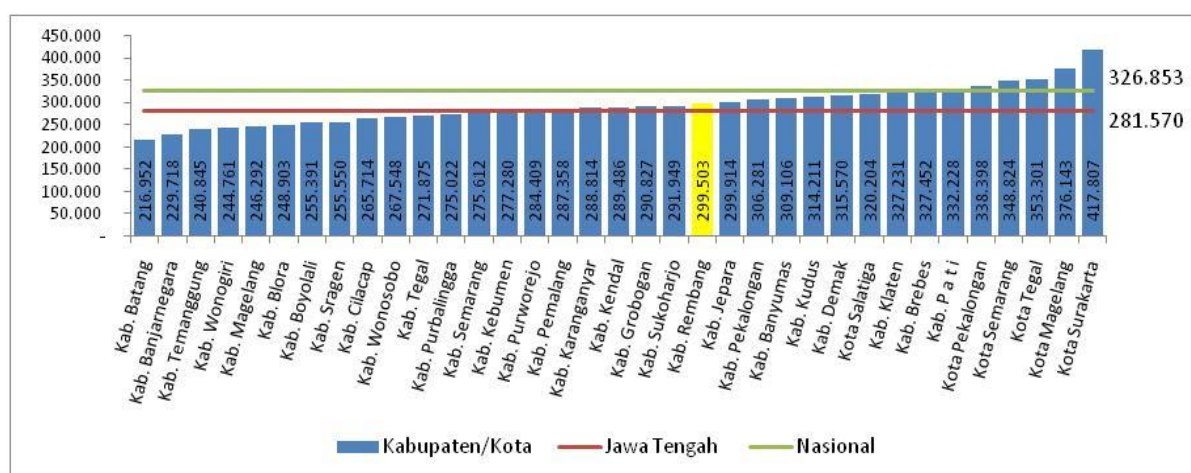
Gambar 2.13
Grafik Posisi Relatif Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2014

Dengan melihat tren penurunan pada Grafik P1 dan P2 di atas, masih perlu perhatian karena kondisi P1 dan P2 dalam empat tahun terakhir menunjukkan kinerja yang fluktuatif sehingga akan berpengaruh besar terhadap kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membahas kemiskinan adalah Garis Kemiskinan atau sering disingkat GK. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Garis Kemiskinan (GK) adalah nilai rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan esensial. Garis Kemiskinan tersebut merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Garis kemiskinan Kabupaten Rembang pada tahun 2014 sebesar Rp.299.503,00 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, garis kemiskinan Kabupaten Rembang jauh lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar Rp.281.570,00 pada tahun 2014. Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Rembang dengan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 2.14 bawah ini:



Gambar 2.14

Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Rembang dengan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Pada grafik di atas menunjukkan garis kemiskinan tertinggi adalah Kota Surakarta sebesar Rp. 417.807,00 per kapita per bulan. Kabupaten Rembang berada di posisi tertinggi ke-9 Kondisi garis kemiskinan terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Batang sebesar Rp.216.952.

f. Penduduk Kesejahteraan Terendah

Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Hingga saat ini BDT telah digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah, di antaranya: *Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)*, *Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP)*, *Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Program Indonesia Sehat (PIS)*, *Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)*, *Program Keluarga Harapan (PKH)* serta beberapa program lainnya. Selengkapanya data jumlah rumah tangga miskin berdasarkan tingkat kesejahteraan terbawah di Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9.
Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Terbawah di Kabupaten Rembang Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	TOTAL
1	BULU	1449	1213	1082	826	4570
2	GUNEM	1273	942	827	623	3665
3	KALIORI	1534	1484	1666	1722	6406
4	KRAGAN	3428	2186	1891	2068	9573
5	LASEM	2057	1360	1169	1183	5769
6	PAMOTAN	3291	2014	1674	1406	8385
7	PANCUR	2221	1295	977	793	5286
8	REMBANG	1837	1848	2065	2355	8105
9	SALE	1632	1135	1071	734	4572
10	SARANG	2677	2123	2278	2033	9111
11	SEDAN	3850	2310	1754	1172	9086
12	SLUKE	1634	1060	889	871	4454
13	SULANG	1735	1504	1417	1132	5788
14	SUMBER	2010	1662	1495	1242	6409
GRAND TOTAL		30628	22136	20255	18160	91179

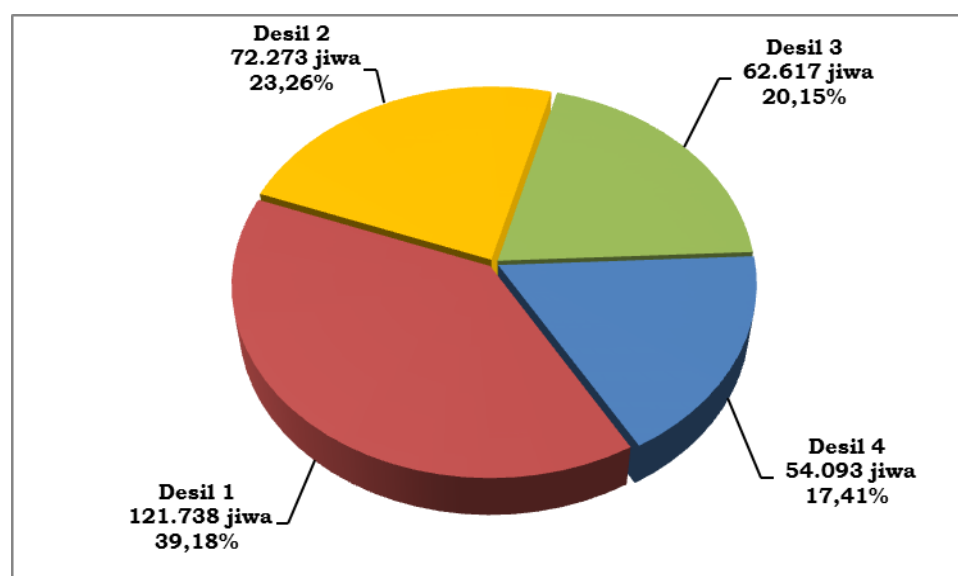
Sumber: PBDT Tahun 2015

Kemiskinan dari data mikro pada hakekatnya melihat kondisi penduduk dari tingkatan kesejahteraan terendah sebagaimana hasil pendataan BPS yang dikompilasikan dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Basis Data Terpadu tersebut merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi rumah tangga atau individu dengan status kesejahteraan terendah. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah hasil kegiatan updating data Pendataan Program Perlindungan Sosial oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011 (atau biasa disebut dengan PPLS 2011), yang dilakukan pemutakhiran pada tahun 2015, dan diolah lebih lanjut oleh TNP2K untuk diurutkan menurut peringkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya.

Data hasil pemutakhiran BDT 2015 di Jawa Tengah telah diserahkan oleh Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Gubernur Jawa Tengah dan dilanjutkan penyerahan Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati/Walikota se Jawa Tengah pada tanggal 6 Juni 2016, termasuk kepada Bupati Rembang. Data dimaksud berupa *data base* berisi data *by name by address* penduduk pada tingkat kesejahteraan 0-10% terendah (desil 1), 11-20% terendah (desil 2), 21-30% terendah (desil 3) dan 31-40% terendah (desil 4).

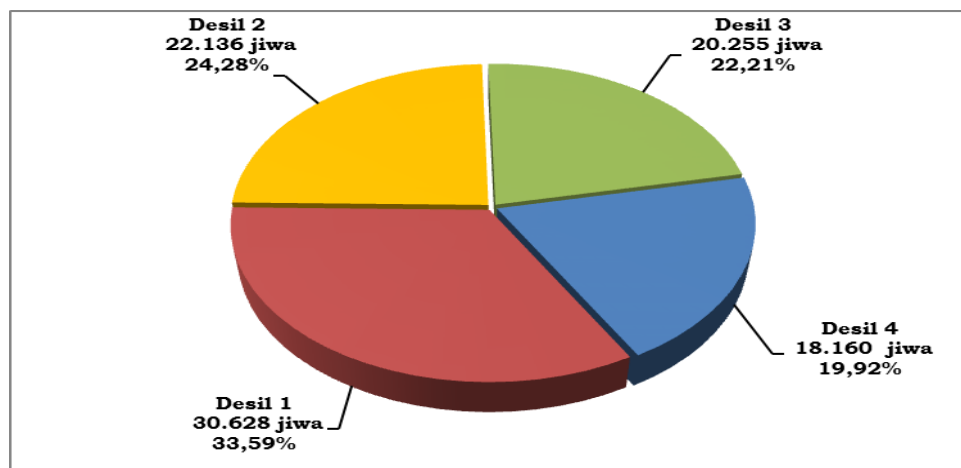
Berdasarkan BDT 2015, di Kabupaten Rembang terdapat 310.721 jiwa atau 91.179 rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah dengan distribusi terbesar pada desil 1, yaitu individu sebesar 39,18% dan rumah tangga sebesar 33,59%, secara rinci Grafik komposisi penduduk dengan status kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Rembang tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut:



Gambar 2.15
Grafik Komposisi Penduduk dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: TNP2K, BDT 2015, diolah

Grafik Komposisi Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut:

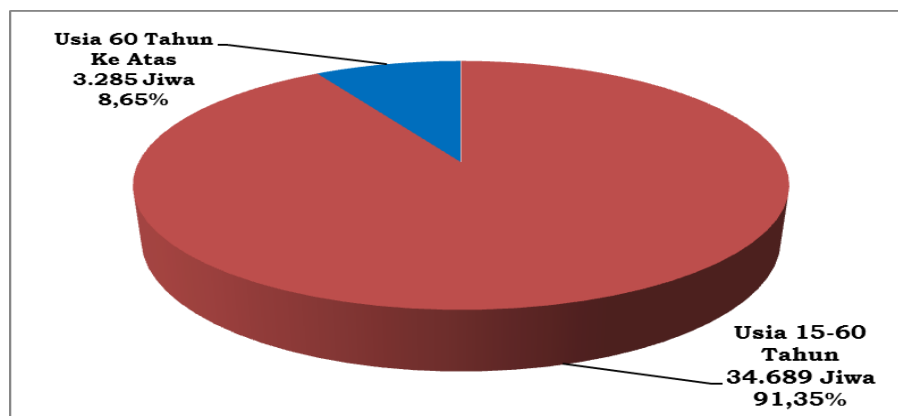


Gambar 2.16

Grafik Komposisi Rumah Tangga dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: TNP2K, BDT 2015, diolah

Pada penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas terdapat 37.974 jiwa tidak bekerja, dengan komposisi terbesar pada kelompok usia 15-60 tahun (91,35%), secara rinci Grafik Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Tidak Bekerja dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.17 berikut ini.



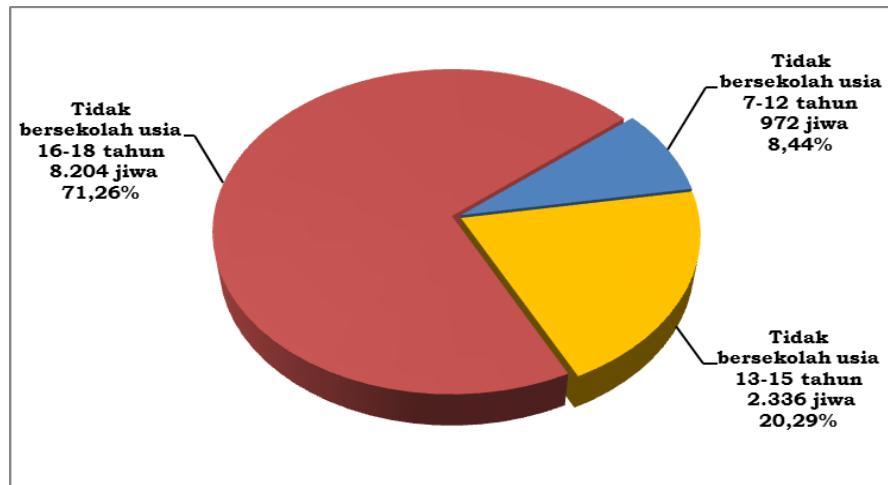
Gambar 2.17

Grafik Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Tidak Bekerja dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: TNP2K, BDT 2015, diolah

Sedangkan pada bidang pendidikan terdapat penduduk tidak bersekolah pada usia sekolah 7-18 tahun sebanyak 11.512 jiwa, dengan komposisi terbesar pada kelompok usia 16-18 tahun (71,26%). Grafik

Komposisi Penduduk Usia 7-18 Tahun Tidak Bersekolah dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.18 berikut:

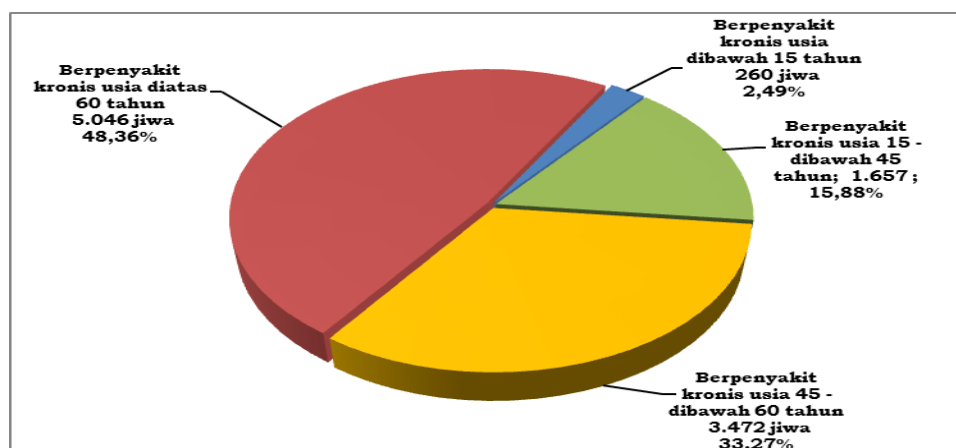


Gambar 2.18

Grafik Komposisi Penduduk Usia 7-18 Tahun Tidak Bersekolah dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: TNP2K, BDT 2015, diolah

Dilihat dari kondisi kesehatan, penduduk yang berpenyakit kronis sebanyak 10.435 jiwa dengan distribusi terbesar pada kelompok usia di atas 60 tahun (48,36%). Sedangkan penyandang cacat sebanyak 5.045 jiwa dengan distribusi terbesar pada kelompok usia 15 sampai dengan dibawah 45 tahun (38,06%), secara rinci Grafik Komposisi Penduduk Berpenyakit Kronis dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.19 di bawah ini:

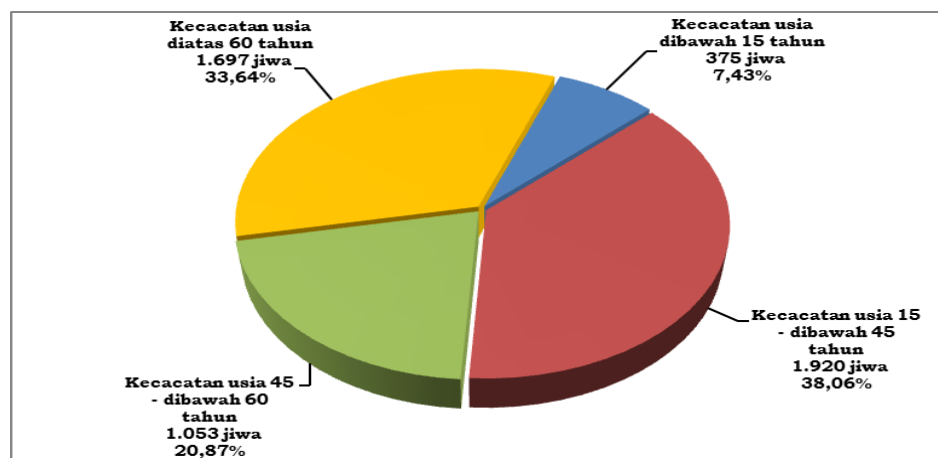


Gambar 2.19

Grafik Komposisi Penduduk Berpenyakit Kronis dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: TNP2K, BDT 2015, diolah

Grafik Komposisi Penyandang Cacat dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.20 berikut:



Gambar 2.20

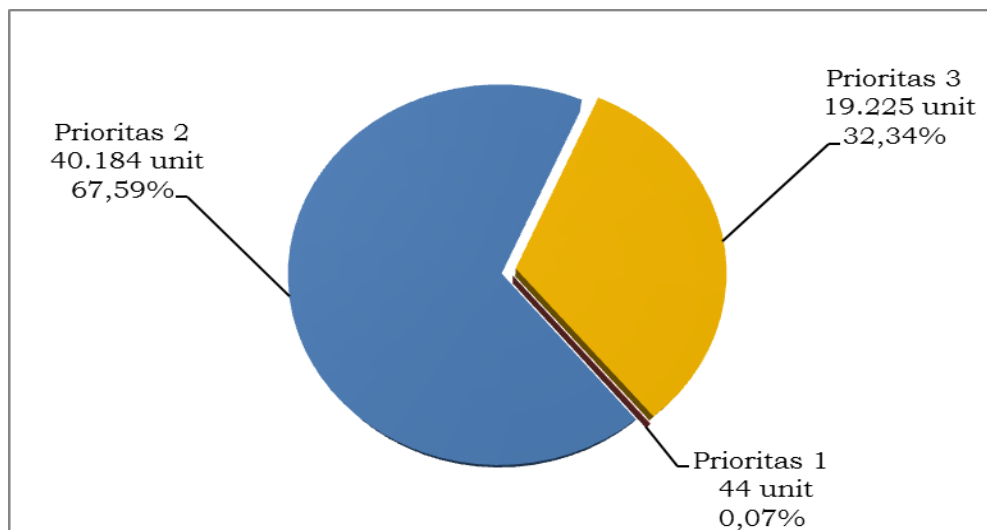
Grafik Komposisi Penyandang Cacat dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: TNP2K, BDT 2015, diolah

Selain itu, pada sektor infrastruktur dasar di Kabupaten Rembang terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 59.453 unit, rumah tidak berlistrik sebanyak 42 unit, rumah berlistrik tanpa meteran sebanyak 15.099 unit dan rumah tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban) sebanyak 21.638 unit. RTLH di Kabupaten Rembang berdasarkan PBDT 2015 dengan jumlah 59.453 unit terbagi menjadi 3 kelompok prioritas, yaitu:

- Prioritas 1, yaitu rumah tangga dengan kondisi rumah dilihat dari 3 komponen (atap, lantai dan dinding/aladin), tiga dari ketiga komponen tidak layak. Kondisi prioritas 1 terdapat sebesar 0,07% atau 44 unit.
- Prioritas 2, yaitu rumah tangga dengan kondisi rumah dilihat dari 3 komponen (atap, lantai dan dinding/aladin), dua dari ketiga komponen tidak layak. Kondisi prioritas 2 terdapat sebesar 67,59% atau 40.184 unit.
- Prioritas 3, yaitu rumah tangga dengan kondisi rumah dilihat dari 3 komponen (atap, lantai dan dinding/aladin), satu dari ketiga komponen tidak layak. Kondisi prioritas 3 terdapat sebesar 32,34% atau 19.225 unit.

Secara rinci Grafik Komposisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.21 di bawah ini:



Gambar 2.21
Grafik Komposisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan
Status Kesejahteraan 40% Terendah
Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: TNP2K, BDT 2015, diolah

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan secara lebih luas di luar perhitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah itu telah mencapai sasaran komponen-komponen kesejahteraan masyarakat yang ditentukan meliputi usia harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk diukur secara agregatif melalui rata-rata geometrik dari komponen-komponen pembentuknya yang meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH), rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Rembang tercermin pada angka IPM tahun 2015 mencapai angka 68,18. Pencapaian angka IPM tersebut lebih tinggi bila

dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,40. Dengan pencapaian IPM tersebut, maka Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia “sedang” menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan angka pencapaian IPM pada kisaran 60,0 sampai 70,9.

Perkembangan IPM Kabupaten Rembang dalam lima tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun peningkatannya relatif kecil. Jika dibanding dengan daerah di sekitar Rembang, pencapaian angka IPM Kabupaten Rembang lebih tinggi dibanding Kabupaten Blora (66,22) dan Kabupaten Grobogan (68,05). Akan tetapi, IPM Kabupaten Rembang masih lebih rendah dibanding pencapaian Kabupaten Pati (68,51) dan Kabupaten Kudus (72,72). Perbandingan perkembangan IPM Kabupaten Rembang dengan Kabupaten sekitar, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2011-2015 bisa dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10.
Perbandingan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang, Kabupaten Sekitar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015

Kabupaten	2011	2012	2013	2014	2015
Rembang	65,36	66,03	66,84	67,40	68,18
Blora	63,88	64,70	65,37	65,84	66,22
Pati	65,71	66,13	66,47	66,99	68,51
Grobogan	65,41	66,39	67,43	67,77	68,05
Kudus	69,89	70,57	71,58	72,00	72,72
JAWA TENGAH	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
NASIONAL	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2016

Selama kurun waktu tahun 2011-2015, ketiga aspek pembentuk IPM Kabupaten Rembang mengalami peningkatan menuju kondisi yang diharapkan. Namun demikian pembangunan di bidang pendidikan yang direpresentasikan oleh komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih belum mencapai keadaan idealnya. Untuk kedepannya, pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan program-program yang berkaitan dengan bidang pendidikan terutama berkaitan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selengkapannya perkembangan aspek pembentuk Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11.
Perkembangan Aspek Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang Tahun 2011– 2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,03	74,09	74,16	74,19	74,22
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,81	11,02	11,24	11,46	12,02
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,28	6,41	6,70	6,90	6,92
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (Rp 000)	8.705	8.882	8.994	9.013	9.122
	IPM	65,36	66,03	66,84	67,40	68,18

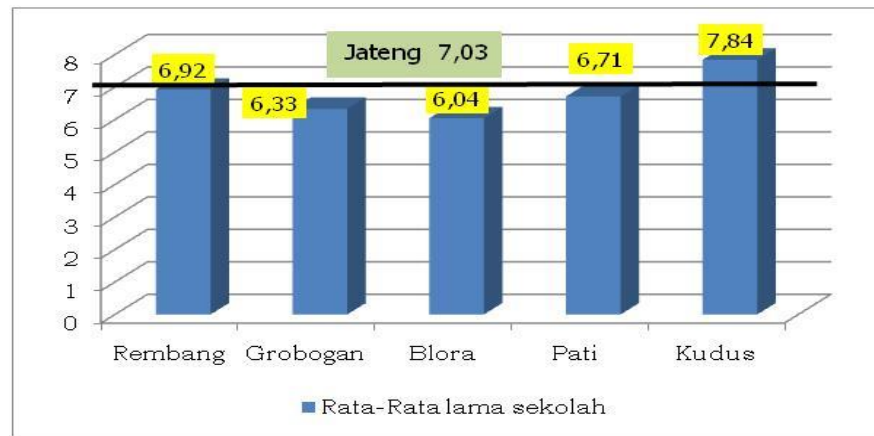
Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2016

b. Pendidikan

1) Rata-rata Lama Sekolah

SDM yang berkualitas merupakan aset paling penting bagi pembangunan. SDM berkualitas dapat terbentuk apabila setiap warga dapat memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik dan bermutu. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan sebagai indikator kualitas SDM dari perspektif jenjang kelulusan tertinggi yang dapat dicapai oleh penduduk suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan kondisi tingkat partisipasi pendidikan penduduk suatu daerah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2011 sebesar 6,28 tahun menjadi 6,92 tahun pada tahun 2015. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Rembang baru dapat menyelesaikan sekolah rata-rata tamat SD. Hal ini kemungkinan besar dilatar belakangi kondisi pendidikan yang belum dinikmati secara merata. Pada tahun 2015 RLS Kabupaten Rembang di bawah RLS Jawa Tengah yang sebesar 7,03 tahun.

Grafik Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota Sekitar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 2.22 berikut:



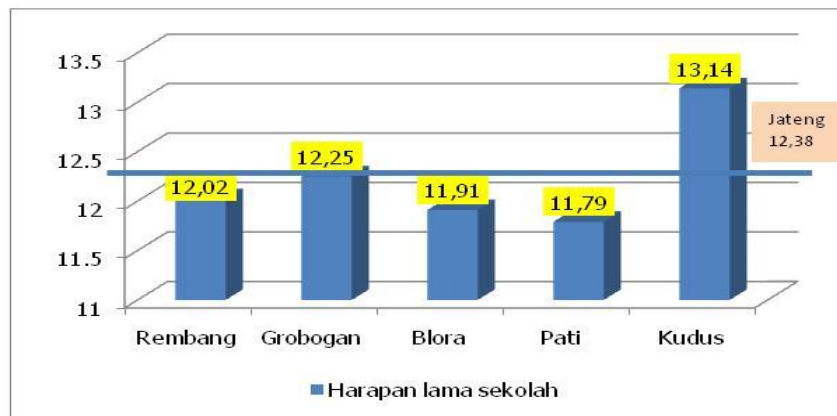
Gambar 2.22

Grafik Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota Sekitar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2015

2) Harapan Lama Sekolah

Angka HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang. HLS dapat dipergunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada tahun 2015, HLS di Kabupaten Rembang sebesar 12,02 tahun, atau dengan kata lain penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Rembang mempunyai harapan dapat bersekolah sampai dengan 12,02 tahun atau setara SMA kelas XII. Sedangkan HLS Jawa Tengah pada 2015 adalah sebesar 12,38 tahun atau selisih 5,83 tahun dari HLS maksimal. Dalam lima tahun terakhir, HLS Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, HLS Kabupaten Rembang sebesar 10,81 tahun kemudian menjadi 11,02 tahun pada 2012, pada tahun 2014 menjadi 11,46 tahun dan pada tahun 2015 menjadi 12,02 tahun. Meskipun demikian, Angka HLS Kabupaten Rembang tersebut masih berada di bawah HLS Jawa Tengah. Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah Tahun 2015 (Tahun) dapat dilihat dari gambar 2.23 berikut:



Gambar 2.23

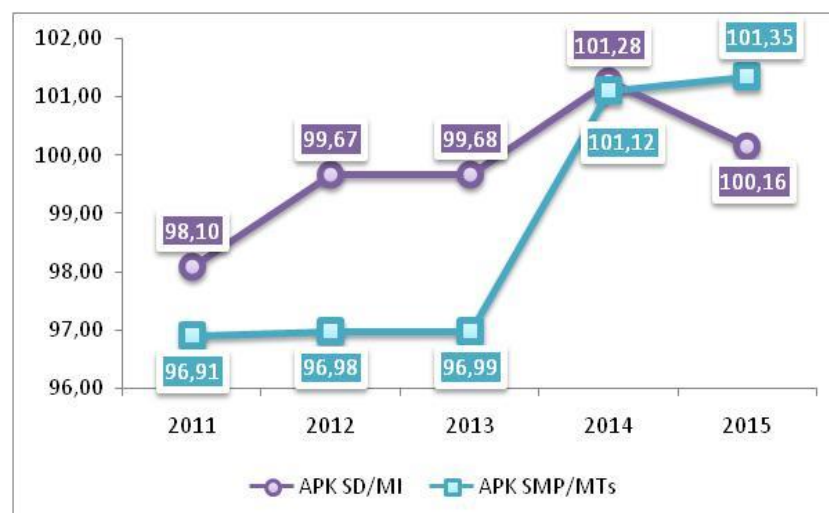
Grafik Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah Tahun 2015 (Tahun)

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2015

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat di Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya tren dalam kurun waktu 4 tahun (2011- 2014), namun di tahun terakhir yaitu tahun 2015 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 101,28% menjadi 100,16%.

Pada tahun 2011, capaian APK SMP/MTS sederajat adalah sebesar 96,91% dan meningkat menjadi 101,35% pada tahun 2015. Capaian APK tersebut sudah melampaui target MDGs dan Pendidikan Untuk Semua (PUS). Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat dan SMP/MTs sederajat Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.24 berikut:



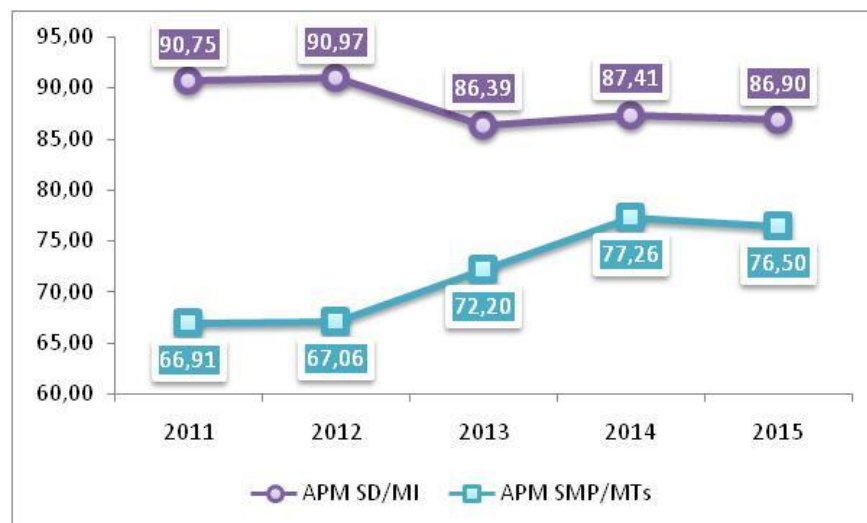
Gambar 2.24

Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat dan SMP/MTs sederajat Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

4) Angka Partisipasi Murni

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Pada Tahun 2015, capaian APM Kabupaten Rembang pada seluruh jenjang pendidikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun masih di bawah 100%, dan berada di bawah angka Jawa Tengah dan nasional (kecuali APM SMP/MTs yang diatas capaian nasional). Capaian APM SD/MI 86,90% belum mendekati capaian target RPJMD sebesar 93%, untuk itu capaiannya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target RPJMD dan SDGs dalam rangka menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Grafik Capaian APM SMP/MTs sudah mencapai target RPJMD sebesar 76,50%, adapun capaian APM SMA/SMK/MA masih ada gap yang jauh dengan capaian Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APM) SD sederajat dan SMP/MTs sederajat Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dilihat pada Gambar 2.25 berikut:



Gambar 2.25
Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTs Sederajat Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

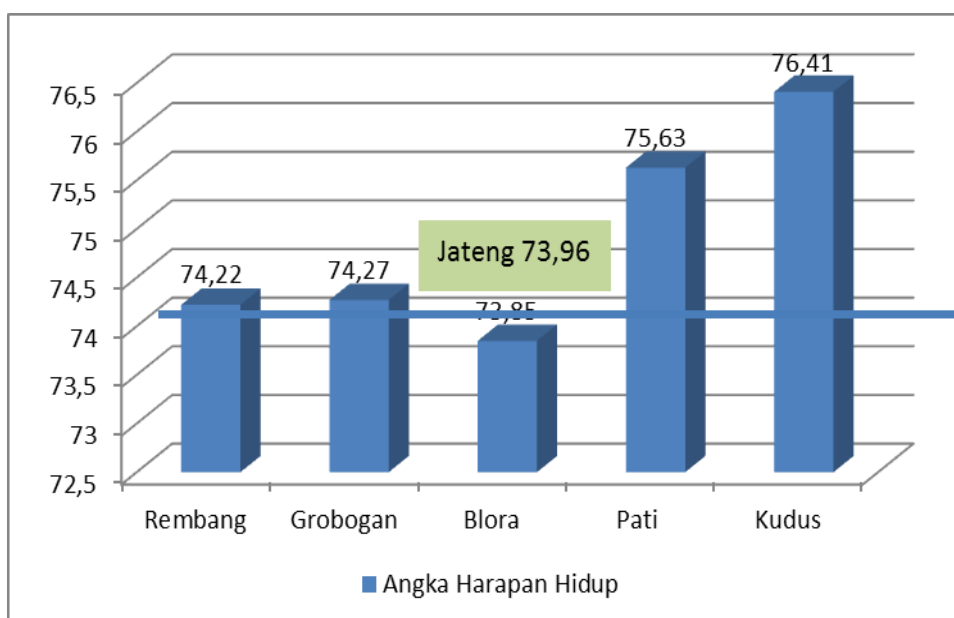
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

c. Kesehatan

1) Usia Harapan Hidup

Berdasarkan data BPS 2015, AHH Kabupaten Rembang adalah 74,22 tahun. Artinya, rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh penduduk Kabupaten Rembang dari lahir sampai

meninggal dunia adalah 74,22 tahun, lebih tinggi dibanding AHH Jawa Tengah (73,96 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan penduduk Kabupaten Rembang untuk hidup lebih lama dan hidup sehat termasuk kategori sedang, standar harapan hidup paling tinggi adalah 85 tahun. Dalam lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Rembang selalu mengalami peningkatan, dari 74,03 tahun pada 2011, kemudian terus meningkat menjadi 74,09 tahun pada 2012; 74,16 tahun pada 2013, 74,19 tahun pada 2014 dan pada tahun 2015 sebesar 74,22 tahun. Selengkapnya Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 2.26 berikut:



Gambar 2.26

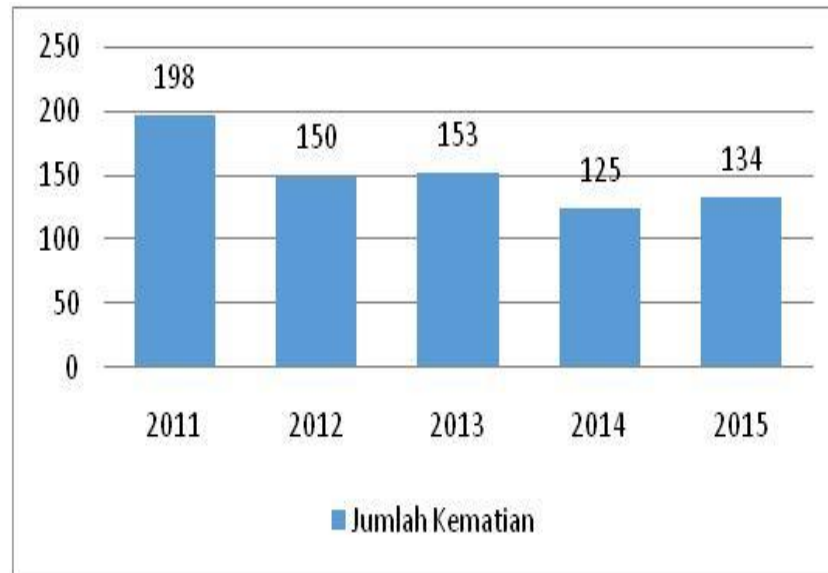
Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Rembang dan Jawa Tengah Tahun 2015

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun 2016

2) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah peluang kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun, atau jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan AKB lima tahun terakhir di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan yang baik, trennya cenderung menurun. Namun Pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan sebanyak 9 kasus kematian bayi atau AKB dari 125 kasus di Tahun 2014 menjadi 134 kasus di Tahun 2015. Wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena jumlah

AKB tinggi, yaitu di Kecamatan Sumber, Pamotan, Sedan dan Sarang yang kemungkinan besar terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tiga kecamatan yang mempunyai AKB tinggi yaitu Kecamatan Pamotan, Sedan dan Sarang merupakan kantong kemiskinan sedangkan Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang. Grafik Perkembangan AKB kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.27 berikut:

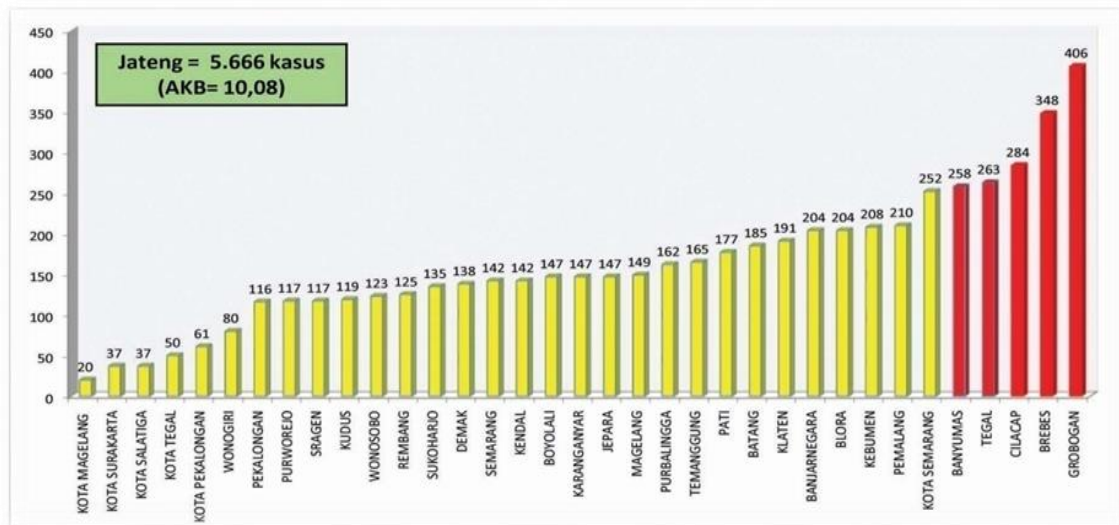


Gambar 2.27

Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2016

Pada tahun 2015, posisi kasus kematian bayi Kabupaten Rembang menempati peringkat 12 terendah di Jawa Tengah dan masih dibawah capaian Jawa Tengah (10,08). Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar posisi relatif capaian kasus kematian bayi Kabupaten Rembang masih diatas Kabupaten Jepara, Pati dan Blora namun dibawah Kabupaten Kudus. Grafik Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.28 berikut:



Gambar 2.28
Grafik Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Sedangkan jumlah kematian bayi menurut kelompok umur secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

- Kelompok umur perinatal (0–6 hari) = 49,6 % (62 kasus);
- Kelompok umur kematian neonatal 7–28 hr = 20,8 % (26 kasus)
- Kelompok umur kematian bayi 29 hr–11 bl = 29,6 % (37 kasus).

Data di atas menunjukkan bahwa kematian terbesar pada umur perinatal sehingga kondisi kematian bayi tahun 2014 erat kaitannya dengan kesehatan ibu dan janin di masa kehamilannya.

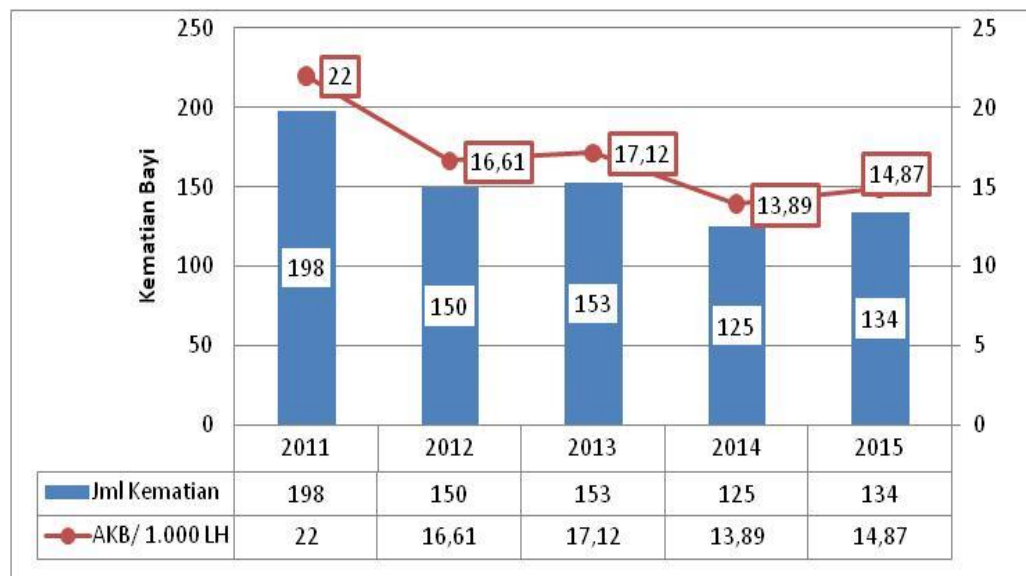
Penyebab kematian bayi di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 sebagian besar karena BBLR dan terendah karena ikterus dan kelainan saluran cerna serta karena penyebab lain-lain. Rincian Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Rembang Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

Tabel 2.12.
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Rembang Tahun 2015

No	Penyebab	Jumlah	%
1.	BBLR	28	28,8
2.	Asfiksia	21	14,4
3.	Kelainan Kongenital	19	8,8
4.	Diare	6	4,0
5.	Sepsis	4	3,2
6.	Pneumonia	1	1,6
7.	Ikterus	2	0,8
8.	Kelainan saluran cerna	0	0,8
9.	lain-lain	53	37,6
	Jumlah	134	100,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Adapun Grafik perkembangan Angka Kasus Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut:



Gambar 2.29

Grafik Perkembangan Kasus Kematian Bayi Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2015

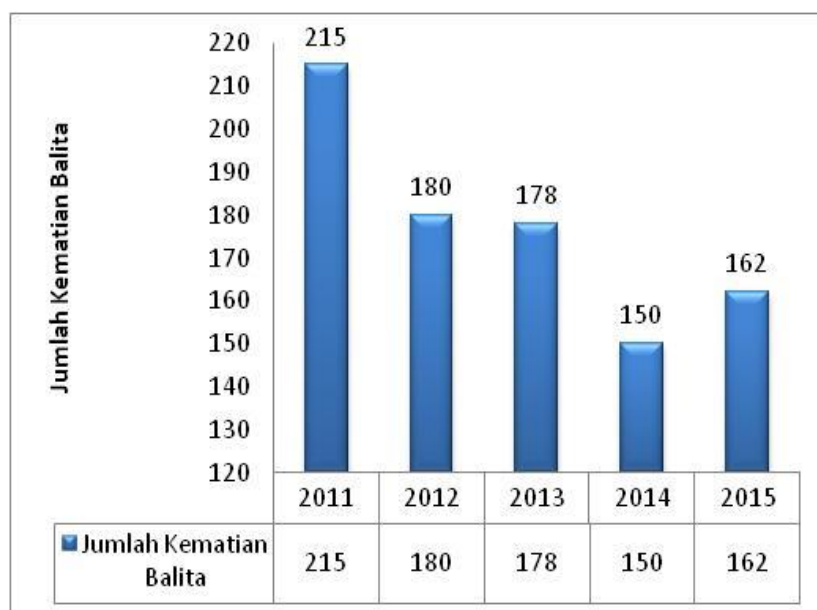
Sumber :Buku Saku Pembangunan Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka kematian bayi cenderung menurun dari tahun 2011–2015, hal ini berkaitan berbagai upaya / kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka menekan angka kematian bayi antara lain melalui peningkatan kualitas SDM kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat) dengan pendidikan dan pelatihan manajemen ketrampilan BBLR, Penanganan neonatal dan asfeksia.

3) Angka Kematian Balita (0–59 bulan)

AKABa di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, dari Tahun 2011 sebesar 23,74 kematian/1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 18,08 kematian bayi/1.000 kelahiran hidup di Tahun 2015. Penurunan yang signifikan menunjukkan upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menurunkan angka kematian balita sudah cukup berhasil. AKABa tersebut masih berada jauh di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 186 kasus. Untuk itu upaya-upaya preventif perlu dilakukan terutama pada wilayah dengan jumlah kasus kematian balita tinggi seperti di Kecamatan Sumber, Kragan, dan Lasem.

Grafik Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada Gambar 2.30 berikut:



Gambar 2.30

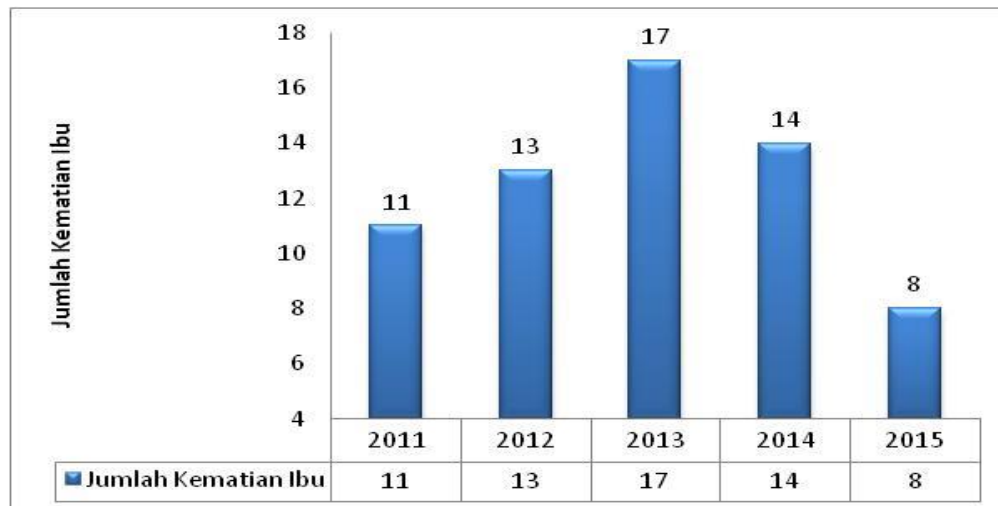
Grafik Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang tahun 2011–2015

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2016

4) Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Jumlah kematian ibu menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tertentu. Angka Kematian ibu dihitung dari Jumlah kasus/100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan jumlah kasus, tidak dapat dihitung/100.000 kelahiran hidup, karena jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang tidak melebihi jumlah 100.000 kelahiran hidup.

Kondisi angka kematian ibu di Kabupaten Rembang cenderung mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2014 dan 2015. Penyebab kasus kematian ibu paling banyak disebabkan oleh penyakit bawaan (resiko tinggi) ibu hamil. Grafik Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.31 berikut:

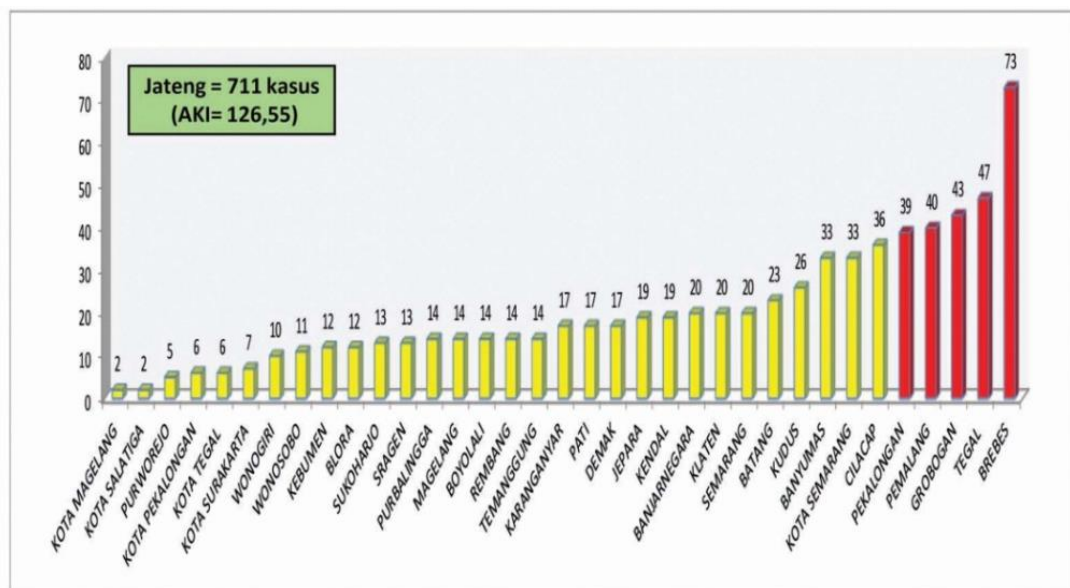


Gambar 2.31

Grafik Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2016

Pada tahun 2015, posisi kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rembang dibandingkan dengan Kabupaten Lain di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 16 terendah. Kondisi ini lebih baik dari kabupaten disekitarnya seperti Kabupaten Pati, Demak, dan Jepara kecuali Kabupaten Blora yang lebih rendah (12 kasus). Grafik Posisi Relatif Kasus Kematian Ibu Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 2.32 berikut:



Gambar 2.32

Grafik Posisi Relatif Kasus Kematian Ibu Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2015

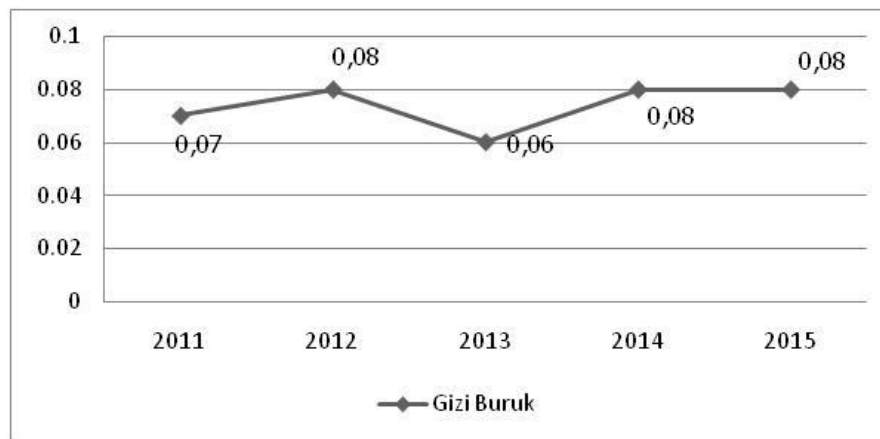
Adapun jumlah kematian ibu menurut penyebabnya adalah perdarahan sebanyak 3 kasus (21,43%), hipertensi dalam kehamilan sebanyak 3 kasus (21,43%), gangguan peredaran darah berupa penyakit jantung, stroke, dan lain-lain sebanyak 3 kasus (21,43%) dan penyebab lain-lain sebanyak 5 kasus (35,71%).

Untuk menekan kasus kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah melakukan berbagai program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan ibu di antaranya adalah:

- Tindak lanjut penjarangan Pasangan Usia Subur (PUS) beresiko tinggi dalam penanganan berbagai penyakit kronis dan perencanaan kehamilan.
- Pemeriksaan dan penanganan resiko tinggi pada ibu hamil melalui kelas ibu hamil di tiap-tiap puskesmas.
- Pengoptimalan pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita dalam penanganan kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK.
- Pemantapan regulasi tata laksana persalinan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441.8/739 tahun 2013 tentang Pelayanan Persalinan Tingkat Dasar di Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelayanan persalinan tingkat dasar dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.

5) Prevalensi Balita Gizi Buruk

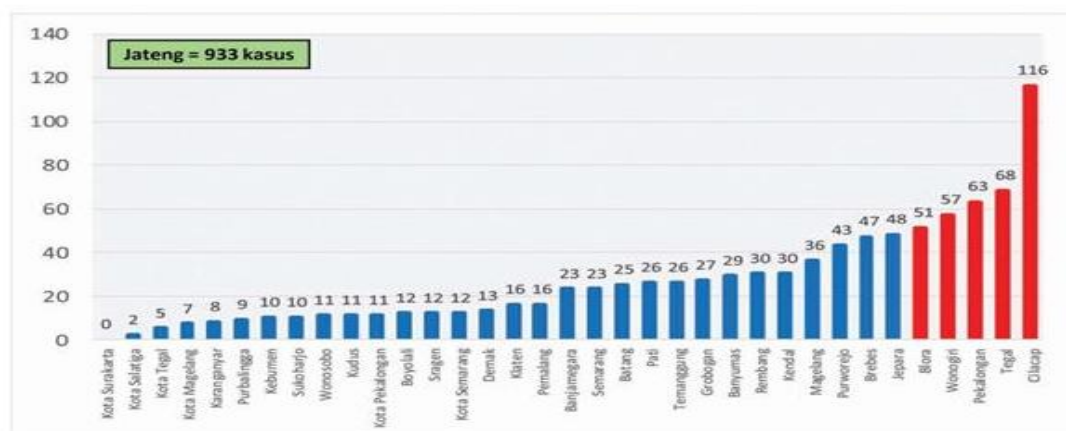
Perkembangan persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang dari tahun 2011 cenderung fluktuatif, bergerak pada kisaran 0,06% sampai dengan 0,08%. Berfluktuasinya jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Rembang sebagian besar disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan rendahnya pendapatan rumah tangga sehingga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi balita. Intervensi program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menurunkan persentase balita gizi buruk sudah cukup baik akan tetapi perlu upaya-upaya lebih keras di wilayah dengan tingkat balita gizi buruk tinggi yaitu diKecamatan Kaliori, Rembang dan Sedan. Selengkapnya Grafik Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.33 berikut:



Gambar 2.33
Grafik Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2016

Capaian kasus balita gizi buruk Kabupaten Rembang tahun 2014 sebesar 30 kasus dan apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kabupaten Rembang masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Blora, Jepara dan Kudus tapi masih di atas capaian Kabupaten Pati. Grafik Posisi Relatif Perkembangan Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 2.34 berikut:



Gambar 2.34
Grafik Posisi Relatif Perkembangan Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Rembang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah, 2015

d. Ketenagakerjaan

Dalam melaksanakan pembangunan, penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan permasalahan yang perlu penanganan yang serius. Seperti diuraikan di atas, bahwa penduduk adalah aset pembangunan bila diberdayakan secara optimal, namun

bisa menjadi beban kala pemberdayaannya tidak dibarengi kualitas SDM-nya. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang semakin lengkap dan tepat akan memudahkan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan, mengingat jumlah dan komposisi tenaga kerja selalu mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Masalah kependudukan yang paling menonjol dan memerlukan penanganan yang serius adalah ketenagakerjaan. Peningkatan jumlah tenaga kerja belum tentu seiring dengan kebutuhan dan lapangan kerja yang ada, sedangkan kinerja mereka sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya.

Semakin banyak tenaga yang tidak bekerja makin besar pula peluang terjadinya kasus yang berkaitan dengan kriminal dan kerawanan atau konflik sosial. Persaingan antar tenaga kerja semakin terbuka dan mereka membutuhkan informasi yang akurat dan kemampuan yang memadai untuk dapat memperoleh pekerjaan. Selain pendidikan formal, mereka harus mempersiapkan diri agar bisa menjadi tenaga kerja yang trampil untuk dapat mengisi lowongan kerja yang makin terbatas. Masih banyak tenaga kerja yang belum siap memasuki dunia kerja ataupun tidak sesuai dengan jenis/lapangan kerja yang ada. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas para stakeholder agar dapat membidik peluang pasar yang ada sekaligus mempersiapkan rencana kerja yang diharapkan outputnya menghasilkan tenaga kerja yang trampil sesuai dengan syarat yang diminta.

Dalam analisis ketenagakerjaan, penduduk usia kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari jenis kegiatannya, angkatan kerja meliputi kegiatan bekerja dan pengangguran, sedangkan untuk bukan angkatan kerja mencakup mereka yang dalam usia kerja namun memiliki kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja,

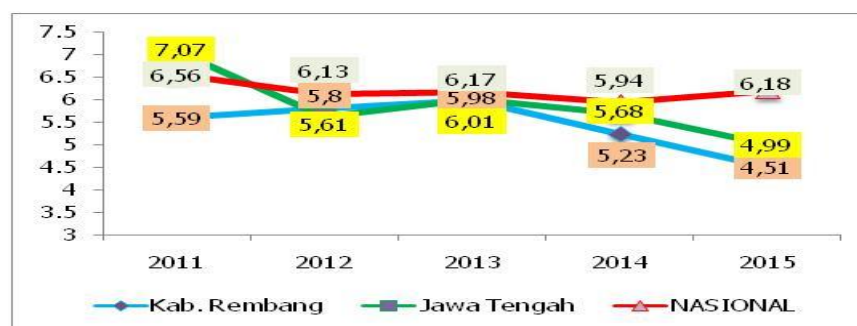
yakni mereka yang selama seminggu melakukan aktivitas bekerja atau mencari pekerjaan. Perkembangan TPAK Kabupaten Rembang tahun 2011-2015 fluktuatif dari sebesar 72,26% pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 74,88% pada tahun 2012% dan pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 66,97%. Secara rinci perkembangan kinerja ketenagakerjaan Kabupaten Rembang bisa dilihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13.
Perkembangan Kinerja Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Angkatan Kerja (%)	66	66,50	68	73	75,40
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,26	74,88	73,23	68,13	66,97
3.	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	409	483	575	1.477	1.588
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,92	5,80	5,98	5,23	4,51

Sumber: Rembang Dalam Angka BPS Kabupaten Rembang Tahun 2016

Perkembangan TPT Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, dari tahun 2011 sebesar 5,92% menjadi 4,51% pada tahun 2015. Jika diperbandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2015, Kabupaten Rembang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu sebesar 5,68 dan 5,94. Grafik Perbandingan Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut:



Gambar 2.35
Grafik Perbandingan Perkembangan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2011-2015

Sumber: BPS Kabupaten Rembang.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1) Kebudayaan

Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 di sebanyak 845 kelompok terdiri dari : Kelompok Organisasi Kesenian ada 340 kelompok, Seni Pertunjukan/ Teater Tradisi ada 150

kelompok, Jumlah Seni Musik Tradisi ada 146 kelompok, Seni Musik Modern ada 142 kelompok dan Jumlah Seni Musik Islami ada 41 kelompok, Jumlah Sanggar Tari Umum ada 12 Sanggar, jumlah Sanggar Tari Sekolah SMP dan SMA ada 10 Sanggar, jumlah Sanggar Rias Busana Jawa (Rias Pengantin dan Busana Pengantin) ada 35 Sanggar, dan Sanggar Rias Busana Modern (Rias Pengantin dan Busana fashion Show) ada 15 Sanggar. Jumlah kelompok seni yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sangat terbatas. Gedung kesenian yang ada adalah gedung serba guna yang bisa digunakan untuk gedung kesenian. Jumlah Sanggar Budaya Kabupaten Rembang pada tahun 2015 berjumlah 2 buah dan jumlah museum di Kabupaten Rembang juga sebanyak 3 unit.

2) Pemuda dan Olahraga

Dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2009 Kepemudaan, Pemerintah secara tegas telah melaksanakan pembangunan pemuda dalam bentuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan Prestasi yang diraih pemuda Rembang dimana tahun 2015, Pengembangan kepemimpinan melalui Jambore Pemuda Indonesia (JPI)/ Bhakti Pemuda Antar Provnsi (BPAP) terpilih empat Pemuda Rembang terpilih menjadi wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional; Terkait Pengembangan Kepeloporan melalui pemilihan pemuda pelopor Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dimana dua Pemuda Pelopor dari Kabupaten Rembang yang berprestasi sampai Tingkat Nasional. Pengembangan kewirausahaan yang berprestasi di tingkat Provinsi adalah Wirausaha Muda Pemula (WMP) terdapat satu orang.

Salah satu kejuaraan yang menjadi tolok ukur kemampuan atlet pelajar adalah kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tingkat Jawa Tengah. Saat ini prestasi olahraga pelajar di Kabupaten Rembang masih rendah, tidak banyak prestasi yang bisa diraih oleh para olahragawan/ atlet. Prestasi atlet POPDA Kabupaten Rembang di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dimana Tahun 2015 untuk SMP 19 atlet dengan perolehan 1 perak 3 perunggu (peringkat 32), SMA 20

atlet dengan perolehan 2 perunggu (peringkat 35);

Lapangan olahraga di Kabupaten Rembang tahun 2015 berjumlah 94 buah, yaitu terdiri atas lapangan sepak bola, lapangan bola volley, lapangan tennis, dan lapangan bulu tangkis.

Prestasi keolahragaan di Kabupaten Rembang menunjukkan prestasi yang bagus di wilayah Jawa Tengah. Pada pelaksanaan Pekan Olahraga pelajar SMA sederajat (POPDA) daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, peringkat Kabupaten Rembang dengan 2 medali perunggu, oleh karena itu upaya pembinaan terhadap berbagai cabang olahraga perlu ditingkatkan. Pembinaan tersebut bisa dilakukan melalui klub-klub olahraga yang ada.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

3.1.1.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak dini sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina.

Kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK-PAUD). APK PAUD Usia 4-6 tahun di Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan. APK PAUD usia 3 – 6 tahun baru dilakukan pendataan mulai tahun 2015, sehingga data tahun sebelumnya belum tersedia. APK PAUD Pada tahun 2015 sebesar 72,36%. Apabila dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah, capaian APK PAUD Kabupaten Rembang sudah lebih tinggi.

Untuk mendukung pelaksanaan dan kesuksesan pendidikan anak usia dini, hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Jumlah Sekolah mengalami peningkatan pada kurun lima tahun terakhir, pada tahun 2011-2012 sebanyak 348 sekolah dan pada tahun 2015 sebanyak 363 sekolah. Apabila rasio ketersediaan TK dan PAUD dibagi dengan jumlah penduduk usia 3-6 tahun sebesar 28.547 orang dengan asumsi satu

TK terdiri dari dua rombongan belajar dengan siswa 30 orang, maka kebutuhan TK di Kabupaten Rembang sebanyak 476 unit tahun 2015. Kalau pada tahun 2015 tersedia sebanyak 363 unit dengan demikian apabila akan dicapai APK TK 100% masih harus disediakan TK sebanyak 120 unit TK.

Perkembangan jumlah TK di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 terlihat pada tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14.
Perkembangan Jumlah TK di Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2015

No	Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Negeri	4	4	4	4	4
2.	Swasta	344	344	352	355	359
Jumlah		348	348	356	359	363

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Perkembangan Jumlah lembaga PAUD dan PAUD sejenis di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan selama kurun waktu 2011- 2015. Pada tahun 2011 jumlah PAUD sebesar 748 unit pada tahun 2015 meningkat menjadi 850 unit, dengan jumlah murid sebanyak 16.388 orang pada tahun 2015. Jumlah penduduk Usia 0-3 tahun di Kabupaten Rembang tahun 2015 sebesar 37.355 orang. Kebutuhan lembaga PAUD untuk anak sebanyak itu adalah 1.245 unit PAUD dengan asumsi satu PAUD terdiri dari 30 anak. Lembaga PAUD yang tersedia pada tahun 2015 sebanyak 850 unit dengan demikian masih harus disediakan sebanyak 395 unit.

Perkembangan Capaian Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15.
Perkembangan Capaian Indikator PAUD tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) (4 - 6 tahun) (3 - 6 tahun)	73,04	77,07	82,95	85,08	93,73
		Na	Na	Na	Na	72,36
2.	Jumlah Murid PAUD (0-3 tahun)	14.132	14.417	12.933	15.346	15.289
	Laki-laki	7.211	7.469	6.540	7.779	7.775
	Perempuan	6.921	6.948	6.393	7567	7.514
3.	Jumlah murid TK (4-6 tahun)	14.404	14.502	14.969	15.503	16.388
	Laki-laki	7.397	7.524	7.743	8.033	8.499
	Perempuan	7.007	6.978	7.226	7.470	7.889
4.	Jumlah Lembaga PAUD	748	785	808	810	850
5.	Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	348	348	356	359	363

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Tahun 2016

2) Pendidikan Dasar

Kinerja pendidikan dasar di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Kinerja pendidikan dasar dapat dilihat dari tingkat partisipasi, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka melanjutkan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas.

Banyaknya Sekolah Dasar di Kabupaten Rembang dalam kurun lima tahun (2011-2015) mengalami penurunan. Pada tahun 2011, jumlah Sekolah Dasar yaitu sebesar 413 unit. Kemudian mengalami kenaikan sampai tahun 2015 sebesar 417 unit. Jumlah murid SD juga mengalami penurunan yaitu dari sebesar 61.602 orang pada tahun 2011 menjadi 58.532 orang pada tahun 2015. Jumlah SMP/MTs mengalami peningkatan walau tidak cukup drastis. Sedangkan jumlah murid SM/MTs juga mengalami peningkatan yaitu dari 28.570 pada tahun 2011 menjadi 30.166 pada tahun 2015.

a) Angka Partisipasi

Angka partisipasi penduduk usia sekolah tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Rembang untuk APK SMP/MTS/SMPLB/PAKET B mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Sedangkan APM SD/MI/SDLB/Paket A sederajat dan APK SD/MI/SDLB/Paket A mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. APM SMP/MTS/SMPLB/PAKET B selama kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang ada. Perkembangan APK dan APM SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTS/SMPLB/PAKET B di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16.
Perkembangan APK dan APM SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTS/SMPLB/PAKET B di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APK SD/SDLB/MI/Paket A	98,10	99,67	99,68	101,28	100,16
2.	APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	96,91	96,98	96,99	101,12	101,35
3.	APM SD/SDLB/MI/Paket A	90,75	90,97	86,39	87,41	86,90
4.	APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	66,91	67,06	72,20	77,26	76,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

APM pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) selama 5 tahun terakhir cenderung menurun disebabkan oleh usia anak sekolah yang masuk pada jenjang pendidikan tertentu (SD atau SMP) lebih muda atau lebih awal dari usia seharusnya. Hal ini berdampak pada anak yang menempuh pendidikan SD maupun SMP sederajat tidak sesuai dengan kelompok umur sesuai jenjang pendidikan sehingga tidak akan masuk dalam perhitungan APM.

b) Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena berbagai alasan. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Putus Sekolah pendidikan dasar menunjukkan angka yang relatif baik. Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD sederajat selama kurun waktu 2011–2015 fluktuatif namun cenderung menurun dari angka 0,03% pada tahun 2011 turun menjadi 0,02% pada tahun 2015. Target Nasional Angka Putus Sekolah SD sederajat pada tahun 2015 adalah 0,15% sehingga Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang sudah di bawah Angka Putus Sekolah Nasional. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat. Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP selama kurun waktu 2011–2015 juga mengalami hal yang sama yaitu fluktuatif namun cenderung menurun. Angka Putus Sekolah SMP sederajat dari tahun 2011 sebesar 0,18% menjadi sebesar 0,19% pada tahun 2015, lebih rendah dari target Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar 0,22%. Secara rinci Perkembangan Angka Putus Sekolah SD sederajat dan SMP sederajat di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 terlihat pada Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17.
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD sederajat dan SMP sederajat di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 (%)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02
2.	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,18	0,16	0,16	0,16	0,19

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

c) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan pendidikan dari siswa SD sederajat ke SMP sederajat, dan juga dari SMP sederajat ke SMA sederajat di Kabupaten Rembang sudah cukup baik. Persentase siswa lulusan SD sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMP sederajat mengalami fluktuasi mencapai 100,69% pada tahun 2015. Adapun lulusan SMP sederajat yang melanjutkan ke SMA sederajat angkanya mengalami fluktuasi dari 71,20% di tahun 2011 menjadi 86,24% di tahun 2015. Target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian capaian Angka Melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 100% sedangkan angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA sebesar 90%. Dengan demikian capaian indikator AM Kabupaten Rembang sudah melampaui target data Renstra kementerian. Perkembangan Angka Melanjutkan SD sederajat dan SMP sederajat di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18.
Perkembangan Angka Melanjutkan SD sederajat dan SMP sederajat di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 (%)

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Melanjutkan dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	101,39	102,81	101,57	102,85	100,69
2.	Angka Melanjutkan dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/MA	71,20	82,84	82,87	90,45	86,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD sederajat telah melampaui 100%, hal ini menunjukkan bahwa anak sekolah SD sederajat yang lulus sudah semuanya melanjutkan ke jenjang SMP, ditambah dengan anak-anak yang berasal dari luar wilayah Rembang memilih melanjutkan di Kabupaten Rembang terutama di wilayah perbatasan.

d) Ketersediaan Sekolah dan Guru

Gedung sekolah dalam kondisi baik di Kabupaten Rembang untuk jenjang SD mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 56,84% meningkat menjadi 80,06% pada tahun 2015. Sedangkan untuk jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar dari tahun 2011 sebesar 83,72% meningkat menjadi sebesar 85,10% pada tahun 2015. Lebih lengkap Perkembangan Kondisi Sarana Prasarana dan Rasio Guru SD sederajat dan SMP Sederajat di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19.
Perkembangan Kondisi Sarana Prasarana dan Rasio Guru SD sederajat dan SMP Sederajat di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik (%)	56,84	80,06	80,06	80,06	80,06
2.	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik (%)	83,72	85,10	85,10	85,10	85,10
3.	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD/SDLB/MI (%)	2,13	2,43	2,57	2,9	2,9
4.	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs (%)	4,13	4,23	4,79	4,79	4,79
5.	Perbandingan Guru dengan Siswa SD/SDLB/MI	1:15	1:15	1:15	1:15	1:14
6.	Perbandingan Guru dengan Siswa SMP/SMPLB/MTs	1:17	1:16	1:15	1:15	1:15

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

Persentase ruang kelas dalam kondisi baik cenderung stagnan dikarenakan DAK dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi tidak terealisasi. Kegiatan banyak digunakan untuk pemeliharaan gedung sehingga tingkat kondisi gedung sekolah tidak mengalami kenaikan.

3) Pendidikan Menengah

Kinerja pendidikan dasar di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengamai peningkatan yang cukup baik. Perbandingan antara murid dengan guru di Kabupaten Rembang selama lima tahun (2011-2015) fluktuatif. Pembangunan pendidikan menengah memiliki indikator yang sama dengan pendidikan dasar. Mulai tahun 2017 sub urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi, namun demikian karena sampai dengan tahun 2016 masih menjadi urusan kabupaten, maka kondisi pendidikan menengah perlu digambarkan.

Kondisi pendidikan menengah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut: jumlah SMA/MA/SMK di Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2011- 2015 mengalami peningkatan cukup besar. Pada tahun 2011 jumlah SMA sebesar 48 sekolah dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 56 sekolah. Jumlah sekolah dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan untuk menampung lulusan SMP.

a) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk usia pendidikan menengah mengalami peningkatan. Meskipun demikian capaian APK dan APM untuk jenjang pendidikan menengah masih di bawah target SDGs dan juga target Pendidikan Untuk Semua (PUS) karena angkanya belum mampu mencapai 100%. Perkembangan APK dan APM Pendidikan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 terlihat pada tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20.
Perkembangan APK dan APM Pendidikan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APK SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C (%)	64,93	65,86	66,62	73,31	77,36
2.	APM SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C (%)	41,42	44,44	44,30	45,05	48,12

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

b) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah SMA sederajat selama kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuasi. Angka Putus Sekolah pendidikan SMA sederajat di Kabupaten Rembang masih termasuk tinggi karena di atas target Angka Putus Sekolah SMA sederajat Nasional yaitu sebesar 0,22%. Pada tahun 2015 angka putus sekolah tingkat SMA di Kabupaten Rembang mencapai 0,42%. Perkembangan Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21.
Perkembangan Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	0,41	0,38	0,37	0,29	0,42

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

c) Angka Kelulusan dan Rata-rata Nilai Ujian Nasional

Angka kelulusan pada pendidikan menengah selama kurun waktu 2011- 2015 cenderung fluktuatif, demikian juga untuk rata-rata nilai Ujian Nasional. Angka kelulusan pendidikan menengah dari tahun 2011 sebesar 92,31% meningkat menjadi 100% pada tahun 2015. Perkembangan Angka Kelulusan dan Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut:

Tabel 2.22.
Perkembangan Angka Kelulusan dan Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Menengah di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Kelulusan SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C (%)	92,31	96,77	99,90	99,76	100,00
2.	Rata-rata Nilai UN SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C (%)	6,72	6,98	7,1	6,87	6,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keberhasilan program pendidikan juga ditopang oleh keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pendidik yang berkualifikasi S1 atau D4. Pada jenjang SD/MI, pendidik berkualifikasi S1/D4 persentasenya meningkat. Pada tahun 2011 baru sebesar 61,69%, namun pada tahun 2015 persentasenya meningkat menjadi 87,31%. Demikian juga untuk jenjang pendidikan yang lain, namun untuk pendidik SMP yang berkualifikasi S1/D4 mengalami fluktuasi, kualifikasi pendidik yang S1 atau D4 semakin meningkat meskipun angkanya belum mampu mencapai 100%. Perkembangan Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 terlihat pada tabel 2.23 berikut:

Tabel 2.23.
Perkembangan Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 (%)	16,57	20,59	22,82	26,46	64,51%*)
2.	Persentase Pendidik SD Berkualifikasi S1/D4 (%)	61,69	71,65	80,24	83,45	87,31
3.	Persentase Pendidik SMP Berkualifikasi S1/D4 (%)	89,68	92,07	90,40	93,86	92,33
4.	Persentase Pendidik SMA/SMK Berkualifikasi S1/D4(%)	92,50	94,32	94,55	95,33	96,17

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2016

*) : data 2015, data dapodik 0-6 thn

5) Capaian target Kinerja SPM

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Rembang relatif baik, hampir semuanya mencapai target tahun 2015, walaupun baru dilakukan dua kali evaluasi capaian indikator yaitu tahun 2013 sampai dengan 2015. Data capaian SPM Bidang Pendidikan sebelumnya belum ada karena baru dilakukan evaluasi pertama kali tahun 2013 sejak SPM Bidang Pendidikan ditetapkan. Capaian indikator tersebut baik untuk indikator Kabupaten maupun indikator satuan pendidikan. Perkembangan Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24.
Perkembangan Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Rembang Tahun 2013-2015

No	Indikator	Realisasi			Target	Batas waktu pencapaian Tahun
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		
A. Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota						
1	Tersediannya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil. (%)	96,5	100	100	100	2013
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. (%)	93	100	100	100	2015
3	Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. (%)	69,5	70,23	70,23	100	2015
4	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik (%)	100	100	100	100	2015
5	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. (%)	100	100	100	100	2015
6	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang	98	98	98	100	2015

No	Indikator	Realisasi			Target	Batas waktu pencapaian Tahun
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		
	guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan (%)					
7	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran (%)	97	100	100	100	2013
8	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	100	100	100	100	2015
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualiifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing 40% dan 20% (%)	100	100	100	100	2015
10	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris (%)	100	100	100	100	2015
11	Semua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)	100	100	100	100	2015
12	Semua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)	100	100	100	100	2013
13	Semua pengawas sekolah dan madrasah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik (%)	100	100	100	100	2013
14	Memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif (%)	90	90	90	100	2013
15	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan (%)	96	96,16	96,16	100	2013
B. Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan						

No	Indikator	Realisasi			Target	Batas waktu pencapaian Tahun
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		
1	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik (%)	90	90	90	80	2013
3	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. (%)	100	100	100	100	2015
4	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku dan 20 buku referensi (%)	85	85	85	100	2015
5	Guru bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan (%)	100	100	100	100	2013
6	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun a)Kelas I-II: 18 jam per minggu b)Kelas III : 24 jam per minggu c)Kelas IV-VI: 27 jam per minggu d)Kelas VII-IX: 27 jam per minggu (%)	100	100	100	100	2013
7	Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	100	2013
8	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya (%)	100	100	100	100	2013
9	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik (%)	100	100	100	100	2013
10	Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester (%)	100	100	100	100	2013
11	Setiap guru menyampaikan laporan	91,2	91,75	91,75	80	2013

No	Indikator	Realisasi			Target	Batas waktu pencapaian Tahun
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		
12	hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik (%) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan (%)	100	100	100	100	2013
13	Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kb/Kota pada setiap akhir semester Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	2013

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2015

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Pembangunan Kesehatan pada Buku RPJMN 2015-2019 adalah mewujudkan Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Rembang diperlukan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencukupiserta berkualitas. Jumlah dokter umum di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 68 orang, dokter spesialis sebanyak 21 orang dan dokter gigi sebanyak 13 orang. Untuk selengkapnya perkembangan jumlah SDM kesehatan di Kabupaten Rembang tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25.
Perkembangan Jumlah SDM Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Dokter umum	67	60	55	58	68
2	Dokter Spesialis	16	19	11	21	21
3	Drg/ Sp gigi	13	11	10	10	13
4	Bidan + bidan PTT	375	357	217	368	365
5	Perawat	450	367	434	402	408
6	Perawat Gigi	17	17		18	17
7	Apoteker	4	2	3	4	4

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
8	Ass apoteker	27	28	28	28	28
9	Tenaga Gizi	24	22	23	21	21
10	Tenaga Analis kesehatan	-	-	-	39	40
11	Tenaga Teknisi Medis	53	48	27	28	36
12	Tenaga Fisioterapi	3	3	3	3	3
13	Tenaga Sanitasi	4	2	13	19	19
14	Tenaga Kesehatan Masyarakat	51	48	15	17	17
15	Non Medis	-	-	-	347	380
	Jumlah				1.397	1435

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2016

Upaya Pelayanan kesehatan dapat dilihat dari Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pelayanan nifas, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat, Cakupan peserta KB aktif, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (AFP, Pnemonia Balita, TB Paru, DBD, Diare) dan cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin.

Berdasarkan data capaian indikator tersebut dari tahun 2014, indikator yang memiliki cakupan terendah adalah Penemuan pasien baru TB BTA positif yang kemudian disusul oleh angka kesembuhan TB Paru. Rendahnya cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif ini kemungkinan besar dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan serta terbatasnya cakupan pelayanan kader kesehatan yang melakukan surveillan. Penyelidikan Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB dilihat dari indikator Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam. Capaian pada tahun 2015 telah mencapai 100%. Sedangkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat bisa dilihat dari indikator cakupan desa siaga aktif.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten
Rembang Tahun 2011-2015

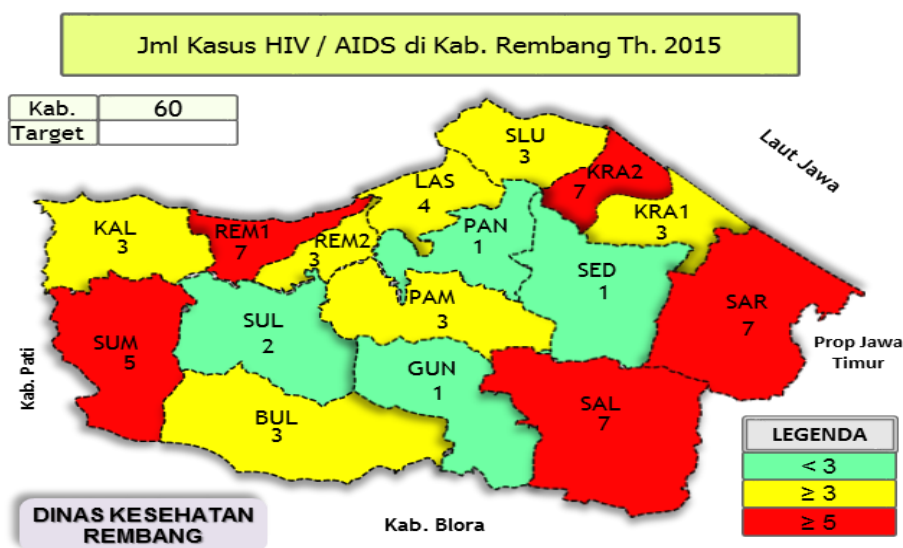
No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Usia harapan hidup (tahun)	74,03	74,09	74,16	74,19	74,22
2.	Kematian Bayi (kasus)	198	150	153	125	134
3.	Kematian Balita (kasus)	215	180	178	150	162
4.	Kematian Ibu Melahirkan (kasus)	11	13	17	14	8
5.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan (%)	97,5	98	100	97	98
6.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	10,3	1,87	10	10	10
7.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	60,70	65,35	70	75	75
8.	Jumlah kasus keracunan makanan (Desa)	3	5	1	3	na
9.	Persentase rumah tangga ber PHBS (%)	68,8	66,4	69,36	73,4	77,1
10.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100
11.	Persentase Posyandu purnama & mandiri (%)	48,98	48,98	46,60	42	42
12.	Jumlah Posyandu (Unit)	1.231	1.231	1.234	1.227	1.227
13.	Jumlah Desa Siaga (desa)	294	294	294	294	294
14.	Persentase Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100
15.	Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)	2	3	11	25	50
16.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,07	0,08	0,81	0,19	0,21
17.	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi (%)	4,2	4,5	5,44	5,67	9,84
18.	Prevalensi balita gizi kurang (%)	10,26	9,7	1,6	1,5	1,6
19.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
20.	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) (%)	82,9	82	82,3	83,12	84
21.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	81,47	87,93	88,42	96,64	Na
22.	Tingkat Cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah (%)	99,93	70,23	81,34	94,67	91,28
23.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	73,73	66,82	65,37	80,95	45,8
24.	Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	84,48	85	85,56	88,06	81,79
25.	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)	99,90	99,39	103,90	77,90	100
26.	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi (%)	84,73	87,60	83,87	86	88,9
27.	Persentase Balita mengalami KEP (%)	10,18	9,62	9,55	9,67	9,84
28.	Persentase kecamatan bebas rawan gizi (%)	67,3	78,34	81,2	85,43	92,8
29.	Cakupan Rumah Sehat (%)	37,2	39,46	43,18	66,77	67,24
30.	Jumlah kasus HIV (orang)	14	6	13	19	26
31.	Angka Bebas jentik aedes (%)	75,96	67,91	61,15	64,5	57,02
32.	Cakupan penggunaan air bersih (%)	43,56	51,58	54,44	59,70	80,34
33.	Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan (%)	82,33	86,77	91,21	94,74	95,76
34.	Cakupan penggunaan Sarana air limbah yang memenuhi syarat. (%)	45,27	37,69	46,11	47,23	51,70
35.	Cakupan penggunaan jamban keluarga yang memenuhi syarat. (%)	78,68	76,21	79,75	57,08	63,00
36.	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll) (%)	51,87	52,77	54,17	56,88	81
37.	Cakupan Desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	93,20	97,96	99,66	100	100
38.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	penyelidikan epidemiologi < 24jam (%)					
39.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100
40.	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) (%)	75,98	58,66	63,86	72	90
41.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	76	61	63,9	71	80
42.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	1,3	2,3	5,6	<10
43.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	46	50	60	67	66
44.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (<i>success rate</i>) (%)	91,57	87,68	91,88	88	87,94
45.	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (%)	30	40	40	50	60
46.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral (%)	100	100	100	100	100
47.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	15	20	20	25	25
48.	Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	0,07	0,09	0,01	0,00	0,01
49.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	16,23	59,4	53,55	17,65	113,15
50.	Persentase Kematian DBD	2,83	1,55	1,12	1,42	1
51.	<i>Acute Flaccid Paralysis</i> (AFP)	2,08	1,87	3,12	0,62	1,87
52.	Rasio dokter per satuan penduduk (%)	10,00	9,86	9,02	10,05	10,24
53.	Cakupan puskesmas (%)	73	73	74	78	78
54.	Persentase puskesmas, Terakreditasi (%)	0	0	0	0	0
55.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (%)	0,72	0,79	0,79	0,78	0,02
56.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam (%)	100	100	100	100	100
57.	Tingkat pemanfaatan Puskesmas	71	78	77	81	90
58.	Jumlah Puskesmas (unit)	16	16	16	16	16
59.	Jumlah Puskesmas Rawat Inap (unit)	10	10	10	11	11
60.	Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	69	69	69	69	69
61.	Jumlah Poliklinik Desa (unit)	166	166	166	166	166
62.	Persentase RS yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar (Kandungan dan Kebidanan, Bedah, penyakit dalam dan anak) (%)	100	100	100	100	100
63.	Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah sakit (%)	73,507	86,502	95,283	87,081	84,821
64.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota (%)	100	100	100	100	100
65.	BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>) (%)	70,08	82,09	79,53	75,57	81,04
66.	AVLOS (<i>Average Length of Stay</i> = Rata-rata lamanya pasien dirawat) (%)	3,58	3,72	3,75	3,73	3,72
67.	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	1,63	0,84	0,96	1,27	1,03
68.	BTO (<i>Bed Turn Over</i> = Angka perputaran tempat tidur)	67,20	78,04	78,17	70,31	78,61
69.	NDR (<i>Net Death Rate</i>)	23,57	21,95	22	19,53	20,66
70.	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	79,53	79,73	79,44	75,79	76,20
71.	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
72.	Persentase penduduk yang memiliki	59,50	59,50	76,56	76,56	80,47

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Jaminan pemeliharaan Kesehatan (%)					
73.	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	97,85	97,29	96,56	100	100
74.	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila (%)	15,37	17,96	29,55	66,63	80
75.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	91,92	99,85	92,66	94,31	99
76.	Cakupan kunjungan bayi (%)	87,94	94,30	89,05	91,17	94
77.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	84,73	78,65	80,74	82,09	89
78.	Cakupan pelayanan nifas (%)	90,04	97,44	92,74	90,87	92
79.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
80.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
81.	Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan (%)	100	100	100	100	100

sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Pada tahun 2015 di Kabupaten Rembang ditemukan 60 kasus HIV/ AIDS terdiri dari kasus HIV sebanyak 26 kasus dan kasus AIDS sebanyak 34 kasus. Keseluruhan kasus tersebut telah ditangani. Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 adalah sebagaimana grafik 2.36 berikut.



Gambar 2.36
Peta Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Rembang diawali pada tahun 2004 dengan jumlah satu kasus AIDS. Dalam sebelas tahun terakhir perkembangan kasus HIV/AIDS di kabupaten Rembang (tahun 2004 –

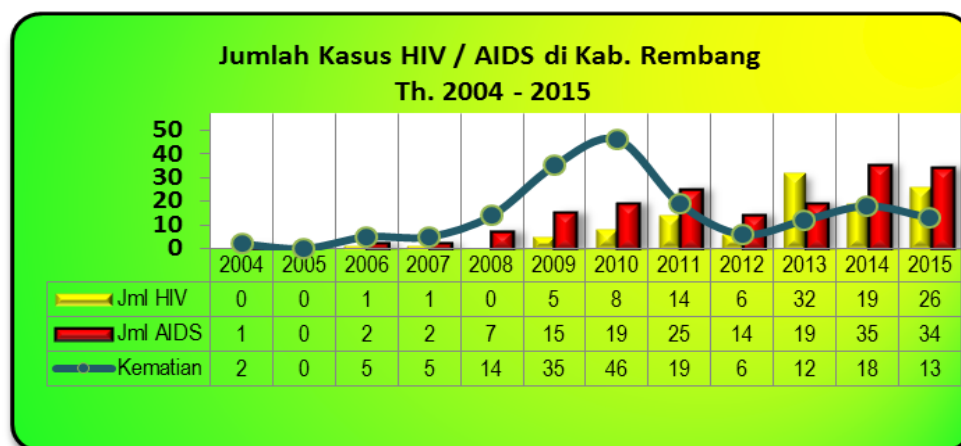
2015) meningkat pesat menjadi 266 kasus dengan jumlah kematian 114 orang. Perkembangan kasus HIV/AIDS dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana pada tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27.
Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Rembang
Tahun 2004 s.d. 2015

NO	TAHUN	Kasus HIV (+)	Kasus AIDS	Jenis Kelamin		TOTAL	MENINGGAL
				L	P		
1	2004	0	1	1	0	1	1
2	2005	0	0	0	0	0	0
3	2006	1	2	3	0	3	3
4	2007	1	2	2	1	3	3
5	2008	0	7	3	4	7	7
6	2009	5	15	10	10	20	15
7	2010	8	19	12	15	27	17
8	2011	14	25	24	15	39	19
9	2012	6	14	11	9	20	5
10	2013	13	19	21	11	32	12
11	2014	19	35	24	30	54	18
12	2015	26	34	32	28	60	13
Kumulatif		93	173	138	128	266	114

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus meningkat dari tahun ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS.



Gambar 2.37

Grafik Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Grafik di atas menunjukkan peningkatan kasus HIV/ AIDS mulai pada tahun 2008 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ditemukan 60 kasus terdiri dari HIV sebanyak 26 ks dan AIDS sebanyak 34 kasus. Sedangkan kematian HIV/ AIDS pada tahun 2015 sebanyak 13 orang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang untuk menekan kasus HIV/AIDS diantaranya adalah:

- Surveillance pada kelompok resiko tinggi
- Konseling Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat dalam pencegahan dan Penanganan Penderita Penyakit HIV/AIDS .
- Advokasi pada Stakeholder dalam Forum Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
- Peningkatan Penata laksanaan Penderita HIV/AIDS melalui Klinik Visite dan layanan pemberian obat ARV di fasilitas Kesehatan.

c. Pekerjaan Umum

1) Prasarana Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan aksesibilitas berbagai sektor pembangunan terutama dalam pengembangan ekonomi daerah. Fasilitasi prasarana jalan terus diupayakan baik jalan poros nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Prasarana jalan di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2015 mempunyai panjang jalan 642,75 Km dengan kondisi jalan baik 288,95 Km atau 44,96%. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Rembang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.239,9 m sampai tahun 2015 yang dalam kondisi baik sejumlah 92 unit atau 73,02%. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari jalan Kabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 57,45 Km dan jalan nasional sepanjang 60,81 km. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28.
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang jalan kabupaten (Km)	642,75	642,75	642,75	642,75	642,75
	Persentase kondisi jalan baik (%)	50,06	54,70	55,59	48,98	44,96
	Persentase kondisi sedang (%)	17,92	20,47	22,50	26,27	30,30
	Persentase kondisi jalan rusak ringan (%)	13,99	12,94	10,25	13,11	13,11
	Persentase Kondisi jalan rusak berat (%)	18,03	11,90	11,75	11,64	11,64
	Panjang jalan provinsi (Km)	57,45	57,45	57,45	58,40	58,40
	Panjang jalan Nasional (Km)	60,81	60,81	60,81	61,27	61,27

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
2	Jumlah Jembatan Kewenangan Kabupaten	126	126	126	126	126
	Persentase Jembatan Kewenangan Kabupaten	66,67	73,02	74,6	73,02	73,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2016

Capaian pembangunan prasarana jalan dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari persentase kondisi jalan baik pada tahun 2011 sepanjang 321,75 km atau sebesar 50,06% dari total panjang jalan kabupaten 642,75 km mengalami penurunan menjadi 288,95 km atau sebesar 44,96% pada tahun 2015. Penurunan jumlah ruas jalan dalam kondisi baik disebabkan oleh:

1. Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) terutama jalur wilayah penambangan material apalagi dibarengi dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi juga ikut memperparah rusaknya kondisi jalan dan jembatan.
2. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.
3. Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.

2) Prasarana Sumber Daya Air

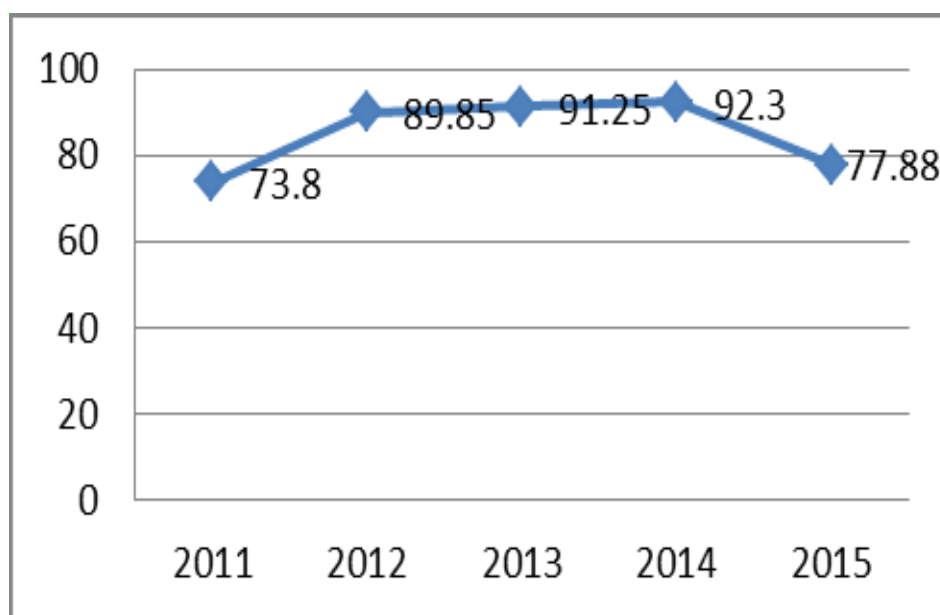
Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan dalam rangka menyediakan pemenuhan air baku untuk air minum, irigasi maupun industri. Luas layanan areal irigasi sebesar 21.193,45 ha tercakup dalam 293 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 1 DI kewenangan pusat, 1 DI kewenangan provinsi, 124 DI kewenangan kabupaten dan 167 DI kewenangan desa. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2015 sebesar 19.561,45 Ha dari luas area irigasi 21.193,45 Ha atau 92,30%. Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.29.
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku
di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi (Luas Irigasi Kabupaten dlm kondisi baik dari total 21,193.45 hektar)	15,640	19,042	19,338	19,561	19,561
2	Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (embung-m3-dalam ribuan)	8,100,154	8,101,319	8,101,319	8,101,319	8,101,319

Sumber: DPU Kabupaten Rembang, 2016

Selanjutnya untuk Grafik Perkembangan Prosentase Irigasi Kabupaten Rembang dengan Kondisi Baik Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.38 berikut:



Gambar 2.38

Grafik Prosentase Perkembangan Irigasi Kabupaten Rembang dengan Kondisi Baik Tahun 2011-2015

Sumber: DPU Kabupaten Rembang, 2015

Pembangunan sumber daya air dalam 5 tahun terakhir kecenderungannya mengalami peningkatan prasarana jaringan irigasi dengan capaian indikator prosentase irigasi kabupaten sebesar 92,30% pada tahun 2014, meskipun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 77,88%. Namun yang masih harus mendapatkan perhatian serius kedepan adalah permasalahan dalam penyediaan air baku, dimana kapasitas maksimal yang tersedia sampai tahun 2015 baru mencapai 8.101.319.000 m³ yang sangat tergantung dengan kondisi tinggi rendahnya curah hujan tahunan dikarenakan sebagian besar berupa tampungan air (embung). Untuk itu pembangunan

sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Kondisi tersebut menyebabkan cakupan ketersediaan air baku untuk irigasi maupun untuk industri masih relatif kurang.

Neraca ketersediaan air pada studi tentang Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Baku di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut:

Tabel 2.30.
Neraca Air Kabupaten Rembang

UPT	KECAMATAN	KEB.IRIGASI	KEB.AIR BERSIH	KEB.TOTAL	Q TERSEDIA	HASIL (ltr/dtk)	(m3/dtk)
BARAT	Sumber	6009,5	1,16	6010,66	1464,07	-4546,59	-4,54659
	Kaliori	5361,74	3,07	5364,81	6765,07	1400,26	1,40026
	Bulu	3219,84	1,49	3221,33	10268,15	7046,82	7,04682
	Rembang	2626,61	8,59	2635,2	65,5	-2569,7	-2,5697
	Sulang	650,52	5,1	655,62	165,78	-489,84	-0,48984
TENGAH	Pancur	3030,3	3,16	3033,46	349,45	-2684,01	-2,68401
	Lasem	1659,06	8,54	1667,6	148,19	-1519,41	-1,51941
	Pamotan	1935,23	7,63	1942,86	983,2	-959,66	-0,95966
	Gunem	2207,56	1,46	2209,02	1643,12	-565,9	-0,5659
TIMUR	Sale	3195,66	1,27	3196,93	767,43	-2429,5	-2,4295
	Sedan	3260,73	2,69	3263,42	381,5	-2881,92	-2,88192
	Kragan	5928,6	0,92	5929,52	525,45	-5404,07	-5,40407
	Sarang	3511,37	5,19	3516,56	3018,35	-498,21	-0,49821
	Sluke	1747,25	1,12	1748,37	275,92	-1472,45	-1,47245

Sumber: Rencana Induk Penyediaan Air Baku

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air bersih dan semakin menurunnya jumlah ketersediaan air, diperlukan suatu cara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih tersebut adalah dengan adanya rencana pembangunan embung-embung dan bendung-bendung baru di wilayah Kabupaten Rembang, dan penyelidikan air tanah yang lebih detail khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan air sehingga nantinya diharapkan dengan adanya rencana pembangunan tersebut dapat meningkatkan jumlah ketersediaan air khususnya pada wilayah-wilayah kecamatan yang mengalami kekurangan akan ketersediaannya.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam meningkatkan air baku pada kabupaten Rembang adalah memanfaatkan sumber daya alam

yang ada yaitu sumber air tanah dan salah satu sumber yang berpotensi dijadikan sumber air bersih adalah air laut. Air laut dapat dijadikan air bersih dengan proses desalinasi. Sehubungan dengan wilayah Kabupaten Rembang yang dekat dengan daerah pesisir.

Hasil sampingan dari proses desalinasi adalah *brine*. *Brine* adalah larutan garam berkonsentrasi tinggi (lebih dari 35000 mg/l garam terlarut). Desalinasi merupakan metode desalinasi yang paling lama dan paling umum digunakan. Desalinasi adalah metode pemisahan dengan cara memanaskan air laut untuk menghasilkan uap air, yang selanjutnya dikondensasi untuk menghasilkan air bersih. Berbagai macam proses desalinasi yang umum digunakan, seperti multistage flash, multiple effect distillation, dan vapor compression umumnya menggunakan prinsip mengurangi tekanan uap dari air agar pendidihan dapat terjadi pada temperatur yang lebih rendah, tanpa menggunakan panas tambahan.

Metode lain desalinasi adalah dengan menggunakan membran. Terdapat dua tipe membran yang dapat digunakan untuk proses desalinasi, yaitu reverse osmosis (RO) dan *electrodialysis* (ED). Pada proses desalinasi menggunakan membran RO, air pada larutan garam dipisahkan dari garam terlarutnya dengan mengalirkannya melalui membran water-permeable. Permeate dapat mengalir melalui membran akibat adanya perbedaan tekanan yang diciptakan antara umpan bertekanan dan produk, yang memiliki tekanan dekat dengan tekanan atmosfer. Sisa umpan selanjutnya akan terus mengalir melalui sisi reaktor bertekanan sebagai brine.

Proses ini tidak melalui tahap pemanasan ataupun perubahan fasa. Kebutuhan energi utama adalah untuk memberi tekanan pada air umpan. Desalinasi air payau membutuhkan tekanan operasi berkisar antara 250 hingga 400 psi, sedangkan desalinasi air laut memiliki kisaran tekanan operasi antara 800 hingga 1000 psi. Dalam praktiknya, umpan dipompa ke dalam container tertutup, pada membran, untuk meningkatkan tekanan. Saat produk berupa air bersih dapat mengalir melalui membran, sisa umpan dan larutan brine menjadi semakin terkonsentrasi. Untuk mengurangi konsentrasi garam terlarut pada larutan sisa, sebagian larutan terkonsentrasi ini diambil dari container untuk mencegah konsentrasi garam terus meningkat. Sistem RO terdiri dari 4 proses utama, yaitu (1) pretreatment, (2) pressurization, (3)

membrane separation, (4) post treatment stabilization. desalinasi dengan RO desalinasi dengan RO Pretreatment: Air umpan pada tahap pretreatment disesuaikan dengan membran dengan cara memisahkan padatan tersuspensi, menyesuaikan pH, dan menambahkan inhibitor untuk mengontrol scaling yang dapat disebabkan oleh senyawa tertentu, seperti kalsium sulfat. Pressurization: Pompa akan meningkatkan tekanan dari umpan yang sudah melalui proses pretreatment hingga tekanan operasi yang sesuai dengan membran dan salinitas air umpan. Separation: Membran permeable akan menghalangi aliran garam terlarut, sementara membran akan memperbolehkan air produk terdesalinasi melewatinya.

Efek permeabilitas membran ini akan menyebabkan terdapatnya dua aliran, yaitu aliran produk air bersih, dan aliran brine terkonsentrasi. Karena tidak ada membran yang sempurna pada proses pemisahan ini, sedikit garam dapat mengalir melewati membran dan tersisa pada air produk. Membran RO memiliki berbagai jenis konfigurasi, antara lain spiral wound dan hollow fine fiber membranes. Stabilization: Air produk hasil pemisahan dengan membran biasanya membutuhkan penyesuaian pH sebelum dialirkan ke sistem distribusi untuk dapat digunakan sebagai air minum. Produk mengalir melalui kolom aerasi dimana pH akan ditingkatkan dari sekitar 5 hingga mendekati 7.

Untuk pemanfaatan potensi air tanah pada kabupaten Rembang perlu dilakukan studi Hidrogeologi terlebih dahulu. Dengan menentukan titik-titik daerah yang representatif akan sumber airnya. Agar mendapatkan hasil maksimal untuk membantu pemenuhan air baku untuk masyarakat kabupaten Rembang.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada kecamatan-kecamatan yang memiliki nilai neraca air minus, arahan pemenuhan kebutuhannya dilakukan dengan optimalisasi fungsi embung pada masing-masing wilayah tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang, Rencana pembangunan dan pengelolaan embung di Kabupaten Rembang meliputi sebagai berikut:

- a) Embung Lodan dengan kapasitas kurang lebih 5.390.000 m³(lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu meter kubik); Sarang.

- b) Embung Banyukuwung dengan kapasitas kurang lebih 2.416.000 m³ (dua juta empat ratus enam belas ribu meter kubik); Sulang.
- c) Embung Grawan dengan kapasitas kurang lebih 42.000 m³ (empat puluh dua ribu meter kubik); Sumber.
- d) Embung Panohan dengan kapasitas kurang lebih 1.165.000 m³ (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah); Gunem.
- e) Embung Tlogo dengan kapaasitas kurang lebih 3.700.000 m³ (tiga juta tujuh ratus ribu meter kubik); Bulu.
- f) Embung Gedari dengan kapasitas kurang lebih 166.000 m³ (seratus enam puluh enam ribu meter kubik); Sluke.
- g) Embung Terenggulunan dengan kapistas kurang lebih 4.000.000 m³ (empat juta meter kubik); embung Pasedan dengan kapasitas kurang lebih 64.420.000 m³ (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu meter kubik); Pancur.
- h) Embung Gambiran dengan kapasitas kurang lebih 3.090.000 m³ (tiga juta sembilan puluh ribu meter kubik);Pamotan.
- i) Embung Palemsari dengan kapasitas dengan kapasitas kurang lebih 340.000 m³ (tiga ratus empat puluh ribu meter kubik); Sumber.
- j) Embung Sendangmulyo dengan kapasitas kurang lebih 3.270.000 m³ (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu meter kubik); Bulu.
- k) Embung Kaliombo dengan kapasitas kurang lebih 2.150.000 m³ (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah meter kubik); Sulang.
- l) Embung Sambiroto dengan kapasitas kurang lebih 7.070.000 m³ (tujuh juta puluh ribu meter kubik); Sedan.
- m) Embung Mojosari dengan kapasitas kurang lebih 2.630.000 m³ (dua juta enam ratus tiga puluh ribu meter kubik); Sedan.
- n) Potensi embung yang lainnya.

3) Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

Cakupan pelayanan air minum yang aman sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 80,34% baik wilayah perkotaan maupun perdesaan, cakupan sanitasi layak sebesar 77,42% dan cakupan layanan persampahan sebesar 20,7%. Perkembangan Cakupan Layanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat dalam tabel 2.31 berikut:

Tabel 2.31.
Perkembangan Cakupan Layanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No.	Cakupan Layanan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Air minum (%)	55,54	60,04	66,93	70	80,34
2	Sanitasi (dasar) (%)	54,14	56,09	66,42	71,25	77,42
3	Persampahan (%)	19,4	19,85	20,1	20,4	20,7

Sumber: DPU Kabupaten Rembang, 2016

4) Saluran Drainase

Saluran drainase di Kabupaten Rembang sepanjang 25,95 km. Pada tahun 2015 saluran drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 16,60 km, sedangkan kondisi rusak sepanjang 9,35 km yang berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan industri, niaga dan pemukiman penduduk. Panjang drainase ini mengalami perbaikan rata-rata pertahun 1,25%.

Saluran drainase dalam kondisi rusak pada tahun 2015 adalah 36%, mengindikasikan masih perlu penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama drainase yang berada pada kawasan pemukiman yang bersentuhan langsung dengan penduduk. Adapun pengembangan jaringan drainase harus dilakukan dengan mengikuti kontur tanah dan sungai sebagai muara akhir agar jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna untuk sarana pembuangan. Disisi lain drainase jalan juga perlu pembangunan dalam rangka pencegahan terjadinya banjir.

Perekmbangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32.
Perekmbangan Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Panjang Drainase (km)	25,95	25,95	25,95	25,95	25,95
2	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (km)	15,40	15,75	16,00	16,35	16,60
3	Panjang Drainase dalam Kondisi Rusak (km)	10,45	10,20	9,95	9,60	9,35

Sumber: DPU Kabupaten Rembang, 2016

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rembang yang terus naik secara signifikan. Namun demikian penyediaan rumah oleh Pemerintah Daerah masih kurang, pada saat ini sebagian besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh pihak swasta. Kedepan perlu adanya

peran pemerintah yang dapat membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumah supaya harga rumah akan relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan perumahan tersebut tentunya diharapkan dapat merata disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Rembang guna menjaga integrasi pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman di Kabupaten Rembang adalah kondisi permukiman kumuh, hal tersebut terutama di wilayah permukiman pantai. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, dan kondisi lahan pantai yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai. Saat ini di Kabupaten Rembang terdapat 4 kecamatan dan 14 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh yaitu meliputi:

- Kecamatan Rembang : Kelurahan Tanjungsari, Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal, dan Desa Padaran;
- Kecamatan Lasem : Desa Dorokandang, Desa Ngeplak, Desa Soditan, dan Desa Babagan;
- Kecamatan Kragan : Desa Kragan, Desa Karangharjo, dan Desa Tegalmulyo;
- Kecamatan Pamotan : Desa Pamotan, Desa Bangunrejo, dan Desa Sidorejo.

Berdasarkan data dari PBDT 2015 (Pemutahiran Basis Data Terpadu), jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Rembang Tahun 2015 sebanyak 59.453 unit.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan ancaman gangguan ketertiban dan keamanan yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun sebanyak 351 kali, menurun dibandingkan tahun 2014 sebanyak 354 kali. Angka kriminalitas kabupaten Rembang tahun 2015 sebesar 5,12% menurun dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,32%.

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Rembang selama 3 tahun kondisinya fluktuatif. Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.33.
Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun	391	368	421	354	351
2.	Angka kriminalitas (%)	5,98	5,68	5,46	5,32	5,12

Sumber: Polres Kabupaten Rembang Tahun 2016

f. Sosial

Urusan Sosial yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 6 sub bidang, yaitu (1) Pemberdayaan sosial; (2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; (3) Rehabilitasi Sosial; (4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; (5) Penanganan Bencana; dan (6) Taman Makam Pahlawan. Penyelenggaraan urusan sosial bertujuan mencapai kesejahteraan sosial, yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam menangani PMKS sudah cukup baik namun hasilnya masih belum optimal. Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi konstan sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 yaitu hanya tercapai 30%, dan baru meningkat di tahun 2014 dan 2015 sebesar 40%. Demikian halnya dengan persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya tahun

2011 hanya tercover 32,01%, berturut-turut meningkat dan tahun 2015 mencapai 60%. Beberapa program yang berjalan selama ini sedikit sekali kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial warga masyarakat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya PMKS yang belum memperoleh penanganan secara tepat. Perkembangan capaian Indikator Urusan Sosial di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.34 berikut:

Tabel 2.34.
Perkembangan capaian Indikator Urusan Sosial
di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	7.784	7.917	8.017	8.143	8.200
2.	Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	30,02	30,12	30,15	40,15	40,20
3.	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Kerja (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	32,01	33,20	34,12	60,21	60,35
4.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat (%)	100	100	100	100	72
5.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	3	2	4	4	3
6.	Persentase penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan (%)	36	33	20	15	12
7.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	1,10	1,12	1,25	1,31	2,02
8.	Persentase(%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	37,05	45,12	53,21	62,12	63,12
9.	Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina (%)	3	3	4	4	6
10	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial, eks psikotik dan masyarakat rawan sosial yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan berusaha. (%)	10,34	10,88	11,21	11,57	12,19
11	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial, eks psikotik dan masyarakat rawan sosial yang terfasilitasi operasional usahanya berupa alat/model usaha (%)	7,87	8,43	8,97	9,56	10,78
12	Jumlah napi, pengguna narkoba, dan penderita penyakit sosial lainnya serta generasi muda yang mengikuti penyuluhan(orang)	26	35	40	42	40
13	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social (%)	27,12	28,10	30,02	47,12	48,18
14	Persentase lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) telah dibina (%)	34,12	36,26	38,17	70,02	70,58
15	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	1,11	1,13	1,14	2,12	4,15

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang Tahun 2016

3.1.1.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dimana sasaran utamanya adalah memperluas dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Selanjutnya salah satu aspek penduduk yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Bagi individu-individu, dimensi ekonomi berkaitan dengan pemenuhan hidup sehari-hari, dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan lapangan kesempatan kerja / berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Rembang dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan melalui kegiatan proyek pembangunan yang tidak sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia atau antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2011 TPAK sebesar 72,26% kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 74,88%. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2015 angkanya selalu menurun dengan kondisi terakhir pada angka 66,97%. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Menurunnya TPAK

tahun 2015 sebesar 66,97% menunjukkan bahwa berkurangnya persentase angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Rembang.

Sedangkan capaian Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Rembang sejak tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan, dari 5,92% menjadi 4,51%. Interpretasi persentase TPT yang menurun menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. TPT pada tahun 2015 menunjukkan 4,51%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebagai angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, sebanyak 4,51 orang merupakan pengangguran. Namun demikian, penurunan tingkat pengangguran terbuka seharusnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor inisiatif atau usaha mandiri dari para pencari kerja di sektor informal, perlu upaya dan program peningkatan lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang secara berkelanjutan.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 bisa di lihat pada tabel 2.35 bawah ini:

Tabel 2.35.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	72,26	74,88	73,23	68,13	66,97
2.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,92	5,80	5,98	5,23	4,51

Sumber: BPS Kabupaten Rembang Tahun, 2016

Diperlukan sinergitas yang lebih baik dari pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK). Indikator IPK digunakan untuk membantu mengarahkan program perencanaan urusan ketenagakerjaan lima tahun mendatang di Rembang. Sembilan indikator IPK yang menjadi indikator dan perlu ditingkatkan yaitu (1) perencanaan tenaga kerja, (2) pendudukan dan tenaga kerja, (3) kesempatan kerja, (4) pelatihan dan kompetensi kerja, (5) produktivitas tenaga kerja, (6) hubungan industrial, (7) kondisi lingkungan kerja, (8) pengupahan dan kesejahteraan pekerja, dan (9) jaminan sosial tenaga kerja.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Ada 6 (enam) sub bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yaitu (1) Kualitas hidup perempuan; (2) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; (3) Kualitas Keluarga Perlindungan Anak; (4) Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dan ; (5) Pemenuhan Hak Anak (PHA) Data dan Informasi Gender dan Anak; (6) Perlindungan Khusus Anak.

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. PUG Sebagaimana Inpres tersebut memerintahkan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya *mainstreaming* gender sesuai pedoman pengarusutamaan gender sehingga keadilan gender terwujud. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan dan laki-laki terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat yang sesuai untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki.

RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai strategi yang digunakan dalam percepatan implementasi PUG. *Pertama*, peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di

daerah. *Kedua* Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. *Ketiga* peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Capaian PUG yang ditunjukkan dari tingkat pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, masih rendah. Sebagai contoh, kondisi ini ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan penganggaran. Implementasi PUG ini baru terwujud pada beberapa perangkat daerah kunci yang telah dianggap responsif terhadap situasi dan kondisi kesenjangan gender. Jika diperbandingkan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah, kondisi di Kabupaten Rembang hampir serupa yaitu baru beberapa perangkat daerah kunci yang menjalankan PPRG melalui dua program dua kegiatan yang perlu segera ditingkatkan.

Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari masih terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan gender. Capaian IPG masih jauh berada di bawah capaian IPG provinsi Jawa Tengah. Secara umum dalam lima tahun terakhir, IPG Provinsi Jawa Tengah selalu di atas 90,00. Pada tahun 2014, IPG Jawa Tengah sebesar 91,89. IPG Kabupaten Rembang Tahun 2011 mencapai 85,12, kemudian naik menjadi 85,57 pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi 86,04 pada tahun 2014. Grafik Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014 terlihat pada gambar 2.39 berikut:



Gambar 2.39

Grafik Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2014

Sumber: IPG Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Kondisi lain yang ditunjukkan adalah jumlah kelembagaan responsif gender. Berdasarkan Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, kelembagaan yang dipersyaratkan ada adalah Pokja PUG, Focal Point PUG dan Forum-forum berperspektif gender dalam masyarakat, perguruan tinggi dan swasta. Kondisi yang ada di Kabupaten Rembang terdapat 62 kelembagaan PUG, namun hanya 4 lembaga yang aktif.

Dalam peningkatan kualitas hidup perempuan di kabupaten Rembang dapat dilihat dari jumlah perempuan di parlemen. Persentase partisipasi perempuan di Parlemen, dari tahun 2011 capaiannya sebesar 22,22%, pada tahun 2015 capaiannya tetap yaitu sebesar 22,22%. Turunnya keterlibatan perempuan di parlemen ini salah satunya karena rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan daerah, baik karena rendahnya kemauan dan SDM perempuan maupun karena jangkauan atau akses yang sulit.

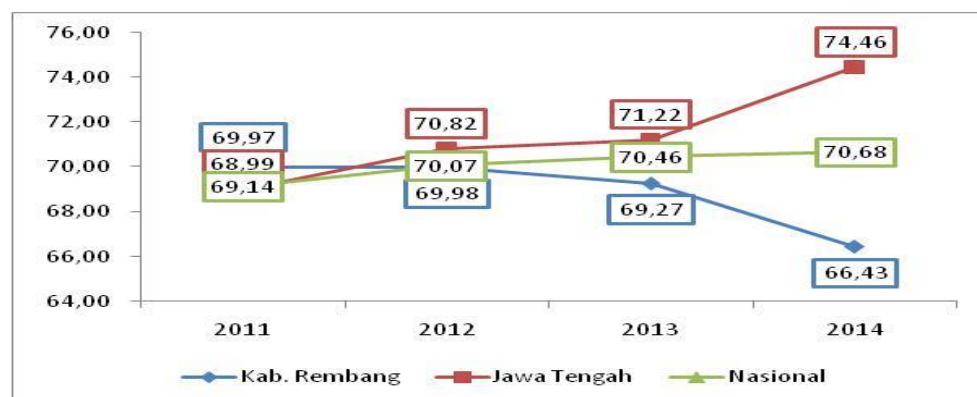
Jika dilihat dari persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan swasta Tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, khususnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perkembangan keterlibatan perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Rembang tahun 2011-2015 terlihat pada tabel 2.36 berikut:

Tabel 2.36.
Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	22,22	8,89	20,00	17,78	22,22
2.	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	45,14	40,33	43,77	36,82	37,22
3.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	32,33	31,02	31,14	31,27	31,69

Sumber: BPMPKB Kabupaten Rembang, Tahun 2016

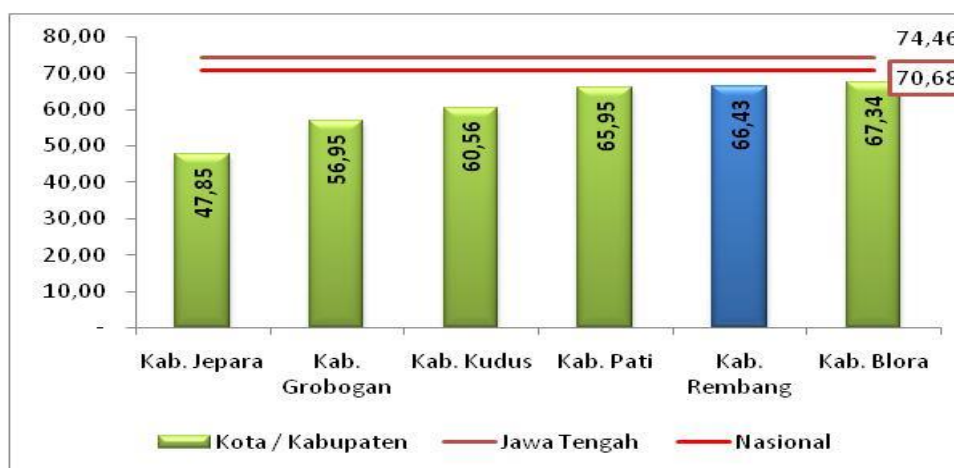
Kualitas hidup perempuan dapat dilihat dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengalami penurunan. Grafik Perkembangan IDG Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 -2014 dapat dilihat pada Gambar 2.40 berikut:



Gambar 2.40
Grafik Perkembangan IDG Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 -2014

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Dalam grafik meskipun mengalami perlambatan, namun kondisi ini cukup bagus dibandingkan dengan kondisi kabupaten sekitar di Jawa Tengah, namun masih berada dibawah rata-rata Jawa Tengah. Grafik Perbandingan IDG Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 2.41 berikut:



Gambar 2.41
Grafik Perbandingan IDG Kabupaten Rembang dengan
Kabupaten Sekitar Tahun 2014

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Dalam rangka upaya penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Kabupaten Rembang telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), berupa UPT Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten dengan nama Tim “Semai RWC3” (*Rembang Woman Child Crisis Center*) sesuai Keputusan Bupati Rembang No. 163 Tahun 2005. Setiap kasus yang dilaporkan di sekretariat UPT “Semai RWC3” ini seluruhnya akan langsung ditangani.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan menurun yaitu kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 sebanyak 18 kasus, tahun 2012 mencapai 15 kasus, tahun 2013 sebanyak 12 kasus, tahun 2014 sebanyak 16 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 12 kasus. Meskipun kecil namun tidak berarti kejadian kekerasan pada perempuan berhenti. Kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, yang belum menunjukkan kondisi senyatanya. Begitu juga pada kekerasan pada anak pada tahun 2011 sebanyak 22 kasus selanjutnya pada tahun 2012 berjumlah 20 kasus, tahun 2013 dan 2014 meningkat kembali menjadi 22 kasus dan 24 kasus. Pada 2015 menurun menjadi 12 kasus. Perhatian pemerintah untuk mendorong kesadaran masyarakat di Kabupaten Rembang yang responsif terhadap pencegahan dan penanganan tindak kekerasan sudah lama digalakkan dengan wadah kelembagaan LPAR (Lembaga Perlindungan Anak Rembang) di level Kabupaten dan KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa) di-level desa. Adanya keterlibatan

masyarakat diharapkan kejadian kekerasan dapat terdeteksi sedini mungkin untuk dicegah atau bila sudah terjadi segera dilaporkan kepada UPT yang menangani untuk mendapatkan pelayanan.

Dalam hal pelaksanaan sub urusan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, dan sub urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, secara nyata telah dilaksanakan namun belum optimal karena jumlah lembaga-lembaga masyarakat dan dunia usaha yang tersebar sangat banyak. Beberapa UMKM yang digeluti perempuan yang sangat menonjol adalah usaha perikanan, batik, makanan khas, dan usaha perdagangan.

Dalam hal pelaksanaan sub urusan penyediaan data gender dan anak, Rembang telah memiliki data tersebut, meskipun belum semua urusan dapat disediakan data gender. Hal ini disebabkan karena data gender belum dianggap penting oleh Perangkat daerah, serta belum adanya tuntutan data terpilah dalam dokumen perencanaan.

Beberapa prestasi yang mengharumkan Kabupaten Rembang diantaranya berturut-turut Kabupaten Rembang sejak tahun 2010 mencapai anugerah Parahita Ekapraya Utama dari Presiden serta tahun 2015 dipuncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2015 yang dipusatkan di Istana Presiden, Bogor beberapa waktu lalu, Kabupaten Rembang kembali menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya.

Capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 secara lengkap Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut:

Tabel 2.37.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Presentase kelembagaan PUG yang aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase pengelolaan institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan (%)	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	3.31%	2.94%	2.78%	3.14%	3.14%
4.	Rasio KDRT (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan (%)	100	100	100	100	100
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	pukesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%)					
7.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	50	50	70	75	75
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100
7.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	0	0	0	0	0
8.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan (%)	50	50	70	70	70
9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	0	0	0	0	0
10.	Persentase institusi jaringan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak yang terfasilitasi kegiatannya (%)	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%
11.	Jumlah korban KDRT yang terfasilitasi dalam rumah anak (%)	0	0	0	0	0

Sumber: BPMPKB Kabupaten Rembang, 2016

2) Perlindungan Anak

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Rembang terkait program Kabupaten Layak Anak (KLA), dimana terus ditekankan komitmen pada pengampu hingga level ditingkat desa. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dilaksanakan secara maraton di 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. Pelaksanaan Pada tahun 2015 terbagi menjadi 2 tahap; tahap I mulai tanggal 14 september 2015 s/d 21 september 2015; tahap II di tanggal 19 oktober 2015 s/d 28 Oktober 2015.

Tujuan diadakannya sosialisasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah sebagai bentuk komitmen kepada warga Masyarakat Rembang agar maksimal dalam pelayanan publik sehingga dalam Peraturan Daerah ini sangat jelas hak dan kewajiban penerima layanan maupun pemberi layanan disemua unit layanan di kabupaten Rembang. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 juga salah satunya dimaksudkan dapat mendukung

penyelenggaraan pelayanan publik pada program Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yakni untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara. Untuk itu pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak. KLA merupakan sebuah media gerakan yang massif untuk peduli terhadap anak, media yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama untuk memperhatikan, mencintai, dan mengasihi anak dengan sungguh-sungguh untuk memberikan bekal bagi masa depan anak. Upaya itu juga diteruskan hingga di level kecamatan dan desa, yakni dengan membentuk Desa Ramah Anak.

Kabupaten Rembang kembali menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya. Terdapat 5 klaster 31 indikator yang ditetapkan sebagai penilaian untuk mendapat penghargaan KLA ini dan salah satu unsur pendukungnya adalah adanya Pemenuhan hak dan penanganan Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis masyarakat, yang biasa disebut Kelompok Perlindungan anak Desa / Kelurahan (KPAD/ K). Kabupaten Rembang juga merupakan inisiator penerapan KPAD ditingkat Kabupaten yang sekarang diadopsi oleh tingkat nasional. Di Kabupaten Rembang telah ada 58 KPAD aktif dan 60 KPAD rintisan yang masih dalam taraf sosialisasi.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) pada tahun 2015 telah menetapkan Desa Gunem sebagai desa percontohan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang berada dijalur yang benar untuk mejadi Kabupaten Layak Anak.

Selain pengawasan berbasis masyarakat langkah-langkah konkret lain untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rembang yakni dengan penegakan hukum (*law enforcement*) yang melibatkan aparat yang berwenang serta pengawasan di lingkungan keluarga juga menjadi prioritas dan yang terpenting adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat. Sementara itu, jumlah anak nakal dan anak jalanan menunjukkan peningkatan angka kasus

yang cukup fluktuatif. Oleh karenanya program perlindungan anak fokus dalam menangani kasus yang terjadi pada anak; Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal (AN) dan Anak Jalanan (AJ).

Dalam upaya Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak maka dilaksanakan sosialisasi program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) melalui PIK remaja, Pembentukan dan fasilitasi terhadap Forum Anak di Rembang (FAR) secara berjenjang, sebagai bentuk media untuk menyalurkan ide dan kreatifitas anak di Kabupaten Rembang, Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak, penataan kelembagaan perlindungan anak dan membangun kemitraan dengan para pihak pemangku kewajiban pemenuhan hak dan perlindungan anak.

c. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu: (1) Ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan; (2) keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan (3) pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan. Dengan mengacu pada sistem Ketahanan Pangan tersebut, penyelenggaraan Pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan Pangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Ketersediaan energi dan protein Per Kapita menunjukkan seberapa besar ketersediaan energi dan protein pada tingkat rumah tangga. Semakin tinggi ketersediaan energi dan protein perkapita menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terhadap bahan pangan semakin baik. di Kabupaten Rembang, ketersediaan pangan tergolong baik, dengan ketersediaan energi perkapita menunjukkan peningkatan dari sebesar 5.164 kkal/kap/hari pada tahun 2013 menjadi 5.527 kkal/kap/hari pada tahun 2015, sedangkan ketersediaan protein menurun dari sebesar 145,04 gram/kapita/hari pada tahun 2013 menjadi sebesar 131,08 gram/kapita/hari pada tahun 2015. Capaian ketersediaan energi perkapita telah sesuai dengan standar ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal dan protein sebesar 57 gram.

Jumlah ketersediaan yang melebihi standar ini menunjukkan tidak terjadinya kerawanan pangan di Kabupaten Rembang karena kebutuhan bahan pangan terpenuhi dan masyarakat memiliki daya beli masyarakat terhadap pangan. Ketersediaan energi dan protein ini didorong dengan produksi bahan pangan utama yaitu padi yang surplus. Penguatan cadangan pangan juga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari dari capaian diatas 100 ton/hari, telah melebihi standar yang ditetapkan pemerintah untuk kabupaten/kota.

Berkaitan dengan keterjangkauan pangan, capaian Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar 32% pada tahun 2011 menjadi sebesar 100% pada tahun 2015. Stabilitas harga dan pasokan pangan juga capaiannya selalu mencapai 100% dalam kurun waktu tahun 2011-2015.

Berkaitan dengan konsumsi pangan dan keamanan pangan, dapat diketahui dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Rembang belum mencapai angka ideal, dengan capaian tahun 2011 sebesar 82,4 terus meningkat menjadi 86,8 pada tahun 2015. Nilai PPH yang masih di bawah standar mengindikasikan kurang seimbang konsumsi kelompok pangan. Untuk menyeimbangkan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan takaran energi diperlukan perubahan perilaku konsumsi dalam masyarakat. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti beras sebaiknya diubah menjadi bahan lain

dengan kandungan karbohidrat/energi yang lebih rendah seperti ubi atau pangan substitusi lain. Konsumsi pangan hewani, sayur dan buah perlu ditingkatkan sebagai sumber protein dan vitamin. Sayur dan buah terutama sangat penting sebagai sumber vitamin sehingga penyakit kekurangan vitamin dan mineral dapat ditekan.

Tingkat konsumsi energi Kabupaten Rembang mencapai sebesar 2.040 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 56 gram/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi melebihi standar konsumsi energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein sesuai dengan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kelebihan konsumsi energi rata-rata penduduk yang dapat menyebabkan masalah kesehatan akibat berat badan berlebih. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras tentunya perlu ditempuh melalui upaya untuk menaikkan pemanfaatan sumber karbohidrat dari bahan lokal sebagai alternatif konsumsi. Guna penganekaragaman bahan pangan, perlu dipilih bahan-bahan lokal yang dapat diolah sebagai pangan alternatif selain beras.

Secara rinci Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut:

Tabel 2.38.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	82,4	85,9	86,7	86,8	86,8
2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)	na	87	244,44	244,44	240,62
3.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	32	42	100	100	100
4.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	81	83	100	100	100
5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	31	35	74	92	80
6.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	43	64	88	21	66,6
7.	Persentase peningkatan kelas penyuluh per tahun (%)	5,8%	6,7%	8,12%	8,12%	10%
8.	Jumlah diklat formal/non formal yang diikuti penyuluh per tahun	16	17	18	18	20
9.	Jumlah Pos Penyuluhan desa per tahun (Posluhdes)	2	2	2	2	2
10.	Persentase peningkatan kelas kelompok tani (%)	2,0	1,7	34,92	34,92	17

Sumber: BKP dan P4K Kabupaten Rembang Tahun 2016

d. Pertanahan

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta fasilitasi dan sinkronisasi program-program pemerintah di bidang pertanahan.

Sejalan dengan kebijakan nasional bidang pertanahan pada periode tahun 2011-2015 maka secara prinsip pelaksanaan kewenangan tersebut menyesuaikan dengan agenda pembangunan di Kabupaten Rembang, dalam hal ini meliputi:

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai kebutuhan melalui instansi/PD yang membutuhkan tanah.
2. Ijin lokasi melalui KPPT sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.
3. Ganti kerugian diberikan bila ada kegiatan pengadaan tanah.
4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah menyesuaikan agenda *Land reform* dari BPN.
5. Pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, berupa pemberian rekomendasi terkait tanah Negara dan lain-lain.
6. Perencanaan penggunaan tanah, pada tahun 2014 melalui KPPT mulai diawali penyusunan Perbub tentang Alih Fungsi Lahan dalam rangka pelayanan pemberian ijin alih fungsi lahan.

Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut:

Tabel 2.39.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No.	Pelayanan Urusan Pertanahan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang tanah yang bersertifikat	122.462	126.675	139.115	141.700	147.650
2	Bidang tanah di Kabupaten Rembang	365.502	365.502	365.502	365.502	365.502
3	Sertifikasi tanah nelayan (bidang)	100	-	200	500	200
4	Sertifikasi PRONA (bidang)	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000
5	Sertifikasi PRODA (bidang)	100	150	100	100	100
6	Sertifikasi UMKM (bidang)	-	100	150	100	100

Sumber: BPN Kabupaten Rembang, 2016

e. Lingkungan Hidup

Sarana pengumpulan sampah Kabupaten Rembang tahun 2011-2015 yaitu meliputi truk sampah, truk container, container gerobak sampah, Tempat Pembuangan Sementara, dan Tempat Pembuangan Akhir. Namun truk tinja, transfer depo, dan instalasi pengolah limbah tinja masih belum ada unit yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Secara lebih jelasnya, perkembangan banyaknya sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Rembang tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut:

Tabel 2.40.
Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Jenis Sarana	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Truk Sampah (unit)	4	5	5	5	5
2.	Truk Kontainer (Unit)	5	5	7	7	7
3.	Kontainer (unit)	55	56	56	56	56
4.	Gerobak dan Becak Sampah (unit)	89	95	95	98	98
5.	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	31	35	36	36	36
6.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang 2015

Apabila dilihat dari jenis sampahnya, penanganan sampah di Kabupaten Rembang tidak sepenuhnya mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang jumlah terbatas hanya 1 unit. Persentase sampah terbanyak adalah berupa sampah organik yaitu sebesar 49,12% pada tahun 2015. Sedangkan bagian terkecil berupa gelas dan kaca sebesar 0,59% pada tahun 2015. Perkembangan Persentase Komposisi Jenis Sampah di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41.
Perkembangan Persentase Komposisi Jenis Sampah di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 (%)

No	Jenis Sampah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kertas	12,64	12,66	12,7	12,55	12,97
2.	Kayu	11,15	11,16	11,17	11,14	11,16
3.	Kain	0,97	0,98	0,98	0,96	0,95
4.	Karet/Kulit	1,35	1,36	1,39	1,32	1,3
5.	Plastik	8,76	8,8	8,95	8,53	9,07
6.	Metal/Logam	1,35	1,36	1,38	1,28	1,27
7.	Gelas/Kaca	0,6	0,62	0,63	0,59	0,59
8.	Organik	51,62	51,65	51,8	50,06	49,12
9.	Lainnya	11,56	11,41	11	13,57	13,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang 2015

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengelolaan

lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas: a) pelayanan pencegahan pencemaran air, b) pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. c) pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dan d) pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.

Adapun Perkembangan Angka Persentase Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut:

Tabel 2.42.
Perkembangan Angka Persentase Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Pencapaian Pada Tahun (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pencegahan Pencemaran Air	Persentase Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air.	38	43	59,18	100	100
2	Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak	Persentase Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak Yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara.	41	51	100	100	100
3	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti.	66,66	100	100	100	100

Sumber: BLH Kabupaten Rembang 2015

Selanjutnya Perkembangan Kinerja Pengendalian Pencemaran Dan Perusak Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.43 berikut:

Tabel 2.43.
Perkembangan Kinerja Pengendalian Pencemaran Dan Perusak Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase Pemantauan status mutu air	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98
2.	Persentase Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	76.27	56.96	39.37	39.42	47.45
3.	Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	38.24	42.86	59.18	100	100
4.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	66.67	100	100	100	100
5.	Persentase Kegiatan penegakan hukum lingkungan	75	100	87,50	100	100

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2016

Aktifitas pemantauan status baku mutu air dilakukan terhadap 43 titik wajib pantau, pada tahun 2015 baru dilakukan pada 3 titik wajib pantau. Keterlibatan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam penanganan air limbah domestik utamanya terhadap pengendalian pencemaran lingkungan. Sehingga tugas dan fungsi yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan monitoring (pengawasan), terutama mengenai baku mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan agar sesuai baku mutu yang ada dan tidak mengakibatkan pencemaran. Selain itu juga menerima pengaduan/keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik. Sedangkan Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi dalam monitoring kaitannya dengan penyediaan sarana sanitasi.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus dioptimalkan guna kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya, dimana SDA memiliki peran ganda yang dapat diseimbangkan, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Oleh karenanya, kebijakan investasi dan pembangunan harus dapat dikendalikan dan dicegah pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif dan ekspansif sehingga fungsi lingkungan hidup tidak semakin menurun.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Pelayanan pencatatan sipil;
- 3) Pengumpulan data kependudukan;
- 4) Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Kabupaten/Kota;
- 5) Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Kewenangan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa indikator kinerja bidang administrasi kependudukan seperti yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi penerbitan KTP, Akta Kelahiran, dan dokumen kependudukan yang lain.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain amanat Undang-Undang tersebut di atas, bidang Administrasi Kependudukan juga merupakan salah satu urusan yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal. Hal tersebut dikarenakan penerbitan dokumen administrasi kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Adapun indikator yang termuat dalam kebijakan tersebut yaitu cakupan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan target capaian 100% pada tahun 2015, cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan target capaian 100% pada tahun 2015, cakupan penerbitan kutipan

akta kelahiran dengan target capaian 90% pada tahun 2020, dan cakupan penerbitan kutipan akta kematian dengan target 70% pada tahun 2020.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan di masyarakat, meskipun demikian masih ada beberapa indikator yang capaiannya masih belum sesuai dengan harapan. Misalnya adalah persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang kinerjanya justru mengalami mengalami tren menurun dengan capaian tahunan yang fluktuatif. Indikator kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu, yakni dari 59,52% pada 2011 menjadi 81% pada tahun 2015. Kedua indikator tersebut capaiannya masih dibawah target yang termuat dalam SPM. Sedangkan indikator SPM lainnya yang telah mampu mencapai target 100% adalah kepemilikan kartu keluarga dan kepemilikan akta kematian.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut:

Tabel 2.44.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penduduk ber KTP per satuan Penduduk (%)	53,37	57,21	68,25	89,20	87,52
2.	Persentase bayi ber-akte kelahiran (%)	98,96	98,96	97,92	94,25	96,45
3.	Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	59,52	59,98	67,02	59,58	81
4.	Persentase pasangan berakte nikah (non-muslim) (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase kepemilikan kartu keluarga (%)	100	100	100	100	100
6.	Persentase Kepemilikan Akte Kematian (%)	100	100	100	100	100
7.	Informasi Administrasi Kependudukan (%)	43,56	44,93	51,07	71,70	85,50

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2016

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang strategis dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Melalui pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat

mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam pemberdayaan masyarakat ada 3 aspek utama kegiatan pemberdayaan yaitu 1) pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM), 2) pemberdayaan sosial ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal dan 3) pelestarian lingkungan. Oleh karena itu keberhasilan pemberdayaan masyarakat tercermin dari tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, terwujudnya peran serta atau partisipasi masyarakat ditentukan oleh tingkat kapasitas masyarakat dan kesadaran serta tanggungjawab untuk memberikan kontribusi pemikiran, tenaga maupun material dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan seperti kemampuan untuk berusaha, mencari informasi, dan mengelola kegiatan. Jenis kemampuan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat harus didorong agar mampu bekerjasama atau bergotong royong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengorganisasian masyarakat dapat dibentuk sebagai upaya masyarakat untuk saling mengelola kegiatan yang akan dikembangkan.

Tantangan ke depan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan, hak asal usul, dan adat istiadat Desa dan kewenangan lokal skala desa, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini sebagian kewenangan Kabupaten akan diserahkan dan dilaksanakan oleh desa.

Capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun 2011–2015 relatif stabil. Jumlah Posyandu aktif cenderung stagnan karena jumlah posyandu sejak tahun 2012 relatif tetap yaitu

sebanyak 1.225 buah. Sementara itu capaian indikator persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif sudah maksimal, yang berarti seluruh LKM sudah dilakukan pembinaan. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat cenderung sama dari tahun 2011–2015 yaitu 20%.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 adalah pada tabel 2.45 berikut:

Tabel 2.45.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Kondisi Saat Ini				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	PKK aktif (Unit)	309	309	309	309	309
2.	Posyandu aktif (unit)	1.231	1.225	1.225	1.225	1.225
3.	Persentase Posyandu Purnama Dan Mandiri (%)	48,98	46,85	46,85	46,85	47,75
4.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat yang telah diberdayakan (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif (%)	100	100	100	100	100
6.	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	100	100
8.	Persentase kepala desa yang telah mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa (%)	100	100	100	100	100
9.	Pembangunan kawasan pedesaan	0	0	0	0	1
10.	Badan kerjasama antar desa	13	13	13	13	13

Sumber: BPMPKB Kabupaten Rembang 2016

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Maksud dari program ini adalah bahwa pemerintah mempersiapkan keluarga sebagai unit terkecil secara ideal sebagaimana konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang melalui perencanaan jumlah keluarga untuk menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Tujuan dari KB itu sendiri yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dengan cara mengendalikan angka kelahiran pada setiap keluarga.

Kabupaten Rembang dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk juga turut mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. *Total Fertility Rate* Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07. Angka tersebut menunjukkan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya.

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Rembang telah mencapai 100% dari sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) tahun 2011 sebesar 8,01%, tahun 2015 menurun menjadi 6,93%. Perkembangan *unmet need* dari tahun 2011–2015, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Fluktuasi *unmet need* KB ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB khususnya MKJP serta PUS yang tidak ingin memiliki/menunda punya anak namun tidak ber-KB. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi *unmet need* KB antara lain melalui optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan SDM PLKB, peningkatan kepesertaan KB Pria, dan kerjasama antar berbagai institusi.

2) Keluarga Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Rembang pada tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 memiliki angka sebesar 96.998 keluarga dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2015 sebesar 95.880 keluarga. Jika diakumulasikan angka tersebut pada tahun 2011-2015 akan menurun menjadi 1.118 keluarga. Sedangkan keluarga sejahtera I mengalami fluktuasi dalam waktu 5 tahun (2011-2015), yaitu pada tahun 2011 sebesar 10.929 keluarga dan pada tahun 2015 mempunyai angka sebesar 12.116 keluarga. Pada tahun 2011 ke tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1.187 keluarga.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.46 berikut:

Tabel 2.46.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2011–2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total fertility Rate (TFR)	1,87	2,1	1,86	1,86	2,07
2.	Rasio akseptor KB /1000 PUS	831,36	840,61	833,6	827,48	825,23
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,78	3,04	3,14	3,46	3,68
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,01	6,91	7,26	7,83	6,93
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	53	53	35	35	35
7.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	83,14	84,06	83,36	82,75	83,57
8.	Angka Drop out KB	13,8	11,11	12,32	14,19	13,62
9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100
10.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	57,23	55,76	55,96	54,96	54,64
11.	Ratio petugas lapangan keluarga Berencana / penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	3,86	3,97	4,32	4,39	4,52
12.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	100	100	100	100	100
13.	Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	100	100	100	100	100
14.	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB	87,27	94,06	91,99	92,21	91,12
15.	Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB	92,13	90,92	91,96	91,97	92,12
16.	Cakupan Peserta KB Aktif MKJP	11,98	12,69	13,81	15,25	16,61
17.	Cakupan Peserta KB Aktif Pria	1,47	1,30	1,25	1,14	1,14
18.	Cakupan Tribina	90,50	91,02	89,86	91,42	83,80

Sumber: BPMKB Kabupaten Rembang Tahun 2016

i. Perhubungan

Kabupaten Rembang merupakan wilayah mempunyai arus lalu lintas yang cukup padat, dilalui jalur jalan Regional antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang. Kondisi jalur lalu lintas sering menimbulkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilewati secara langsung oleh jalan utama pantura.

Kebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum; meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika; pengembangan infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informatika di kawasan pesisir. di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar kegiatan transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas terminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- ❖ Terminal angkutan penumpang
- ❖ Terminal angkutan barang

Terminal yang tersedia terdiri dari dua terminal kelas B yaitu Terminal Lasem dan Terminal Rembang, dan tujuh terminal kelas C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang, Pamotan, dan Sumber. Sampai saat ini pelayanan terminal di Kabupaten Rembang sudah berfungsi sesuai dengan peruntukannya, meskipun masih memerlukan perbaikan. Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas.

Selama ini kontrol terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar, Sumpersari Kragan, Cikalan Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga

menghambat arus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususnya angkutan barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan *rest area* atau pool truk yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengemudi angkutan barang.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut:

Tabel 2.47.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase terminal C dalam kondisi baik (%)	71,42	71,42	71,42	71,42	71,42
2.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten / kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)	70	70	70	70	70
3.	Peningkatan Fasilitas Parkir Mobil Barang (%)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
4.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	80	80	80	85	85
5.	Jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Rembang (kali)	360	300	401	418	408
6.	Cakupan ketersediaan halte bus pada jaringan trayek	1	0	2	2	2
7.	Ketersediaan rambu rambu lalu lintas (%)	33	42	52	67	67
8.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten / kota					
	Rambu (%)	33	42	52	67	67
	Marka (%)	3	10	60	63	65
	Guardrill (%)	30	32%	32	35	35
	LPJU (%)	-	1	5	5	5
	APILL (%)	13	15	16	19	36
9.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten / kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji (uni)	1	1	1	1	1
10.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang	579	614	748	925	1.014

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten / kota (unit)					
11.	Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	2.350.612	2.289.517	2.351.731	2.156.071	2.308.680
12.	Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan) (%)	78	86	85	64	68
13.	Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji (unit)	4.382	4.998	5.725	6.436	6.936
14.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji (unit)	8.756	9.270	9.553	10.616	11.616
15.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	90	90	90	90	90
16.	Persentase kapal yang bersertifikasi (%)	16,74	10,40	9,46	29,69	28,78
17.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000	KI: 30.000 KII: 32.000 KIII: 35.000
18.	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) (%)	79	80	85	90	98
19.	Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan (%)	90	92	93	94	94
20.	Jumlah rambu-rambu laut yang terpasang	1 unit (rambu siang)	1 unit (Rambu Pengenal MPMT)	0	0	0
21.	Peralatan SAR (Perahu Karet) (unit)	0	0	2	2	2

Sumber: Dinhubkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2015

Pelabuhan Rembang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan berada di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang, yang secara keruangan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan perikanan pantai pada Kawasan Sentra Perikanan Kabupaten Rembang, oleh karena itu maka Pelabuhan Tasik Agung saat ini dan kedepan lebih dikembangkan untuk pelabuhan perikanan pantai sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Terpadu. Sedangkan Pelabuhan Rembang, mengingat berada pada posisi strategis di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Surabaya), pada tahapan pembangunan

jangka menengah dan jangka panjang, dikembangkan melalui pembangunan terminal pelabuhan Tanjung Bendo Sluke sebagai pelabuhan pengumpan yang selanjutnya diproyeksikan menjadi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama.

Pengembangan terminal pelabuhan Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke diharapkan menjadi infrastruktur pemicu bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas dan hasil olahan *hinterland* Kabupaten Rembang dengan peluang kegiatan antara lain:

- 1) Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang dan pengolahan produk pertanian.
- 2) Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor impor.
- 3) Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan distribusi minyak Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang.
- 4) Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri Kabupaten Rembang.

Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam jangka waktu tahun 2011-2015 mengindikasikan kecenderungan perbaikan, yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatnya aksesibilitas pelayanan angkutan umum, menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya peran swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan. Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 terlihat dalam tabel 2.48 berikut:

Tabel 2.48.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelanggaran ijin trayek (kasus)	98	34	40	33	33
2.	Pelanggaran uji (kasus)	107	71	58	58	58
3.	Pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya (kasus)	22	1	0	0	0
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (unit)	4.382	4.998	5.417	6.546	6.546
5.	Kendaraan Bermotor yg di Uji (unit)	8.756	9.232	9.729	10.216	10.216
6.	Pelanggaran Jalur Penangkapan/pelayaran	0	0	0	0	0
7.	Pelanggaran Alat Penangkapan Ikan	0	0	2	0	0

NO	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Pelanggaran Pencurian Ekosistem Laut yang dilindungi	0	0	0	0	0
9.	Pelanggaran Kelengkapan Dokumen Kapal (kali)	10	105	105	79	79
10.	Jumlah Angkutan Darat (unit)	579	614	748	925	925
11.	Jumlah penumpang angkutan darat (orang)	2.981.268	2.970.956	2.351.737	2.156.071	2.156.071
12.	Kecelakaan di Laut (kasus)	5	1	5	2	2

Sumber: Dinhubkominfo Kabupaten Rembang, 2016

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2015 diantaranya dapat diketahui dari proporsi jumlah angkutan darat sebanyak 926 unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 2.156.071 orang. Sedangkan upaya untuk menurunkan tingkat gangguan lalu lintas dilaksanakan dengan terus meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2011-2015. Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 sebagaimana tabel 2.49 berikut:

Tabel 2.49.
Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No.	Fasilitas Perhubungan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rambu 60 x 60 cm	263	281	121	40	40
2	Rambu 90 x 90 cm	Na	na	90	90	90
3	Rambu model F	28	15	24	14	14
4	RPPJ Kecil 1 Muka	45	45	48	48	48
5	RPPJ besar 1 Muka	2	4	4	4	4
6	RPPJ besar 2 Muka	1	1	1	1	1
7	Warning Light Pijar	6	1	7	13	19
8	Warning Ligh LED	Na	7	11	11	11
9	Traffic Light Pijar	na	Na	3	3	3
10	Traffic Light LED	Na	Na	Na	1	1
11	Guardraill (m)	Na	140	140	140	140
12	LPJU LED	Na	Na	62	62	62
13	LPJU Solar Cell	Na	12	12	12	12
14	Marka (m ²)	757	5.034	10.835	660	660
15	Zebra Cross	2	2	2	2	2
16	Shelter	Na	1	3	2	2
17	Paku Jalan	Na	282	282	282	282

Sumber: Dinhubkominfo Kabupaten Rembang, 2016

j. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah daerah dalam pelayanan urusan komunikasi dan informatika memiliki kewenangan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website Pemerintah Kabupaten Rembang yakni *rembangkab.go.id* sebagai media untuk terjalannya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan, dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang. Selain website resmi Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagian besar perangkat daerah bahkan sampai level Kecamatan telah memiliki website. Hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana SDM yang ada di Perangkat Daerah mampu mengelola dan memanfaatkan media tersebut untuk menyampaikan informasi pembangunan yang dilaksanakan dan juga mampu menyediakan data-data yang valid yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten/Kota. Adapun indikator dalam SPM tersebut adalah:

- 1) Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:
 - Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
 - Media baru seperti website (media online);
 - Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
 - Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau
 - Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet,

- brosur, spanduk, dan baliho.
- 2) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

Semua indikator SPM yang targetnya harus dicapai oleh Kabupaten Rembang sampai saat ini belum terdata dengan baik. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut:

Tabel 2.50.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah jaringan komunikasi	27	29	29	29	58
2.	Jumlah penyiaran radio	9	13	13	13	13
3.	Cakupan layanan SST	5.300	5.600	5.450	5.500	5.500
4.	Jumlah aplikasi e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	13	14	14	15	20
5.	persentase PD telah memiliki website (%)	39,13	86,97	86,97	86,97	86,97
6.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	7	7	21	21	22
7.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:					
	▪ Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	2	2	2	2	2
	▪ Media baru seperti website (media online);	Na	Na	na	Na	11
	▪ Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	1	1	1	1	1
	▪ Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau	1	1	1	1	1
	▪ Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	2	2	2	2	2

Sumber: Dinhubkominfo Kabupaten Rembang tahun 2016

k. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar warga Kabupaten Rembang, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM

harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM.

Koperasi harus kreatif dalam menghadapi persaingan usaha dan kegiatan ekonomi yang semakin ketat. Kreativitas menjadi konsekuensi yang harus dimiliki koperasi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan terjadi tidak hanya pada lingkungan internal tetapi juga bersaing dengan skala lebih luas. Untuk maju, koperasi harus menjalin kerja sama dengan banyak pihak. Bekerjasama dengan mitra baik lokal, regional maupun mitra berskala internasional harus dilakukan untuk membawa koperasi terus berkembang. Terdapat empat indikator untuk mengukur kemajuan koperasi, diantaranya (1) sumber daya koperasi baik SDM maupun permodalannya, (2) sarana dan prasarananya (3) peran terhadap lingkungan, dan dampak positifnya baik masyarakat maupun anggota sendiri (4) adanya program strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Perkembangan

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut:

Tabel 2.51.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (unit)	20.826	26.167	33.900	39.363	39.363
2.	Jumlah LKM koperasi dan UKM (uniT)	54	43	84	275	279
3.	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk (unit)	na	na	4	5	6
4.	Persentase koperasi aktif (%)	76,20	78,64	78,68	78,68	79,00
5.	Persentase KSP/USP koperasi sehat (%)	22,50	34,90	31,80	32,00	35,00
6.	Cakupan bina kelompok UMKM	1.041	1.308	1.695	1.968	1.972
7.	Jumlah Wirausaha Baru (buah)		5.341	7.733	5.463	5.112

Sumber: Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Rembang Tahun 2016

1. Penanaman Modal Daerah

Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi (penanaman modal) memberikan dampak positif bagi pertumbuhan suatu wilayah dan kesejahteraan penduduk. Untuk meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang, pemerintah perlu melakukan promosi tentang potensi daerah serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan daya saing dunia usaha nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya tingkat pendapatan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah, dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi

fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah investasi proyek PMA/PMDN di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 investasi PMA/PMDN sebesar 3,478 T, mengalami sedikit peningkatan drastis dari tahun sebelumnya 2014 yang hanya sebesar 646, 8 M. Dengan semakin meningkatnya jumlah investasi dan investor yang ada di Kabupaten Rembang, memberikan *multiplier effect* kepada penyerapan jumlah tenaga kerja. Dimana jumlah tenaga yang terserap pada tahun 2014 sebesar 2,672 orang, mengalami peningkatan sebesar 7.742 orang pada tahun 2015. Secara rinci Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 terlihat pada tabel 2.52 berikut:

Tabel 2.52.
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 profil investasi	1 profil investasi	1 profil investasi	1 profil investasi	1 profil investasi
2.	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	3	3	3	3	3
3.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	3	3	3	3	3
4.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	3	3	3	3	3
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4	6	10	10	20
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	249,6 M	671 M	673,7 M	646,8 M	3,478 T
7.	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Ijin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, tanda daftar perusahaan (TDP) surat ijin usaha perdagangan (SIUP) (%)	100	100	100	100	100
8.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (%)	100	100	100	100	100
9.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%)	-	100	100	100	100
10.	Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana (%)	7,41	11,11	18,51	18,51	37,03

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
11.	Persentase PMA/PMDN diKabupaten Rembang yang taat aturan (%)	20	40	40	60	65
12.	Jumlah tenaga terserap tenaga kerja (%)	1.864	2.333	1.763	2.672	7.742
13.	Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani (%)	85	95	95	95	95

Sumber: KPPT Kabupaten Rembang Tahun 2016

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kemajuan suatu daerah pada masa mendatang salah satunya bergantung kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet pembangunan. Pemuda yang berpendidikan, terampil, mempunyai integritas dan patriotisme akan mampu berperan sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan. Selama kurun tahun 2011-2015 jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Rembang relatif tetap yaitu AMPI, KOSGORO, Rembang Bangkit Foundation, dan Gerakan Pemuda Nusantara namun ada peningkatan pada Karang Taruna dan PPMI. Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut:

Tabel 2.53.
Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	KNPI	1	1	1	1	1
2.	AMPI	1	1	1	1	1
3.	Pemuda Ansor	1	1	1	1	1
4.	Pemuda Muhammadiyah	1	1	1	1	1
5.	Pramuka	1	1	1	1	1
6.	KUPP/KWP (Kelompok Wirausaha Pemuda)	22	22	22	22	22
7.	KOSGORO	1	1	1	1	1
8.	Rembang Bangkit Foundontion	1	1	1	1	1
9.	Gerakan Pemuda Nusantara	1	1	1	1	1
10.	Puma Prakarya Muda Indonesia (PPMI)	1	1	1	1	1
	Jumlah	31	31	31	31	31

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang Tahun 2016

Di bidang keolahragaan, keikutsertaan kontingen Kabupaten Rembang dalam Porprov Jawa Tengah yang ke-XIV diselenggarakan di Banyumas pada tahun 2013 menempati peringkat ke-26 dengan perolehan 4 emas, 8 perak dan 5 perunggu. Sementara itu dibidang olahraga klub olah raga yang berkembang sampai dengan tahun 2013

sebanyak 105 klub. Cabang Olahraga yang mempunyai klub tertinggi yaitu Sepak Bola sebanyak 18 cabang, cabang berikutnya diambil oleh cabang catur sebanyak 16 cabang olahraga pada tahun 2013. Sarana dan prasarana olahraga terbanyak yaitu dimiliki oleh lapangan volley sebanyak 276 dan posisi berikutnya yaitu lapangan sepak bola sebanyak 252 pada tahun 2013. Sedangkan yang paling sedikit sarana dan prasarananya yaitu kolam renang sebanyak 2 unit pada tahun yang sama.

Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terdapat sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat utamanya untuk berbagai aktifitas olah raga; Sepak Bola, Basket, Volley, Bulu Tangkis dan Renang, sedangkan GOR dapat dimanfaatkan untuk kegiatan serbaguna. Adapun perkembangan jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.54 berikut:

Tabel 2.54.
Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah (unit)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Lapangan Sepak Bola	252	252	252	252	252
2	Lapangan Basket	44	46	46	46	46
3	Lapangan Volley	272	276	276	276	276
4	Lapangan Bulu Tangkis	34	38	38	38	38
5	Kolam Renang	2	2	2	2	2
6	Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna	16	19	19	19	19

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang, 2016

Selanjutnya Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut:

Tabel 2.55.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pemuda (orang)	148.747	149.408	149.408	138.863	150.955
2.	Jumlah anggota pasukan paskibraka (orang)(orang)	76	76	76	76	76
3.	Jumlah peserta TUB BB (orang)	20	20	20	20	20

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
4.	Jumlah Peserta Jambore Pemuda Indonesia (orang)	14	14	14	14	14
5.	Jumlah peserta kemah bakti (kontingen)	14	14	14	14	24
6.	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi di Tingkat provinsi (orang)	5	7	7	8	10
7.	Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri (Usaha)	22	22	22	22	22
8.	Jumlah OKP (Organisasi Kepemudaan)	31	31	31	31	31
9.	Jumlah kasus narkoba di kabupaten Rembang (kasus)	1	1	2	1	1
10.	- Jumlah tenaga pelatih yang terlatih (orang)	25	25	25	25	30
	- Jumlah atlet yang terlatih (orang)	20	24	24	25	30
	- Jumlah pengurus cabor yang terlatih (orang)	6	6	7	10	10
11	- Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda Kabupaten (Atlet)	160	160	181	200	226
	- Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda tingkat Karesidenan (Atlet)	61	85	70	59	64
	- Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda tingkat Provinsi (Atlet)	11	19	15	16	60
12	- Jumlah club olahraga di tingkat pelajar	151	163	169	171	179
	- Jumlah club olahraga di tingkat mahasiswa (club)	1	1	2	2	3
	- Jumlah club olahraga di masyarakat (Club)	455	460	469	472	485
13	- Jumlah atlet yang menerima penghargaan prestasi di tingkat Karesidenan	0	0	0	130	139
	- Jumlah atlet yang menerima penghargaan prestasi di tingkat provinsi	18	25	27	32	35
	- Jumlah atlet yang menerima penghargaan di tingkat nasional	0	0	1	2	5
14	Jumlah lapangang olahraga milik Pemerintah Kabupaten Rembang	4	4	4	4	4
15	Jumlah gelanggang olahraga milik pemerintah kabupaten Rembang	3	3	3	3	3

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang, Tahun 2016

n. Statistik

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional, oleh sebab itu, ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Pasal 5 Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab BPS. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Produk berupa buku statistik yang telah dihasilkan dan dipublikasikan selama kurun waktu 2011–2015 antara lain adalah Rembang Dalam Angka (setiap tahun); Buku PDRB (setiap tahun); Kecamatan Dalam Angka; NTP; Profil Kependudukan, Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, Profil Ketenagakerjaan

o. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten/daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah untuk Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sampai saat ini pemanfaatan persandian di Kabupaten Rembang baru sebatas pada pelayanan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan Kabupaten/Kota. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

p. Kebudayaan

Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Karawitan, Suarawati, Gadon, Cokek'an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil, Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek - Orek, Pathol Sarang, Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten Rembang.

Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan potensi, namun demikian Pembinaan terhadap Kelompok-kelompok Seni tersebut secara keseluruhan belum mencapai sasaran. Pada tahun 2016 ini Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah Karawitan yaitu sebanyak 71 buah, posisi berikutnya diraih oleh Solo Organ sebanyak 63 buah.

Data di Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa Indikator yaitu Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional, Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah. Indikator tersebut dapat dilihat selengkapnya pada tabel 2.56 berikut ini

Tabel 2.56.
Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten
Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya (kegiatan)	16	16	16	16	18
2.	Jumlah kelompok kesenian tradisional (klp)	204	258	285	311	311
3.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (cagar budaya)	3	3	3	3	3
4.	Jumlah Cagar budaya	43	43	47	47	47
5.	Jumlah seniman (orang)	1.227	1.239	1.243	1.251	1.252
6.	Jumlah jenis seni tradisi yang dilestarikan (kesenian)	18	18	18	18	18
7.	Jumlah Museum	1	1	1	1	3
8.	Jumlah Sanggar Budaya	2	2	2	2	2
9.	Jumlah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (organisasasi)	13	13	13	13	13

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang tahun 2016

Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut:

Tabel 2.57.
Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang
Tahun 2014

Kecamatan	Tarian Modern	Tarian Klasik	Tarian Rakyat		
			Reog	Tayuban	Kreasi
Sumber	2	2	-	1	1
Bulu	1	1	-	-	-
Gunem	1	1	5	2	1
Sale	1	1	-	3	1
Sarang	-	-	-	-	-
Sedan	-	-	-	-	-
Pamotan	1	1	1	-	-
Sulang	2	2	-	-	2
Kaliori	2	2	1	-	1
Rembang	6	6	-	-	4
Pancur	-	-	-	-	-
Kragan	-	-	4	2	-
Sluke	2	2	-	-	-
Lasem	2	2	1	1	1
Kabupaten					
Rembang	20	20	12	9	11
2014	20	20	12	5	11
2013	20	20	12	5	11
2012	20	20	12	4	11
2011					

Sumber: Dinbudparpora Kabupaten Rembang Tahun 2014

q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Peran Perpustakaan yaitu: sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuh-kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Perpustakaan sebagai sarana untuk melestarikan hasil budaya yang dapat dilakukan dengan melakukan aktifitas pemeliharaan koleksi. Perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh informasi sangat penting kedudukannya dalam rangka mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal. Perpustakaan berfungsi antara lain, (1) menyimpan koleksi (informasi), (2) menyediakan informasi bagi masyarakat, (3) sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non formal, (4) mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya dan (5) menjadi tempat untuk rekreasi.

Kabupaten Rembang memiliki perpustakaan umum dan khusus yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Jenis perpustakaan di Kabupaten Rembang diantaranya perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, dan perpustakaan keliling. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir terutama dialami pada perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat. Pada tahun 2011 jumlah perpustakaan desa sebesar 46 meningkat menjadi 61 pada tahun 2015. Jumlah kunjungan perpustakaan di Kabupaten Rembang juga mengalami peningkatan fluktuatif, yaitu pada tahun 2011 sebesar 16.084 orang pengunjung menjadi 16.819 orang pengunjung di Tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya minat baca pada masyarakat Kabupaten Rembang. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2011 sebesar 24.190 eksemplar meningkat menjadi sebesar 30.182 eksemplar pada tahun 2015.

Upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah sudah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui berbagai promosi minat baca, penambahan fasilitas perpustakaan,

dan penambahan jumlah koleksi perpustakaan. Perpustakaan daerah juga menyelenggarakan perpustakaan keliling dan pameran buku dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, namun hasilnya belum terlihat signifikan dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan belum tinggi. Kemajuan teknologi juga semakin pesat, masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses internet hanya menggunakan handphone maupun tablet. Perpustakaan digital juga sudah berkembang, sehingga masyarakat tidak perlu berkunjung ke perpustakaan, mereka cukup mengakses melalui internet.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.58 berikut:

Tabel 2.58.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah perpustakaan					
	- Daerah (unit)	1	1	1	1	1
	- Kecamatan (unit)	1	1	1	1	2
	- Desa (unit)	46	52	59	61	61
	- Masyarakat (unit)	13	15	17	19	21
	- Keliling (unit)	1	1	1	1	1
2.	Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik (%)	81,97	79,71	76,92	76,83	82,35
3.	Angka kunjungan perpustakaan per tahun (orang)	16.084	16.330	16.563	16.672	16.819
4.	Cakupan naskah kuno yang dilestarikan (naskah)	146	184	237	270	270
5.	Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	24.382	25.260	25.401	26.582	30.182

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang tahun 2016

r. Kearsipan

Penanganan arsip yang baik sangat dibutuhkan dalam organisasi, mengingat bahwa kegiatan dan tujuan organisasi selalu berkembang. Sistem penanganan kearsipan yang sesuai dengan kebutuhan, praktis, dan mudah dilaksanakan diharapkan arsip memiliki nilai guna optimal, ditemukan dengan cepat dan tepat jika dibutuhkan.

Fungsi kearsipan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di Kabupaten Rembang, capaian kinerja urusan kearsipan masih sangat kurang. Arsip yang ada, harus dialihmediakan supaya mempermudah pengguna dan juga berfungsi sebagai *back up* data. Dalam pengelolaan dan penanganan arsip membutuhkan SDM yang memahami tentang sistem kearsipan untuk menunjang kinerja. Tenaga arsiparis harus memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola dan menangani arsip. di Kabupaten Rembang, sampai pada tahun 2015, hanya memiliki 2 arsiparis yang tercatat memiliki kompetensi dan keterampilan.

Dalam hal pengelolaan, pengelolaan arsip secara baku baru dilakukan 31,9% pada tahun 2015. Sementara itu, sampai pada tahun 2015. Pengelolaan arsip juga dilakukan secara menyeluruh sampai pada tingkat desa/kelurahan. Terkait dengan persentase, sampai pada tahun 2015, tercatat ada 52% desa/kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku.

Selain tenaga/SDM yang memiliki kompetensi, pengelolaan dan penanganan arsip juga memerlukan sarana dan prasarana kearsipan dengan kondisi yang baik. Seperti yang ada di Kabupaten Rembang, sarana dan prasarana kearsipan masih kurang. Dari keseluruhan peralatan kearsipan hanya 60% dalam kondisi baik, meskipun dari jumlah gedung dan jumlah ruangan sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.59 berikut:

Tabel 2.59.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase arsip yang dialihmediakan (%)	7 %	8 %	9 %	10 %	15 %
2.	Persentase arsip yang dimusnahkan (%)	2	2,1	2,3	2,4	2,5

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
3.	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi	2	2	2	2	2
4.	Jumlah pengguna arsip (PD)	28	32	32	34	34
5.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	25,5	25,7	29,7	29,7	31,9
6.	Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya (%)	11	12	13	14,5	15
7.	Persentase Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku (%)	17,7	21,4	32,7	43,5	52
8.	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik					
	1. Gedung (%)	50	55	60	65	70
	2. Ruangan (%)	50	55	60	65	70
	3. Peralatan (%)	35	40	45	50	60

Keterangan: PD = Perangkat Daerah

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1) Perikanan Budidaya

Potensi perikanan Kabupaten Rembang khususnya budidaya belum dimanfaatkan secara optimal baik budidaya perikanan darat maupun budidaya perikanan laut, oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari semua pihak untuk pengembangan perikanan budidaya tersebut. Perikanan budidaya merupakan salah satu potensi yang dimiliki dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Adapun potensi perikanan budidaya darat meliputi budidaya air tawar dan air payau. Namun demikian budidaya perikanan air laut secara geografis kurang memungkinkan karena berada pada Laut Jawa dan bukan merupakan wilayah kepulauan dengan air tenang. Salah satu yang menjadi komoditas unggulan budidaya air payau adalah bandeng dan udang vamaei, sedangkan komoditas air tawar adalah lele dan nila. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Rembang terus meningkat setiap tahunnya dari 2011-2015 dengan produksi pada tahun 2015 adalah 4.017.500 kg mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun 2011. Produksi pada tahun 2011 hanya sebesar 1.561.464 kg, atau meningkat 257,29%.

2) Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang,

mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama kurun waktu 2011–2015, pada tahun 2015 produksi perikanan tangkap sebesar 60.904.207 kg. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 60.772.646 kg.

TPI yang terdapat di Kabupaten Rembang tersebar di berbagai desa yaitu Tunggulsari, Tanjungsari, Tasikagung I, Tasikagung II, Pasar Banggi, Pangkalan, Pandangan, Karanglincak, Karanganyar, dan Sarang.

3) Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kabupaten Rembang memiliki potensi hasil kelautan dan perikanan yang cukup besar, baik dari hasil produksi perikanan tangkap maupun budidaya. Dapat ditunjukkan dengan produksi ikan 5 tahun terakhir (2011-2015) yaitu pada tahun 2011 sebanyak 140.600.600 ton dan meningkat di tahun 2015 sebanyak 212.035.000 atau 150,80%.

Jumlah pedagang (bakul) ikan di Kabupaten Rembang berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir (2011-2015) mengalami peningkatan, pada tahun 2011 yaitu sebanyak 1.049 orang menjadi 1.570 orang pada tahun 2015. Peningkatan jumlah bakul ikan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat. Dimana konsumsi perkapita Kabupaten Rembang 14 kg/kapita/tahun, masih di bawah target nasional yaitu 35 kg per kapita per tahun. Perkembangan Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut:

Tabel 2.60.
Perkembangan Kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produksi perikanan budidaya (kg)	1.561.464	1.571.237	1.714.023	4.017.500	7.477.000
2.	Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan (Rupiah/bulan)	1.817.998	1.846.546	2.002.864	11.152.686	23.703.783
3.	- Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya ikan(%)	32	32	32	32	32
	- Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya ikan (Kelompok)	110	119	127	134	141

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
4.	- Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan(%)	37	37	37	38	41
	- Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan (Kelompok)	13	14	15	14	14
5.	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)	2.694	2.709	2.779	2.762	2.769
6.	Jumlah produksi hasil olahan ikan (kg)	140.600.600	175.150.200	210.180.200	210.024.000	212.035.000
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					
7.	Produksi perikanan tangkap (kg)	50.264.166	58.496.891	57.369.913	60.772.646	60.904.207
8.	Rata-rata pendapatan nelayan (Rupiah/bulan)	1.168.758	1.411.983	1.618.892.	1.593.728	1.657.150
9.	- Cakupan kelompok nelayan yang dibina (%)	51	57	62	66	68
	- Cakupan kelompok nelayan yang dibina (kelompok)	18	20	22	23	24
10.	- Tingkat cakupan bantuan kelompok tangkap ikan (%)	51	57	62	66	68
	- Tingkat cakupan bantuan kelompok tangkap ikan (kelompok)	18	20	22	23	24
11.	Cakupan TPI dalam kondisi baik (unit)	10	10	10	10	10

Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan diperoleh dari nilai total perikanan budidaya (kolam dan tambak) dalam satu tahun dibagi jumlah pembudidaya ikan dibagi 12 bulan sehingga diperoleh rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kontribusi pendapatan pembudidaya terbesar diperoleh dari budidaya udang panamae. Untuk rata-rata pendapatan nelayan diperoleh dari nilai produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun baik yang dilelang lewat TPI maupun yang dijual diluar TPI dibagi jumlah nelayan dibagi 12 bulan

4) Usaha Garam Rakyat

Pada Tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan Garam. Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk pengembangan garam rakyat yang sebagian besar

berada di wilayah Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Berikut tabel 2.61 perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.61.
Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Tahun	Luas Lahan Produksi (Ha)	Jumlah Pekerja (Orang)		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)
			Pemilik	Pekerja		
1.	2011	1.584,42	1.058	4.120	125.119,4	50.047.760,-
2.	2012	1.584,42	1.058	4.120	186.531,9	55.965.000,-
3.	2013	1.584,42	1.058	4.120	107.121,1	32.136.327,-
4.	2014	1.543,22	1.058	4.210	141.943,1	57.480.253,-
5.	2015	1.568,66	1.088	4.212	219.477,5	65.843.250,-

Sumber: Dinlutkan Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Perkembangan produksi garam cenderung fluktuatif, dengan ada peningkatan jumlah produksi di tahun 2015, faktor penyebabnya dikarenakan masih sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca dan penerapan teknologi pembuatan garam (bio isolator).

b. Pariwisata

Kabupaten Rembang memiliki destinasi wisata yang beragam, diantaranya yaitu wisata religi, wisata budaya dan wisata alam. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Rembang tercatat sejumlah 8 buah obyek wisata unggulan, yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini, Pantai Caruban, Museum RA Kartini, Embung Lodan, Wana Wisata Kartini Mantingan, Makam RA Kartini, Pasujudan Sunan Bonang, dan Pantai Karang Jahe.

Kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif berfluktuasi. Pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisata sebanyak 432.671 orang dan menjadi 727.453 orang pada tahun 2015. Tujuan wisata utama wisatawan adalah Taman Rekreasi Pantai Kartini. Turunnya kunjungan wisata pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan kegiatan event budaya sawalan dipindahkan penyelenggaraannya dari Pantai Kartini ke sekitar TPI Tasik Agung. Pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.325.758.920,00 lebih tinggi dari target sebesar Rp. 1.289.771.100,00. Dengan pendapatan sebesar itu memberikan kontribusi sebesar 0,66% terhadap PAD tahun 2015.

Terdapat sejumlah kewenangan urusan pariwisata yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu (1) pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota ; (2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3) pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota; (5) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (6) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota; dan (7) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Pengembangan kepariwisataan semakin penting dilakukan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan PAD. Dengan adanya peningkatan obyek wisata diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisata dan pendapatan asli daerah Kabupaten Rembang. Secara rinci Perkembangan Capaian Kinerja Urusan pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.62 di bawah ini:

Tabel 2.62.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total Kunjungan Wisman dan Wisnus (orang)	432.671	1.321.411	2.345.107	993.363	727.453
2.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan (%)	3	4	4	5	5
3.	Rata-rata lama menginap (hari)	1	1	1	1	1
4.	Dokumen RIPARDA Kabupaten Rembang (dokumen)	1	1	1	1	1
5.	Jumlah obyek wisata unggulan (obyek)	3	3	3	3	3
2.	jumlah restoran (unit)	24	24	25	25	29
3.	Jumlah hotel Berbintang & Non bintang (unit)	18	18	19	20	21
1.	Persentase pramuwisata bersertifikat					
	- Muda (%)	4	4	4	4	4

Sumber: Profil Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Tahun 2016

Capaian kunjungan wisman dan wisnus pada tahun 2011 s/d 2013 mengalami kenaikan secara drastis karena sering dilaksanakan event-event hiburan di obyek wisata sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Namun peningkatan kunjungan ini tidak mampu dipertahankan, pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan drastis

dikarenakan perpindahan kunjungan wisnus ke destinasi pariwisata baru. Destinasi pariwisata tersebut dikelola oleh masyarakat desa dan belum dikenai retribusi kecuali biaya parkir. Pengelolaannya masih bersifat tradisional dan belum dilakukan pencatatan dengan baik.

c. Pertanian

Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 hektar, yang terdiri atas lahan sawah sebesar 28,62% atau seluas 29.020 hektar, lahan bukan sawah sebesar 52,42% atau seluas 53.156 hektar dan lahan bukan pertanian sebesar 18,96% atau seluas 19.232 hektar. Penggunaan lahan di Kabupaten Rembang paling luas adalah lahan tegalan sebesar 32,94%, hutan sebesar 23,45% dan sawah tadah hujan sebesar 20,08%. Daya dukung pertanian di Kabupaten Rembang salah satunya adalah adanya aliran sungai. Sampai saat ini sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyon. Wilayah yang masuk pada daerah irigasi pertanian terdapat 25 daerah irigasi.

Pada tahun 2015, lahan pertanian dan perkebunan telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 5.500 Ha, dengan rata-rata selama 5 tahun terakhir setiap tahunnya telah dilaksanakan seluas 2.953 ha melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Hal ini dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Rembang disebabkan wilayah Rembang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan intensitas curah hujan rendah.

Hasil produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Rembang meliputi tanaman pangan utama, tanaman hortikultura, dan komoditas perkebunan utama. Tanaman pangan utama terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Produksi tanaman utama jenis padi pada tahun 2015 sebesar 256.211 ton, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2014 sebesar 183.002 ton. Produksi jagung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar 109.896 ton menjadi 128.389 ton, sedangkan tahun 2015 turun menjadi 111.145 ton. Sementara dalam periode yang sama produksi kedelai juga mengalami fluktuasi. Produksi tertinggi kedelai terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 4.582 ton menurun menjadi pada tahun 2015 sebesar 3.544 ton.

Jenis tanaman hortikultura di Kabupaten Rembang meliputi bawang merah, cabe besar, nanas, mangga dan durian. Produksi tanaman hortikultura didominasi oleh jenis buah mangga dengan produksi pada tahun 2015 sebesar 661.802 kwintal dan cabe besar yang mencapai 265.172 kwintal. Produksi hasil perkebunan terdiri dari tebu, tembakau dan kelapa dalam. Dari hasil perkebunan, produksi paling tinggi dihasilkan dari tebu yang mencapai 28.816 ton pada tahun 2015. Perkembangan kinerja peningkatan produksi pertanian/perkebunan selama periode 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63.
Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jenis Komoditas		
		Padi (ton)	Jagung (ton)	Kedelai (ton)
1.	Sumber	28,485	2,584	31
2.	Bulu	22,421	10,539	28
3.	Gunem	13,233	16,305	104
4.	Sale	35,017	16,167	154
5.	Sarang	15,408	11,384	669
6.	Sedan	11,767	19,673	913
7.	Pamotan	21,027	10,585	913
8.	Sulang	14,574	7,619	100
9.	Kaliori	34,251	21	7
10.	Rembang	18,889	417	20
11.	Pancur	6,925	964	19
12.	Kragan	16,966	7,327	519
13.	Sluke	8,218	6,546	16
14.	Lasem	9,029	1,013	51
Jumlah Tahun 2015		256,211	111,145	3,544

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang tahun 2016

Tabel 2.64.
Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Hortikultura di Kabupaten Rembang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jenis Komoditas		
		Bawang Merah (Kw)	Cabe (Kw)	Mangga (Kw)
1.	Sumber	6,527	5,814	32,090
2.	Bulu	1,408	5,516	13,866
3.	Gunem	1,009	3,765	44,252
4.	Sale	11,570	12,852	22,577
5.	Sarang	-	142,488	28,894
6.	Sedan	-	35,351	1,485
7.	Pamotan	1,855	5,761	18,880
8.	Sulang	-	13,710	29,499
9.	Kaliori	2,619	6,865	25,146
10.	Rembang	-	50	59,060
11.	Pancur	-	710	124,186
12.	Kragan	390	23,779	61,260
13.	Sluke	-	7,242	120,947
14.	Lasem	-	1,269	79,660
Jumlah Tahun 2015		25,378	265,172	661,802

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang tahun 2016

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Peningkatan Produksi Perkebunan
di Kabupaten Rembang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jenis Komoditas		
		Tebu Gula Kristal (Ton)	Tembakau (Ton)	Kelapa (Ton)
1.	Sumber	2,339	420	85
2.	Bulu	1,504	242	254
3.	Gunem	1,394	228	410
4.	Sale	987	42	297
5.	Sarang	882	17	380
6.	Sedan	878	39	501
7.	Pamotan	10,853	374	549
8.	Sulang	3,608	1,210	301
9.	Kaliori	819	99	21
10.	Rembang	1,987	47	43
11.	Pancur	2,537	22	432
12.	Kragan	382	31	626
13.	Sluke	63	-	27
14.	Lasem	584	34	112
Jumlah Tahun 2015		28,817	2,805	4,038

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang tahun 2016

Angka kesakitan ternak di Kabupaten Rembang dilihat dari komoditas jenis ternak besar, kecil dan unggas. Angka kesakitan tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada ternak besar sebesar 1,90%, menunjukkan kondisi yang sama seperti pada tahun 2012. Angka kesakitan pada jenis ternak besar tertinggi sebesar 1,95% yang terjadi pada tahun 2012. Untuk ternak kecil, angka kesakitan menunjukkan penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,20% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 dan 2012 sebesar 0,21%. Sedangkan untuk ternak jenis unggas menunjukkan fluktuasi selama tahun 2011-2015 dengan angka kesakitan ada di antara 0,03%-0,04%.

Penerapan teknologi pertanian dan perkebunan modern menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2011, kelompok tani yang menerapkan teknologi modern sebanyak 985 kelompok, meningkat menjadi 1.141 kelompok pada tahun 2015. Sementara itu untuk kelompok peternakan, kelompok yang menerapkan teknologi modern pada tahun 2015 sebanyak 368 kelompok, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.66 berikut:

Tabel 2.66.
**Perkembangan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan
 Peternakan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan modern	985	1.079	1.139	1.141	1.141
2.	Jumlah kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	252	300	352	368	368

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan hasil jual pertanian dan peternakan, peningkatan pemasaran produk pertanian di Kabupaten Rembang dilakukan melalui promosi produk. Tercatat selama lima tahun terakhir (2011-2015), promosi produk pertanian/perkebunan dilakukan 3 kali setiap tahunnya. Sedangkan untuk promosi produk peternakan dilaksanakan 1 kali setiap tahunnya. Perkembangan Kinerja Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut:

Tabel 2.67.
**Perkembangan Kinerja Peningkatan Pemasaran Hasil
 Produksi Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Promosi hasil produksi pertanian/ perkebunan	3	3	3	3	3
2.	Promosi produk peternakan (event)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang Tahun 2016

Pada tahun 2015, lahan pertanian dan perkebunan yang dialiri jaringan irigasi adalah sebesar 5.500 Ha. Kondisi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada tahun 2011 yang mencapai 1600 Ha. Dengan menurunnya luasan wilayah pertanian irigasi, sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi pertanian di Kabupaten Rembang disebabkan wilayah Rembang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan intensitas curah hujan rendah.

Peningkatan kesejahteraan petani dilaksanakan melalui pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Pada kelompok tani tanaman pangan/perkebunan, jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan sebanyak 1.141 kelompok. Untuk gabungan kelompok tani PUAP, pada tahun 2015 yang mendapatkan pembinaan

sebanyak 30 gapoktan, menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kapasitas penyuluh dilaksanakan melalui diklat formal dan non formal. Jumlah penyuluh yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya antara 17-20 orang. Dalam lima tahun terakhir, penyuluh yang mendapatkan pelatihan sudah mencapai 75 penyuluh. Selain itu, ada peningkatan kelas bagi penyuluh dan juga bagi petani, yang mana untuk penyuluh pada tahun 2015 sebesar 8,12%, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 32,67%. Sementara itu peningkatan kelas kelompok tani pada tahun 2015 mencapai 8,43%, menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang mencapai 34,92%. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut:

Tabel 2.68.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produktivitas padi (ton/ha)	5,47	5,58	5,06	4,61	6,10
2.	Bertambahnya pelaku usaha pertanian, perkebunan, peternakan (pelaku usaha)	70	84	113	115	158
3.	Peningkatan luas lahan pertanian yang teraliri Irigasi (Ha)	1.507	2.000	3.910	1.850	5.500
4.	Brtambahnya alat mesin pertanian untuk kelompok tani (Unit)				107	220
5.	Bertambahnya jalan pertanian dalam kondisi baik (Km)	13	17	30	60	28

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang Tahun 2016

1) Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan utama Kabupaten Rembang yaitu padi sawah, jagung dan kedelai. Jumlah produksi padi sawah, jagung dan kedelai dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) menunjukkan angka yang berfluktuasi. Sedangkan produksi kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami fluktuasi namun cenderung menurun selama kurun waktu 2011-2015.

2) Perkebunan

Terdapat kurang lebih 20 jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Rembang. Dari 20 jenis tersebut terdapat beberapa komoditi yang memberikan sumbangan cukup signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Rembang. Produk-

produk perkebunan tersebut antara lain Tebu, Kelapa, Wijen dan Mete. Produksi hasil perkebunan yang disebutkan tadi memberikan kontribusi yang cukup baik dalam perekonomian.

Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.69 berikut:

Tabel 2.69.
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tebu (ton)	48.003	37.790	40.624	40.897	41.039
2	Kelapa (ton)	4.145	4.296	4.012	4.021	4.039
3	Wijen (ton)	46,23	46,89	45,90	48,98	49,23
4	Mete (ton)	107,88	105,92	108,26	109,75	112,28

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Rembang Tahun 2016

3) Peternakan

Dalam upaya pengembangan usaha peternakan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan di masing-masing daerah. Peluang pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Rembang masih terbuka lebar apabila dikaitkan dengan perkiraan (estimasi) peningkatan kebutuhan konsumsi hasil ternak seiring dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi dan taraf hidup masyarakat.

Jenis ternak di Kabupaten Rembang terdiri dari Sapi perah dan potong, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Babi dan Kelinci. Populasi Komoditas peternakan selama enam tahun terakhir (2011-2015) mengalami fluktuasi. Jenis ternak yang mengalami kenaikan dari tahun 2011-2015 yaitu sapi potong, kambing dan Domba. Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra produksi sapi potong di Jawa Tengah, populasi sapi potong pada tahun 2015 mencapai 128.123 ekor dan menempati urutan keempat di Jateng.

Perkembangan Kinerja Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.70 berikut:

Tabel 2.70.
Perkembangan Kinerja Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Populasi komoditas peternakan utama (ekor)					
	- Sapi potong	152.680	164.803	117.179	120.934	128.123
	- Kerbau	190	196	202	207	211
	- Kambing	136.219	144.000	144.290	150.062	158.990
	- Domba	103.433	120.316	120.386	123.999	156.725
2.	produksi daging (kg)					
	- Sapi	960.330	1.189.020	1.215.270	1.230.390	936.811
	- Kambing	107.805	133.035	135.585	136.650	146.433
	- Domba	53.580	57.015	58.560	58.890	76.832
3.	Jumlah produksi Telur					
	- Ayam (kg)	582.330	601.459	606.656	618.780	1.468.689
	- Itik (kg)	766.091	893.802	894.717	914.784	855.849

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang Tahun 2016

d. Kehutanan

Luas hutan di Kabupaten Rembang berdasarkan data KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo tahun 2015 adalah 24.085,15 Ha. Adapun hutan produksi di Kabupaten Rembang dikelola oleh perhutani di bawah administrasi dua Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) yaitu KPH Mantingan seluas 10.992,57 Ha dan KPH Kebonharjo seluas 13.092,58 Ha. Kayu jati, kayu rimba dan kayu bakar adalah jenis kayu yang dihasilkan dari hutan yang ada di wilayah Kabupaten Rembang. Produksi kayu KPH Mantingan pada tahun 2015 yaitu sebesar 4.934,77 m³ kayu jati; 866,38 m³ kayu rimba; dan 1,64 m³ kayu bakar. Sedangkan produksi kayu KPH Kebonharjo pada tahun 2014 adalah 10.471,91 m³ kayu jati; 171,29 m³ kayu rimba; dan 118,98 m³ kayu bakar. Sedangkan khusus untuk produksi kayu rakyat trennya mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2014 sebesar 719 m³, dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 7.711 m³, tahun 2012 sebesar 9.239 m³ dan tahun 2013 sebesar 2.357 m³.

Persentase penanganan lahan kritis di Kabupaten Rembang selama periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Setiap tahun lahan kritis menunjukkan kondisi yang semakin membaik dengan mengalami penurunan luasan setiap tahunnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari luasan lahan kritis pada

tahun 2015 sebesar 560 Ha, jauh menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 sebesar 1.542 Ha. Penurunan lahan kritis tersebut merupakan hasil peningkatan persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang mencapai 33,48%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 26,32%, tahun 2012 sebesar 27,02% dan tahun 2013 sebesar 25,23%.

Selain penurunan luasan lahan kritis, rehabilitasi juga dilakukan pada wilayah pesisir melalui rehabilitasi hutan mangrove. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi setiap tahun dilakukan, yang mana pada tahun 2015 luas wilayah yang direhabilitasi hutan mangrovenya mencapai 15 Ha dan tahun 2015 seluas 15 Ha. Sementara itu kasus pencurian hasil hutan di Kabupaten Rembang juga menunjukkan penurunan. Pencurian hutan di Kabupaten Rembang setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2011, pencurian hasil hutan mengalami penurunan sebesar 7,18% dan pada tahun 2015 pencurian hasil hutan menurun sebesar 4,66%.

Dalam rangka mengembangkan hasil kehutanan, Pemerintah Kabupaten Rembang mendorong pada peningkatan pelaku usaha di sektor kehutanan. Pelaku usaha dibidang kehutanan pada tahun 2013 meningkat sebesar 3,65%, merupakan peningkatan tertinggi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku usaha dibidang kehutanan, diharapkan akan mendorong pada peningkatan kondisi perekonomian terutama pada wilayah-wilayah yang secara geografis hidup dan berkembang disekitar hutan. Perkembangan Kinerja Bidang Kehutanan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.71 berikut:

Tabel 2.71.
Perkembangan Kinerja Bidang Kehutanan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Kondisi Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1)	Berkurangnya luasan lahan kritis per tahun (Ha)	1.320	1.542	604	560	560
2)	% penurunan kasus pencurian hutan per tahun	9,97	6,15	5,34	5,12	4,66
3)	Terehabilitasinya hutan mangrove (ha)	10	51	35	15	15
4)	% peningkatan pelaku usaha di sektor kehutanan per tahun (%)	0,53	2,65	3,61	4,33	4,78

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan, Tahun 2016

e. Energi dan Sumberdaya Mineral

Di Kabupaten Rembang terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uapa (PLTU) Sluke yang dibangun oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pemerintah. Hal ini sangat membantu program pemerintah dalam distribusi listrik di wilayah sekitarnya. Tingkat elektrifikasi di Kabupaten Rembang distribusi jaringannya sudah mencapai 100%. Persentase rumah tangga yang menggunakan jaringan listrik diluar jangkauan PLN dari tahun 2011 sebesar 0,084% menurun menjadi 0% pada tahun 2015.

Disisi lain, Kabupaten Rembang mengembangkan pembangkit dengan memanfaatkan potensi sumber energi listrik setempat (alternatif) terutama untuk daerah terpencil, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS/Solar Home System). Salah satu contoh pengembangan energi alternatif dilakukan di Desa Karasgede Kecamatan Lasem yang menggunakan metode bio gas, melalui program Desa Mandiri Energi (DME).

Kabupaten Rembang juga mendorong kosep industri ramah lingkungan (*green industry concept*), salah satu contohnya yang saat ini dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) dalam memulai pembangunan pabrik baru berkapasitas 3 juta ton per tahun. Dalam hal efisiensi sumberdaya alam, perusahaan mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif dari limbah pertanian (*biomass*), seperti sekam padi, cocopeat atau sabut kelapa, serbuk gergaji, limbah tembakau, dan sampah kota sebagai RDF (*refuse derivative fuel*).

Selain ketersediaan sumber energi, potensi pertambangan di Kabupaten Rembang cukup besar. Terdapat lokasi sumur migas di Desa Kajar Kecamatan Gunem dan di Dusun Sumberwungu Desa Tahunan Kecamatan Sale yang potensial untuk dieksploitasi. Sebagian wilayah Kabupaten Rembang yang merupakan pegunungan kapur memiliki kandungan berbagai batuan bahan galian tambang, untuk menjadi bahan baku pembuatan Semen. Kandungan yang terbesar adalah jenis Alluvium yang meliputi luas 45.470.783 ha atau 44,84% dari luas wilayah Kabupaten Rembang. Potensi lain adalah *miosen fasies sedimen* yaitu seluas 32.125.000 ha atau 31,68%. Bahan galian jenis batuan yang ada berupa: andesit (Kecamatan Sluke, Sedan, Lasem, Kragan, Pancur, Gunem dan Sale), pasir kuarsa (Kecamatan Sedan, Bulu, Sarang, Sale, dan Gunem), batu

kapur/gamping (Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sale, Gunem, Bulu, dan Sumber), trass (Kecamatan Sluke, Pancur, Kragan, Gunem dan Sale), fospat (Kecamatan Pamotan, Gunem, dan Sale), ballclay (Kecamatan Sarang, Sedan, Gunem, Bulu, dan Sale), batubara (Kecamatan Gunem, Pamotan, Sarang, Sale, Bulu dan Lasem), serta gipsum (Kecamatan Sedan, Gunem, Lasem, Sarang).

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.72 berikut:

Tabel 2.72.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan jaringan listrik di luar jangkauan PLN (%)	0,084	0,083	0,045	0	0
2.	Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan	0	0	0	0	0
3.	Persentase lahan bekas pertambangan telah dilakukan reklamasi lahan (%)	35	35	45	50	50
4.	Jumlah kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai kaidah kegiatan pertambangan yang baik.	54	70	98	42	70

Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Rembang Tahun 2015

4) Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebesar 17,06%, dan merupakan kontributor terbesar ke 3, setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Rembang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2011–2015, yaitu 14,76% (tahun 2011), 14,13% (tahun 2012) dan 13,83% (tahun 2013) dan 13,68% (tahun 2014). Hal ini antara lain turut didorong oleh naiknya nilai ekspor Kabupaten Rembang selama lima kurun waktu tahun 2011–2015, yaitu sebesar \$15.937.534,10 (tahun 2011), meningkat menjadi \$18.983.364,60

(tahun 2015). Disamping itu ketersediaan pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Capaian kinerja sektor perdagangan ditunjukkan dari indikator-indikator kinerja sektor perdagangan menunjukkan kenaikan dari tahun 2011–2015. Adapun perkembangan capaian kinerja sektor perdagangan tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel 2.73 berikut ini:

Tabel 2.73.
Perkembangan Capaian Kinerja Sektor Perdagangan
Tahun 2011–2015

No	Indikator	Capaian Tahun				2015
		2011	2012	2013	2014	
1.	Jumlah sidang tera ulang (kasus)	38	38	39	44	44
2.	Jumlah pasar (tradisional dan modern) yang diawasi (unit)	39	40	47	52	52
3.	Persentase kasus yang diselesaikan melalui unit pelayanan pengaduan konsumen (%)	-	-	-	2	2
4.	Ketersediaan informasi pantauan harga kepokmas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Jumlah promosi dagang yang diikuti (kali)	1	1	1	1	1
6.	Nilai Ekspor	\$15.937.534,10	\$25.751.858,80	\$12.205.493,30	\$18.983.364,60	\$18.983.364,60
7.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	14,76%	14,13%	13,83%	13,68%	13,68%
8.	Jumlah kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina (kelompok)	12	12	15	16	16
9.	Jumlah pasar daerah (unit)	11	11	11	12	12
10.	Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat (uni)	11	11	11	12	12
11.	Lokasi PKL yang tertata (lokasi)	1	2	2	3	3

Sumber: Dinindagkop dan UMKM Tahun 2016

f. Perindustrian

Sektor industri merupakan kontributor terbesar ke dua terhadap PDRB Kabupaten Rembang sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, yaitu berturut-turut sebesar, 17,31%, 18,25%, 19,05% dan 20,84%. Kondisi ini menunjukkan semakin berperannya sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang. Semakin berperannya sektor industri ini dapat ditunjukkan pula dari capaian

kinerja industri, dimana indikator-indikator yang ada cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian Kabupaten Rembang belum memiliki kawasan industri terpadu yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta.

Kabupaten Rembang memiliki industri besar yang bergerak pada sektor makanan dan minuman, Industri kimia-bahan bangunan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan dan umum. Kabupaten Rembang juga memiliki potensi industri menengah dan kecil lainnya yang berbasis pada sumberdaya alam, antara lain garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, industri pembuatan tas dan dompet, sabuk dan lain-lain.

Hingga saat ini terdata sejumlah industri besar di Kabupaten Rembang antara lain, 4 unit industri pengolahan, 5 unit industri ikan, 10 unit industri logam mesin dan elektronika (ILME), 4 unit industri kimia dan kertas (IKK) dan 17 unit di kelompok industri agro dan hasil hutan. Skala usaha sedang terdapat di berbagai bidang industri seperti pengolahan ada 235 unit, di ILME ada 429 unit, industri tekstil dan aneka ada 99 unit dan di kelompok industri agro dan hasil hutan ada 540 unit. Usaha kecil di industri pengolahan ada 1.285 unit, kelompok industri logam mesin dan elektronika ada 1.443 unit, kelompok industri tekstil dan aneka ada 237 unit dan kelompok industri agro dan hasil hutan ada 1.193 unit. Selain itu, tercatat produksi rata-rata industri garam rakyat sebesar 150.400 ton/tahun.

Secara rinci perkembangan capaian kinerja sektor industri di Kabupaten Rembang tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel 2.74 berikut ini:

Tabel 2.74.
Perkembangan Capaian Kinerja Sektor Industri
di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan IKM yang dibina (%)	1,8	1,4	1,5	1,1	1,1
2.	Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	100	100	100
3.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	17,31	18,25	19,05	20,84	20,84
4.	Persentase industri kecil dan menengah terhadap total jumlah industri (besar, menengah dan kecil) (%)	25,10	27,21	29,08	30,77	32,30

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
5.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Perijinan	-	-	40	25	25
6.	Jumlah IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	16	12	25	12	12
7.	Jumlah fasilitas peningkatan kemampuan teknologi industry	10	16	18	13	13
8.	Jumlah klaster industri	6	6	8	8	9
9.	Jumlah sentra industri	31	33	35	37	37

Sumber: Dinindagkop dan UMKM Tahun 2016

g. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (*human rights*), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya, serta hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

Banyaknya transmigran pada tahun 2011-2014 dari 10 KK (35 jiwa) menjadi 3 KK (11 jiwa). Rendahnya jumlah transmigran di Kabupaten Rembang, karena ketersediaan kuota transmigrasi yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat) sedikit. Transmigran yang berangkat semua berprofesi sebagai petani, karena di daerah tujuan transmigrasi ketrampilan yang dibutuhkan di bidang pertanian atau perkebunan.

2.3.3. Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tidak lagi disebutkan urusan perencanaan pembangunan dan urusan otonomi daerah. Institusi atau lembaga yang saat ini melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam kategori unsur penunjang pemerintahan. Unsur

penunjang pemerintahan adalah Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

a. Kepegawaian

Peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Kebijakan tersebut merupakan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 yang perlu dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pemberian kesempatan studi lanjut (melalui pendidikan diploma, sarjana, pasca sarjana, pendidikan spesialis dan profesi), pendidikan non formal (melalui pelatihan teknik, kursus, semiloka dan lain-lain) serta diklat fungsional dan diklat teknis. Sedangkan responsibilitas dan akuntabilitas dengan mewujudkan budaya organisasi, peningkatan tanggung jawab dan keterbukaan terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang tahun 2015 tercatat sebanyak 8.271 orang yang terdistribusi pada 39 unit badan/dinas/lembaga termasuk di dalamnya instansi vertikal. Perincian data aparatur pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin terdiri atas laki-laki 5.034 orang (57,25%) dan perempuan sebanyak 3.759 orang (42,75%). Berdasarkan pengelompokan golongan diketahui sebagian besar Golongan III sebesar 38,54%, Golongan IV sebanyak 34,93% sa Golongan I sebesar

3,33% dan Golongan II sebesar 23,20%. Kualitas sumberdaya aparatur dapat dilihat dari rata-rata pendidikan yang ditamatkan dimana (72,8%) aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang berpendidikan perguruan tinggi, dengan perincian lulusan program diploma sebesar 25,68%; pendidikan sarjana sebesar 45,55% dan sebanyak 1,57% telah menyelesaikan pendidikan magister (S-2). Sementara itu, aparat pemerintah yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 27,2% saja. Dengan demikian maka diharapkan pendidikan aparatur akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat serta kalangan dunia usaha. Upaya peningkatan pelayanan publik secara akuntabel dan responsif merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selengkapnya Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.75 berikut:

Tabel 2.75.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian
di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Indikator	Capaian Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Program Pendidikan Kedinasan						
1	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim II	1	1	2	3	1	2
2	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim III	3	3	1	3	1	-
3	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim IV	-	-	40	40	40	40
4	Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	43	46	51	100	82	192
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
1	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	97.51%	98.48%	95.96%	99.38%	99.56%	94.70%
2	Jumlah PNS Pensiun setiap tahun	254	251	304	281	136	136
3	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	24.24	33.33	24.24	9.09	9.09	75

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

Gambaran kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rembang dari tahun 2011–2015 dapat dilihat dari pelaksanaan program-program peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, adalah sebagai berikut:

- 1) Program pendidikan kedinasan;
- 2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- 3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur adalah dengan melalui berbagai diklat. Kegiatan Diklat Aparatur rata-rata mencapai 336 orang aparatur yang telah memenuhi kualifikasi dan prosedur pengajuan. Diklat aparatur terbagi menjadi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat dalam jabatan terbagi lagi menjadi diklat struktural, diklat teknis dan fungsional. Naik turunnya jumlah peserta diklat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia dan penawaran diklat dari instansi yang lebih tinggi pusat maupun provinsi.

Selain menyelenggarakan diklat, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai BKD bertugas untuk menyusun regulasi standar kompetensi pegawai dan manajemen talenta. Standar Kompetensi pegawai meliputi penyusunan regulasi standar kompetensi pegawai, standar kompetensi jabatan dan standar kompetensi managerial. Manajemen talenta meliputi Asessment Pegawai, pemetaan asessment pejabat Eselon II dan III dan tindak lanjut asessment. Kedua hal tersebut akan diupayakan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

Berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, turut berimplikasi pada perubahan kaidah penyusunan rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan batas-batas kewenangan pemerintah daerah yang diatur di dalamnya. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk perencanaan jangka panjang, RPJMD untuk perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka tahunan. Dalam rangka tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu ditunjang dengan kelengkapan data yang obyektif, akurat dan komprehensif, didukung peningkatan sumberdaya aparatur perencanaan di setiap Perangkat Daerah yang semakin baik serta mekanisme perencanaan yang sesuai kaidah. Demikian pula penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus

bersifat terpadu dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten sekitar, kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta arahan kebijakan Pemerintah Pusat.

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang telah diupayakan terpadu dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai perwujudan komitmen daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar terdapat sinergitas perencanaan pembangunan secara nasional. Dokumen perencanaan di Kabupaten Rembang secara teknis disusun berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Mengacu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka pemerintah Kabupaten Rembang wajib menyusun dokumen perencanaan, terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang wajib mengakomodasi kebijakan-kebijakan strategis dalam rencana pembangunan daerah seperti: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); RAD Pengurangan Resiko Bencana serta berbagai kebijakan lain yang penting dan relevan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan indikator kinerja kunci pada urusan wajib perencanaan pembangunan daerah terdapat empat indikator capaian yang menjadi tolak ukur keberhasilan meliputi: 1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025; 2) tersedianya Perencanaan RPJMD 2016-2021; 3) tersedianya dokumen RKPD tiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan 4) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada setiap tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja per tahun. Indikator capaian kinerja capaian Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut telah

diupayakan dengan baik dan didukung sistem informasi perencanaan yang akan terus disempurnakan implementasinya.

Secara lengkap Perkembangan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.76 berikut:

Tabel 2.76.
Perkembangan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	1	1	1	1	1
b) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	1	1	1	1	1
c) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup	1	1	1	1	1
d) Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	72	74	75	78	80

Sumber: Bappeda Kabupaten Rembang, 2016

c. Pengawasan

Terbitnya Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan birokrasi bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi baik Pusat dan Daerah. Oleh karena itu semakin strategis dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dalam koridor reformasi birokrasi.

Profesionalisme aparatur pemerintah daerah diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, profesionalisme, responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Upaya peningkatan akuntabilitas dan responsibilitas kepada masyarakat sangat tergantung pada capaian hasil pengawasan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah. Disamping itu, Inspektorat secara sinergis menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semakin baik hasilnya.

Sebagai gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang telah melaksanakan dua (2) program yang terkait dengan sistem pengawasan internal dan peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan, yaitu:

- 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015 dapat dilihat pada tabel 2.77 berikut:

Tabel 2.77.
Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler	240	240	240	240	100
2.	Jumlah LHP Khusus/Kasus	40	50	37	93	63
3.	Jumlah laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun	240	240	240	240	160
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai ditindaklanjuti	83	82	82	81,3	80
5.	Laporan Hasil Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa	81	92	96	96	84
6.	Laporan Hasil Reviu LKPD	1	1	1	1	1
7.	Laporan Reviu LKJIP Kabupaten	1	1	1	1	1
8.	Laporan Evaluasi LKJIP PD	10	10	12	12	24
9.	Koordinasi Pengawasan Secara komprehensif di Kabupaten Rembang	1	1	1	1	1
1.	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)):					
	a. JFA	-	-	4	-	8
	b. P2UPD	-	-	6	-	6
2.	Level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Rembang	1	1	1	1	1

Sumber: Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2016

d. Sekretariat DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 partai politik, dengan perincian berdasarkan

jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut: Fraksi PPP sebanyak 10 anggota; Fraksi Partai Demokrat sebanyak 8 anggota; Fraksi PDIP dan Nasdem sebanyak 8 anggota; Fraksi PKB sebanyak 6 anggota; Fraksi Gerindra sebanyak 5 anggota; Fraksi Karya Sejahtera sebanyak 4 anggota dan Fraksi Harapan sebanyak 4 anggota.

Dalam rangka menunjang tugas-tugas anggota DPRD Kabupaten Rembang maka Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan dukungan pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD, terutama fasilitasi penyelenggaraan rapat dewan, kunjungan kerja, reses dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota dewan. Adapun program-program yang dilaksanakan pada tahun 2010–2015, adalah sebagai berikut:

- 1) Program penyusunan peraturan perundangan;
- 2) Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD;
- 3) Program fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD;
- 4) Program konsultasi publik.

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.78 berikut:

Tabel 2.78.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Program/ Indikator	Capaian Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	PERDA yang ditetapkan	7	7	9	9	8
2.	RAPERDA yang disetujui DPRD	7	7	9	9	8
3.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	21	21	4	3	16
4.	Persentase capaian Prolegda (%)	100	100	100	100	100
5.	Terselenggaranya Fungsi Pengawasan DPRD (kali)	30	30	30	30	30
6.	Tersedianya Tenaga ahli untuk DPRD (orang)	7	7	7	7	7
7.	Terselenggaranya rapat-rapat DPRD diluar pembahasan perda (kali)	101	110	86	64	100
8.	Terselenggaranya Pendalaman Tugas. Orientasi dan Pengembangan SDM (kali)	8	8	9	9	8

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2016

2.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan suatu ukuran untuk menilai daya beli relatif suatu wilayah dengan wilayah lainnya dengan asumsi barang-barang dan jasa-jasa di kedua wilayah tersebut berbiaya sama. Dalam penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan digunakan teknik penyesuaian terhadap pengeluaran perkapita. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut:

Tabel 2.79.
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014

Indikator	Pengeluaran per Kapita (Metode Baru) (Ribuan Rupiah)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang	8 388.92	8 705.49	8 881.77	8 994.14	9 013.01

Sumber: BPS dan Rembang Dalam Angka 2015

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator produksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan/rasio antara Indeks yang diterima petani (It) dengan Indeks yang dibayar petani (Ib). Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian yang dihasilkan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 105,12 menjadi 100,38 pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh naik-turunnya indeks yang diterima petani (indeks harga hasil produksi pertanian) sedangkan indeks yang dibayar petani (indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian) juga mengalami hal yang sama.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

a. Perhubungan

1) Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 hektar dan terbagi ke dalam 14 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 642,75 km (jalan kewenangan Kabupaten Rembang). Jumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 pada tahun 2015 sebanyak 204.464 unit. Selengkapnya jumlah kendaraan menurut kecamatan di kabupaten Rembang tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.80 berikut:

Tabel 2.80.
Jumlah Kendaraan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah KBM	
		Roda 4 atau lebih	Roda 2 dan Roda 3
1.	Sumber	1.823	19.626
2.	Bulu	243	5.660
3.	Gunem	247	5.558
4.	Sale	472	7.896
5.	Sarang	317	8.211
6.	Sedan	552	9.679
7.	Pamotan	761	12.068
8.	Sulang	526	11.179
9.	Kaliori	568	11.340
10.	Rembang	5.145	57.390
11.	Pancur	374	7.602
12.	Klagan	838	11.301
13.	Sluke	303	6.621
14.	Lasem	1.843	16.333
		14.012	190.464

Sumber: DPPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat sarana jalan terhadap jumlah kendaraan, dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Dari data tabel 2.80 di atas maka rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan pada tahun 2015 adalah 1 dibanding 318 yang berarti bahwa setiap 1 km jalan dapat menampung kendaraan sebanyak 318 unit.

2) Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa Tengah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Tersedia 7 terminal tipe C di wilayah Kabupaten Rembang yang melayani transportasi baik dalam kota maupun ke luar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah orang yang dapat diangkut sebanyak 124.671 orang dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 198.211 orang.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dinhubkominfo Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Satlantas Polres Rembang secara rutin memberikan penyuluhan dan pembinaan berlalu lintas yang berkeselamatan kepada pemilik, pengemudi kendaraan angkutan umum barang maupun orang.

b. Penataan Ruang**1) Ketaatan Terhadap RTRW**

Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Sejak terbitnya Perda RTRW maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian sampai saat ini belum tersedia data terkait persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi Perda RTRW guna mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang begitu cepat.

2) Luas Wilayah Industri

Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.200 hektar. Adapun pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rembang terletak di

Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Kragan dan Sarang.

3) Luas Wilayah Kebanjiran

Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir dapat diketahui ternyata terdapat 5 wilayah kecamatan yang rawan terkena bencana banjir, yaitu Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan dan Lasem.

4) Luas Wilayah Kekeringan

Selain banjir, Kabupaten Rembang juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah tengah misalnya Gunem, Pancur, Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan, Lasem. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan.

5) Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama di luar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa, maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktivitas non pertanian yang memiliki karakteristik pola perkembangan menyebar, kompleksitas dan mobilitas tinggi. Di Kabupaten Rembang 8 kecamatan yang memiliki klasifikasi kawasan perkotaan, yaitu Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Kaliori, Rembang, Kragan, Sluke dan Lasem. Sedangkan 6 kecamatan lainnya masih diklasifikasikan sebagai kawasan perdesaan.

c. Pariwisata

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata meliputi 13 usaha yang terdiri dari Usaha Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Penyelenggaraan MICE, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Pramuwisata, Wisata Tirta, dan Usaha Spa.

Usaha-usaha pariwisata yang ada belum semuanya terdata dan memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sedang yang sudah terdata masing-masing daya tarik wisata alam/ budaya/ buatan ada 38 buah, Jasa Transportasi Wisata 7 buah, Jasa Perjalanan Wisata 7 buah, Jasa Makanan dan Minuman 34 buah, Jasa Penyediaan Akomodasi ada 18 buah (hanya hotel bintang dan non bintang, sedangkan homestay Desa Wisata dan Bumu Perkemahan belum terdata), Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi ada 2 buah, Jasa Informasi Pariwisata 2 buah, Jasa Pramuwisata 4 orang, Wisata Tirta 11 buah, Usaha Spa 3 buah.

1) Jumlah Rumah Makan dan Tenaga Kerja

Jumlah rumah makan di Kabupaten Rembang dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuasi. Tahun 2011 rumah makan di kabupaten Rembang berjumlah 7 buah, kemudian mengalami kenaikan yang pesat pada tahun 2011 yaitu berjumlah 25 buah. Namun sempat turun pada tahun 2012 dan 2013 yaitu berjumlah 24 buah, dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2015 berjumlah 32 buah. Tenaga kerja di rumah makan Kabupaten Rembang mengalami peningkatan pada kurun lima tahun terakhir (2011-2015). Jumlah tenaga kerja di rumah makan pada tahun 2011 sebanyak 75 orang, dan meningkat sebanyak 230 orang pada tahun 2015.

2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah hotel bintang dan non bintang ada 18 (sesuai data dari KPPT Kabupaten Rembang, 2016). Namun yang layak/ dapat didata hanya 12 terdiri dari 2 hotel bintang dan 10 hotel non bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang. Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem.

d. Utilitas Publik

a. Listrik

Peran sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjukkan peningkatan nyata dalam pembangunan daerah. Bukan hanya dalam bentuk sumber penerimaan daerah saja, tetapi mencakup kegiatan ekonomi lain seperti penyerapan tenaga kerja,

penyediaan bahan baku industri, dan memacu efek berantai ekonomi. Berdasarkan data elektrifikasi dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana sampai dengan akhir tahun 2015 telah mencapai 91,18%. Pembangunan jaringan tegangan juga terus mengalami penambahan baik jaringan tegangan menengah (JTM) maupun jaringan tegangan rendah (JTR). Selengkapnya Perkembangan Rasio elektrifikasi, pembangunan jaringan tenaga menengah dan pembangunan jaringan tenaga rendah di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.81 berikut:

Tabel 2.81.
Perkembangan Rasio elektrifikasi, pembangunan jaringan tenaga menengah dan pembangunan jaringan tenaga rendah di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

NO.	Item	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rasio Elektrifikasi (%)	68,51	74,47	85,47	87,82	91,18
2.	Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)	0,050	-	0,289	1,197	0
3.	Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)	0,493	-	4,262	3,124	0,562

Sumber: Dinas ESDM Tahun 2016

b. Air bersih

Sejalan dengan perwujudan struktur ruang RTRWK maka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Rembang seyogyanya terus melanjutkan mendorong peningkatan layanan air bersih dan irigasi, program pembangunan sungai terpadu, pembangunan embung-embung, serta peningkatan prasarana sarana drainase dan air limbah. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut:

Tabel 2.82.
Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014

No.	Item	2011	2012	2013	2014
1	Air minum	55,54%	60,04%	66,93%	70%
2	Sanitasi (dasar)	54,14%	56,09%	66,42%	71,25%
3	Persampahan	19,4%	19,85%	20,1%	20,4%

Sumber: PDAM Tahun 2016

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun jumlah kasus pelanggaran hukum adanya peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 391 kasus, sedang pada tahun 2012 sebanyak 341 kasus dan pada tahun 2013 sebanyak 394 kasus. Data tersebut diperoleh dari Polres Rembang. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah tindak kriminal yang ditangani oleh Kepolisian Resort Rembang selama satu tahun per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Rembang mempunyai kecenderungan menurun, hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 4,08 turun menjadi 3,76 pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah. Perkembangan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.83 berikut:

Tabel 2.83.
Perkembangan Jumlah Tindak Pidana
di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Tindak Kriminal			Angka Kriminalitas Yang Tertangani
		Lapor	Selesai	Rasio	
1)	2011	391	313	80,1%	5,18
2)	2012	368	289	78,5%	4,74
3)	2013	421	304	72,2%	4,98
4)	2014	354	252	71,2%	4,08
5)	2015	351	233	66,4%	3,76

Sumber: Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang 2016 (data diolah)

Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang.

Kejadian unjuk rasa di Kabupaten Rembang selama tahun 2011 sebanyak 15 kali dan pada tahun 2012 sebanyak 16 Kali dan pada tahun 2014 sebanyak 25 kali.

b. Kemudahan Perijinan

Pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang saat ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dengan metode satu pintu. Keberadaan KPPT diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Jenis perijinan yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang meliputi Izin HO, Tanda daftar perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), SIUP, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Eksploitasi Pertambangan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan bervariasi, mulai dari 6 hari sampai 10 hari. Lebih rinci Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya dapat dilihat dalam tabel 2.84 berikut:

Tabel 2.84.
Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya

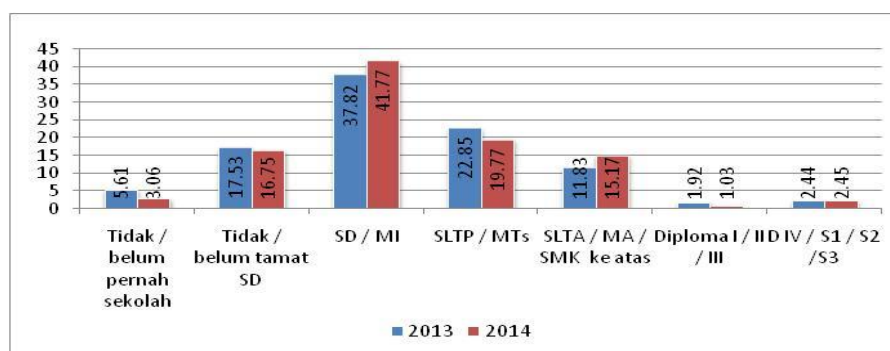
No	Jenis Ijin	Lama Proses Ijin
1.	Izin HO	10 hari
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
4.	SIUP	5 hari
5.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 hari
6.	Izin Eksploitasi Pertambangan	6 hari

Sumber: KPPT Kabupaten Rembang Tahun 2016

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi

Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013–2014 dapat dilihat pada Gambar 2.42 berikut:



Gambar 2.42

Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2013–2014

Sumber: Susenas Kabupaten Rembang Tahun 2013 dan 2014

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Rembang berpendidikan SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk SLTP/MTs, berikutnya adalah kelompok tidak/belum tamat SD dan kelompok lulusan SMA sederajat serta yang terakhir kelompok Perguruan Tinggi.

b. Rasio ketergantungan

Jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) di Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan data BPS adalah sebanyak 415.792 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif adalah 195.703 jiwa. Berdasarkan data tersebut rasio ketergantungan di Kabupaten Rembang sebesar 47,07. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Rembang menanggung 47,07 orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi. Angka ketergantungan tinggi yaitu angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.